



**DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI**

**LAPORAN KEUANGAN**  
UAPPA-W(Audited)

**KANTOR WILAYAH DJBC  
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Untuk Periode Yang berakhir

31 Desember 2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur merupakan entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan (BA 015) dan mempunyai tugas sebagai UAPPA-W yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai wujud dari pertanggungjawaban tersebut, kami telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, proses penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur ini disusun dengan basis akrual untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Balikpapan, Mei 2024  
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik  
Kusuma Santi Wahyuningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	vi
II. Neraca	vii
III. Laporan Operasional	ix
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	1
A. Penjelasan Umum	1
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	20
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI. Lampiran	
A. Laporan Realisasi Anggaran Face	
B. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	
C. Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
D. Neraca Face	
E. Neraca Percobaan Akrual (Saldo Awal)	
F. Neraca Percobaan Akrual	
G. Neraca Percobaan Kas	
H. Laporan Operasional	
I. Laporan Perubahan Ekuitas	
J. Laporan Posisi BMN di Neraca	
K. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)	
L. Kertas Kerja Telaah	
M. LPJ dan Rekening Bendahara	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 546, BALIKPAPAN 76114  
TELEPON (0542) 733927; FAKSIMILE (0542) 732598; LAMAN [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tingkat **UAPPA-W** Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tingkat **UAPPA-W** Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Balikpapan, Mei 2024  
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik  
Kusuma Santi Wahyuningsih

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tingkat **UAPPA-W** Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 (*Audited*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan-LRA Tingkat **UAPPA-W** Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur *Unaudited* Tahun 2023 senilai Rp.1.769.116.498.017 terdiri dari Penerimaan Perpajakan senilai Rp.1.768.114.163.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp.1.002.335.017 atau mencapai 80,12 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp2.208.183.026.000. Sedangkan realisasi Belanja Tingkat **UAPPA-W** Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.819.040.260 atau mencapai 92,53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp26.822.590.000

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023. Nilai Aset Tingkat **UAPPA-W** Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp330.803.511.054 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp8.833.290.554, Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp320.546.849.895, dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp1.423.370.605. Nilai Kewajiban dan Ekuitas Tingkat **UAPPA-W** Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.160.424.030 dan Rp326.643.087.024.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO Tingkat **UAPPA-W** Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.762.566.960.063, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp35.688.335.171, sehingga terdapat *Surplus* dari Kegiatan Operasional sebesar Rp1.726.878.624.892. Kegiatan Non Operasional membukukan Defisit sebesar (Rp81.869.624), sehingga entitas mengalami *Surplus-LO* sebesar Rp1.726.796.755.268.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp341.012.580.895, sepanjang Tahun Anggaran 2023 terdapat Surplus-LO sebesar Rp1.726.796.755.268. Selanjutnya terdapat koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp156.640.273 dan Transaksi Antar Entitas yang mengurangi ekuitas senilai (Rp1.741.322.889.412), sehingga Ekuitas Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp326.643.087.024.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 (*Audited*) juga mengungkapkan terkait Rekonsiliasi Belanja, Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK, Rekening Pemerintah, Pungutan Ekspor, Monitoring BTM, BDN dan BMMN, serta Capaian, Realisasi, dan Output Program Prioritas Nasional.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CTN	TA 2023		% thd Angg.	TA 2022	Naik (Turun) %
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>					
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	2.207.770.910.000	1.768.114.163.000	80,09	4.728.845.494.966	(62,61)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	412.107.000	1.002.335.017	243,22	6.002.390.714	(83,30)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.208.183.017.000</b>	<b>1.769.116.498.017</b>	<b>80,12</b>	<b>4.734.847.835.680</b>	<b>(62,62)</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>					
Belanja Pegawai	B.2.1	0	0		0	
Belanja Barang	B.2.2	24.643.097.000	22.827.864.696	93,63	20.516.313.119	17,43
Belanja Modal	B.2.3	2.179.493.000	1.991.175.564	91,36	618.000.000	222,20
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>26.822.590.000</b>	<b>24.819.040.260</b>	<b>92,53</b>	<b>21.134.313.119</b>	<b>17,43</b>

## NERACA

**KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CTN	2023	2022	Naik (Turun) %
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	1.970	17.962.000	(99,99)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	4.022.295.001	2.839.530.100	41,65
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	21.105.400	0	0
Piutang Perpajakan	C.5	71.831.317.520	78.776.260.536	(8,82)
Piutang Bukan Pajak	C.6	13.503.699.772	13.804.087.754	(2,18)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.7	(68.532.779.277)	(69.596.205.826)	(1,53)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(13.503.699.772)	(7.693.871.748)	75,51
Persediaan	C.9	1.491.349.940	1.001.611.876	48,89
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>8.833.290.554</b>	<b>19.149.374.692</b>	<b>(53,87)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	C.10	254.604.310.000	256.961.141.000	(0,92)
Peralatan dan Mesin	C.11	62.929.585.584	59.743.548.654	5,33
Gedung dan Bangunan	C.12	77.861.754.949	78.102.756.649	(0,31)
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.13	432.568.000	432.568.000	0
Aset Tetap Lainnya	C.14	0	0	0
Konstruksi dalam pengerjaan	C.15	327.540.264	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(75.608.708.902)	(70.481.118.595)	7,28
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>320.546.849.895</b>	<b>324.758.805.708</b>	<b>(1,30)</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Tagihan TP/TGR	C.17	3.500.000	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.18	(3.500.000)	0	0
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tidak Berwujud	C.19	0	0	0
Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.20	0	0	0
Aset Lain-Lain	C.21	3.220.740.474	889.351.238	262,14
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(1.797.369.869)	(830.506.426)	116,42
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>1.423.370.605</b>	<b>58.844.812</b>	<b>2.318,85</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>330.803.511.054</b>	<b>343.967.025.212</b>	<b>(3,83)</b>

URAIAN	CTN	2023	2022	Naik (Turun) %
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>330.803.511.054</b>	<b>343.967.025.212</b>	<b>(3,83)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	4.160.424.030	2.954.444.317	40,82
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.24			
Pendapatan Diterima di Muka	C.25			
Uang Muka dari KPPN	C.26			
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>4.160.242.030</b>	<b>2.954.444.317</b>	<b>40,82</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>4.160.242.030</b>	<b>2.954.444.317</b>	<b>40,82</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	C.27	326.643.087.024	341.012.580.895	(4,21)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>326.643.087.024</b>	<b>341.012.580.895</b>	<b>(4,21)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>330.803.511.054</b>	<b>343.967.025.212</b>	<b>(3,83)</b>

## III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CTN	2023	2022	Naik (Turun) %
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Perpajakan	D.1.	1.761.200.843.433	4.730.194.341.581	(62,77)
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2.	1.366.116.630	17.548.536.152	(92,16)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.762.566.960.063</b>	<b>4.747.742.877.733</b>	<b>(62,88)</b>
<b>BEBAN</b>				
Beban Pegawai	D.3.	0	0	-
Beban Persediaan	D.4.	1.915.420.221	1.058.648.412	80,93
Beban Barang dan Jasa	D.5.	11.583.859.626	10.725.916.691	8,00
Beban Pemeliharaan	D.6.	4.937.938.323	4.390.475.716	12,47
Beban Perjalanan Dinas	D.7.	5.629.974.992	4.831.684.146	16,52
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8.	195.515.816	5.178.239	479,66
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	6.340.103.095	6.699.794.189	(5,37)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	5.085.523.098	6.867.588.213	(25,95)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>35.688.335.171</b>	<b>34.579.285.608</b>	<b>2,73</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>1.726.878.624.892</b>	<b>4.713.163.592.125</b>	<b>(63,36)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	143.827.844	391.340.181	(63,25)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12.	225.920.068	150.829.843	49,79
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13.	222.600	0	100
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14.	0	0	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(81.869.624)</b>	<b>240.510.338</b>	<b>(134,04)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR</b>		<b>1.726.796.755.268</b>	<b>4.713.404.102.463</b>	<b>(63,36)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa	D.15.	0	0	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>1.726.796.755.268</b>	<b>4.713.404.102.463</b>	<b>(63,36)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CTN	2023	2022	Naik (Turun) %
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	<b>341.012.580.895</b>	<b>336.699.660.225</b>	<b>1,28</b>
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2.	1.726.796.755.268	4.713.404.102.463	(63,36)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	156.640.273	32.556.740	381,13
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1.	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2.	509.822.168	0	100
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3.	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4.	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5.	0	32.961.705	(100)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6.	(353.181.895)	(404.965)	87112,9
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	(1.741.322.889.412)	(4.709.123.738.533)	(63,02)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(14.369.493.871)	4.312.920.670	(433,17)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5.</b>	<b>326.643.087.024</b>	<b>341.012.580.895</b>	<b>(4,12)</b>

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. Dasar Hukum dan Paraturan

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pelaporan atas Pemberian Insentif atau Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN); dan
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan petunjuk Teknis Pencatatan Aset Yang Berasal Dari Barang Yang Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
18. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Taca Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
19. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-28/PB/PB.6/2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga *Unaudited* Tahun 2023;

### A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah agar terciptanya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung industry dan melindungi Masyarakat secara optimal.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur berkedudukan di Jalan Jenderal . Sudirman No.546 Balikpapan, Kalimantan Timur, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, serta diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-198/BC/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020 – 2024.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas- batas negara dan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Visi Direktorat  
Jenderal Bea dan  
Cukai

#### A.2.1. Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 ditetapkan visi Presiden tahun 2020-2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Selain itu, juga terdapat lima arahan utama presiden terkait pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kementerian Keuangan tentunya juga berperan dalam mendukung visi misi Presiden tahun 2020-2024. Visi Kementerian Keuangan yaitu *Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi, yaitu *Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”*.

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di pasar internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan

negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi DJBC merupakan perwujudan visi Kementerian Keuangan yang mendukung visi Presiden.

*Misi Direktorat  
Jenderal Bea dan  
Cukai*

#### **A.2.2. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Dalam rangka pencapaian visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Presiden sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1 (Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan), nomor 2 (Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif), dan nomor 5 (Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi) dengan upaya:

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri
2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal
3. Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Setelah melalui beberapa kali penyempurnaan, pernyataan misi DJBC kini lebih mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan *e-commerce*. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun proses penyempurnaan misi DJBC dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC. Jika ditarik ke Misi Presiden dan Wakil Presiden, terlihat bahwa Misi DJBC mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 3, dan 7.

Visi dan Misi DJBC perlu dipahami oleh setiap insan pegawai Bea Cukai dan menumbuhkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC sehingga mampu menggapai cita-cita tertinggi DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Fungsi Direktorat  
Jenderal Bea dan  
Cukai

#### A.2.3. Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pusat DJBC menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal bea dan cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

Sasaran Direktorat  
Jenderal Bea dan  
Cukai

#### A.2.4. Sasaran Strategis DJBC

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, DJBC menetapkan sasaran strategis yang mencerminkan tujuan Kementerian Keuangan dan fungsi utama DJBC dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Organisasi. Dengan demikian DJBC menetapkan beberapa sasaran strategis, antara lain sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal
3. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
4. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal

- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Selain 6 (enam) sasaran strategis di atas, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, DJBC dapat menetapkan sasaran strategis perantara dan pendukung lain sesuai perubahan lingkungan strategis yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis, telah ditetapkan 3 (tiga) program dan 15 (lima belas) kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu sebagaimana disajikan dalam tabel A.1.

Tabel A.1. Kegiatan di Lingkungan DJBC

No.	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan
1	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
2	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4788	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan
3	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum
4	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4790	Perumusan Kebijakan Administratif
5	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	6207	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
6	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	6208	Perumusan Kebijakan Administratif
7	CE	Program Kebijakan Fiskal	4768	Diplomasi dan Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Internasional
8	CE	Program Kebijakan Fiskal	4769	Komunikasi dan Edukasi
9	CE	Program Kebijakan Fiskal	4770	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan
10	WA	Program Dukungan Manajemen	4694	Legislasi dan Litigasi
11	WA	Program Dukungan Manajemen	4695	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum
12	WA	Program Dukungan Manajemen	4696	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
13	WA	Program Dukungan Manajemen	4697	Pengelolaan Organisasi dan SDM
14	WA	Program Dukungan Manajemen	4698	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
15	WA	Program Dukungan Manajemen	4699	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur berkomitmen dengan visi “ mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur melakukan beberapa Langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian/negara/Lembaga;
- b. Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- c. Menyelenggarakan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merupakan salah satu Satker Vertikal DJBC yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yang telah ditetapkan oleh DJBC, sebagaimana disajikan dalam tabel A.2

Tabel A.2. Kegiatan di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

No.	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan
1	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
2	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum
3	WA	Program Dukungan Manajemen	4695	Pengelolaan Keuangan, BMN dan
3	WA	Program Dukungan Manajemen	4697	Pengelolaan Organisasi dan SDM

Pendekatan  
Penyusunan Laporan  
Keuangan

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Nagian Timur *Unaudited* Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pusat DJBC. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI terdiri atas modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan. Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dihasilkan oleh SAKTI terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pusat DJBC menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan Kantor Pusat DJBC TA 2022 *Audited* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2016, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2019, dan *Government Accounting Standards Republic of Indonesia*.

Dasar Pengukuran

### A.5. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran laporan keuangan Kantor Pusat DJBC menggunakan nilai perolehan historis, sumber daya ekonomi yang digunakan dan mata uang rupiah. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Aset Kantor Pusat DJBC dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing di translasi atau dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2023 Kantor Pusat DJBC telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang telah diadopsi pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-

24/BC/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023 Kantor Pusat DJBC adalah sebagai berikut

#### 1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima, dicatat secara bruto dan disajikan berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### 2. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan atas pendapatan-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. *Pendapatan Perpajakan*

Sesuai dengan paragraf 19 PSAP 12, dinyatakan bahwa pendapatan perpajakan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan/ atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan pendapatan perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan.

Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* yang digunakan adalah hasil rekonsiliasi penerimaan perpajakan. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau saat Badan Peradilan mengeluarkan putusan atas gugatan. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *official assessment* adalah ketetapan yang diterbitkan otoritas perpajakan atau putusan yang diterbitkan Badan Peradilan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Tagihan Pajak (STP), atau Putusan Banding yang mengakibatkan pajak menjadi kurang bayar.

##### b. *Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*

Pendapatan PNBP diakui saat adanya ketetapan atas hak tagih atas PNBP yang muncul, namun belum diterima pembayarannya. Salah satu contoh atas Pendapatan PNBP adalah Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

##### c. *Perlakuan Akuntansi*

Pendapatan-LO dicatat berdasarkan asas bruto dan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan di neraca pada tanggal pelaporan. Seluruh pendapatan-LO di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-30/MK.1/2018 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis Akruai Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 mengikuti kebijakan akuntansi pendapatan-LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan diklasifikasikan berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan diklasifikasikan berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Penjelasan mengenai Aset berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut:

#### a. Aset Lancar

1) Kas terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan. Kas diakui saat adanya penerimaan kas di bendahara dan disajikan dengan nilai nominal. Kas dicatat saat adanya aliran kas yang diterima berupa tunai atau melalui rekening yang dikelola bendahara. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:

a. Pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara, termasuk Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkan Treasury National Pooling (TNP); Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) PendapatanXXXX (sesuai akun pendapatan yang bersangkutan)

b. Pengembalian Belanja Pegawai dan Belanja Barang (non-Persediaan) tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Beban XXXX (sesuai akun belanja bersangkutan)

c. Pengembalian Belanja Barang Persediaan dan Belanja Modal tahun berjalan yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan tanggal neraca belum disetor ke Kas Negara.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Persediaan/Aset yang Belum Diregister

- d. Belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga seperti honor kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterima SPM/SP2Dnya oleh Bendahara Pengeluaran, namun belum diberikan kepada pegawai penerima honor.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

- e. Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara pengeluaran walaupun telah menerapkan TNP.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

- f. Pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

(K) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor (219961)

Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Pajak Dalam Negeri yang dipungut oleh DJBC dan belum disetorkan ke kas negara. Pungutan tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan oleh DJBC karena setorannya akan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor (219963)

- b. Sisa hasil lelang yang bukan merupakan hak pemerintah yang belum diambil oleh pemiliknya.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

- c. Jaminan dalam rangka kepabeanan, yaitu garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean dalam bentuk jaminan tunai. Jaminan tunai ini terkait dengan jaminan yang harus dipertaruhkan oleh importir apabila yang bersangkutan mengajukan keberatan atau banding atas penetapan DJBC.

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

- d. Bunga dan Jasa Giro yang masih ada pada rekening Bendahara Penerimaan walaupun telah menerapkan Treasury National Pooling (TNP).

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)

e. Saldo kas yang tidak teridentifikasi baik di rekening Bendahara Penerimaan maupun di rekening jaminan. Ketentuan ini baru diterapkan pada Laporan Keuangan TA 2015 dimana pada tahun-tahun sebelumnya atas saldo yang tidak teridentifikasi tidak dilakukan penjurnalan dan hanya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terhadap akun tersebut dicatat dengan jurnal:

(D) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

(K) Dana Pihak Ketiga (212192)

2) Piutang terdiri atas Piutang Perpajakan, Piutang PNBPN, Piutang Lainnya, dan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Piutang adalah Penerimaan Negara berupa Penerimaan Perpajakan, PNBPN atau Penerimaan lainnya yang belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dokumen sumber piutang adalah sebagai berikut.

1. Dokumen Cukai:

- a. Dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) dengan fasilitas penundaan pembayaran;
- b. Dokumen pemesanan pita cukai MMEA impor (CK-1A) dengan fasilitas pembayaran berkala;
- c. Pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) dengan fasilitas pembayaran berkala;
- d. Surat tagihan cukai (STCK-1);
- e. Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP);
- f. Surat keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;
- g. Putusan banding Pengadilan Pajak; dan/atau
- h. Putusan peninjauan kembali.

2. Dokumen Impor:

- a. Pemberitahuan pabean impor dengan penundaan pembayaran pungutan negara berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fasilitas pembayaran berkala;
- b. Dokumen pelengkap pabean dengan penundaan pembayaran pungutan Negara (vooruitslag dan rush handling);
- c. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak (SPPBMCP);
- d. Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP);
- e. Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP);
- f. Surat Penetapan Pabean (SPP);
- g. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
- h. Surat keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;
- i. Putusan banding Pengadilan Pajak; dan/atau

- j. Putusan peninjauan Kembali.
- 3. Dokumen Ekspor:
  - a. Pemberitahuan pabean ekspor dengan mendapatkan penundaan pembayaran pungutan negara;
  - b. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
  - c. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK);
  - d. Surat keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;
  - e. Putusan banding Pengadilan Pajak; dan/atau
  - f. Putusan peninjauan kembali.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11. Selain Piutang perpajakan, Di DJBC ada juga piutang PNBK. Sama halnya dengan Piutang Perpajakan, Piutang PNBK disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penetapan perhitungan kualitas piutang dan penyisihan atas piutang tak tertagih sesuai dengan PMK.69/PMK.06/2014 dengan perubahan terakhir pada PMK 207/PMK.06/2019 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih adalah ditetapkan sebagaimana tabel A.2

**Tabel A. 2 Perhitungan Penyisihan Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5% dari piutang dengan kualitas lancar
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- 3) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sejak Tahun Anggaran 2021 Pemerintah menggunakan metode persediaan *First In First Out* (FIFO), dimana Harga Perolehan Terakhir (HPT) persediaan pada tahun 2020, yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan saldo akhir persediaan tahun 2020, menjadi harga perolehan pertama pada tahun 2021 dengan metode FIFO. Nilai persediaan berasal dari:
  - a. harga pembelian, apabila diperoleh dengan pembelian;

- b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya (dalam hal membentuk barang secara utuh, maka tetap dicatat dalam Laporan BMN sebagai Aset Tetap Ekstrakomptabel) kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum masa manfaat Aset Tetap sebagaimana disajikan tabel A.3

**Tabel A. 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Piutang Jangka Panjang dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

**e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya berasal dari aset tak berwujud dan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan.

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table Penggolongan masa manfaat adalah sebagaimana tabel A.4.

**Tabel A. 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**6. Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung

## 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

*Kebijakan atas  
Pelaksanaan  
Program Penanganan  
Pandemi COVID-19*

### A.7. Kebijakan Atas Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)

Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19 telah menjadi pandemi global sejak ditetapkan World Health Organization pada tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini termasuk di Indonesia. Dilansir dari covid19.go.id, jumlah kasus positif COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 6.088.460 orang dengan korban jiwa sebanyak 156.737 orang. Angka ini menunjukkan bahwa kasus Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar dan sangat membahayakan dari segi kesehatan. Tingginya penyebaran kasus juga berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat dari sebelumnya seluruh aktivitas dan interaksi lebih banyak dilakukan secara fisik mulai beralih menjadi aktivitas secara daring. Dari sisi perekonomian, pandemi COVID-19 mengakibatkan perlambatan pertumbuhan PDB, terutama pada triwulan II 2020 yang mencapai angka (5,32) persen. Namun situasi perekonomian yang cukup negatif telah berangsur pulih dan membaik pada periode-periode berikutnya. Perlambatan perekonomian berdampak pada menurunnya konsumsi dan peningkatan angka pengangguran. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut yang tepat dari pemerintah guna percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) sehingga masyarakat dapat kembali hidup dan beraktivitas dengan normal. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam pelaksanaan PC PEN adalah kebijakan berupa insentif fiskal, termasuk diantaranya insentif fiskal kepabeanan.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satker pada institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepabeanan telah berinisiatif untuk memberikan insentif dalam rangka PC-PEN, adapun beberapa jenis insentif fiskal kepabeanan yang diberikan kepada masyarakat adalah:

- A. Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015.
- B. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015.
- C. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007.
- D. Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Contoh sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.05/1997.

Pemberian insentif fiskal pada industri diharapkan mampu menjadi katalis untuk meningkatkan volume investasi yang dilakukan oleh industri. Peningkatan investasi ini pada akhirnya akan meningkatkan serapan tenaga kerja, konsumsi terhadap jasa dan juga barang-barang di wilayah sekitar industri, serta penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan badan usaha dan PPN sehingga mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk pemberian insentif BMDTP Unaudited Tahun 2023, saat ini belum ada keputusan untuk diberikan dan sampai saat ini belum ada penetapan anggaran BMDTP di Kemenperin. Namun demikian jika insentif fiskal tersebut tetap akan diberikan pada

Unaudited Tahun 2023, dapat dipertimbangkan agar pemilihan sektor industri lebih selektif misalnya diberikan kepada UMKM.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 ditetapkan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-015.05.1.411724/2023 tanggal 30 November 2022.

Realisasi Pendapatan  
Rp.1.769.116.498.017

**B.1. PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.769.116.498.017 atau 80,12 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.2.208.183.026.000. Realisasi pendapatan *Unaudited* Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.2.965.731.337.663) atau (62,64) persen dibandingkan Tahun 2022. Pada tabel B.1, menunjukkan Pendapatan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel B. 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi			Realisasi TA 2022	Naik (Turun) %
	Anggaran	TA 2023	%		
Penerimaan Perpajakan	2.207.770.910.000	1.768.114.163.000	80,09	4.728.845.494.966	(62,61)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	412.107.000	1.002.335.017	243,22	6.002.340.714	(83,30)
<b>Jumlah</b>	<b>2.208.183.017.000</b>	<b>1.769.116.498.017</b>	<b>80,12</b>	<b>4.734.847.835.680</b>	<b>(62,64)</b>

Pendapatan  
Perpajakan  
Rp.1.768.114.163.000

**B.1.1. Pendapatan Perpajakan**

Realisasi Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.768.114.163.000 dan Rp.4.728.845.494.966 Pada tabel B.2, Pendapatan Bea Masuk *Unaudited* Tahun 2023 berupa Pendapatan Pabean Lainnya

Tabel B. 2 Perbandingan Pendapatan Perpajakan TA 2023 dan 2022

Akun	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	4.275.114.000	1.234.140.000	246,40
411514	Pendapatan Denda Adm. Cukai	2.922.002.000	308.015.000	848,66
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	6.393.000	2.088.000	206,18
<b>4115</b>	<b>Pendapatan Cukaik</b>	<b>7.203.509.000</b>	<b>1.544.243.000</b>	<b>366,48</b>
412111	Pendapatan Bea Masuk	1.130.953.548.000	1.306.163.003.581	(13,38)
412113	Pendapatan Denda Adm. Pabean	7.817.018.000	8.344.894.206	(6,33)
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	3.808.000	4.670.000	(18,46)
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping	515.853.000	2.484.144.000	(79,23)
412123	Pendapatan Bea masuk Tindakan Pengamanan	579.046.000	751.875.000	(22,99)
<b>4121</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>	<b>1.139.869.273.000</b>	<b>1.317.748.586.787</b>	<b>(13,50)</b>
<b>4122</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>	<b>621.041.381.000</b>	<b>3.408.657.826.179</b>	<b>(81,78)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.768.114.163.000</b>	<b>4.728.845.494.966</b>	<b>(62,61)</b>

Pendapatan Negara  
bukan Perpajakan  
Rp.1.002.335.017

**B.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.002.335.017 dan Rp.6.002.340.714 Tabel B.3 menunjukkan Realisasi PNBP *Unaudited* Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.5.000.005.697 atau 83,30 persen dari Tahun 2022.

Tabel B. 3 Perbandingan Pendapatan PNBP TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-	
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.500.000	-	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	142.327.844	391.340.181	(63,63)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	152.807.782	-	
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa	-	-	
Pendapatan Denda Lainnya	687.464.791	5.302.018.238	(87,03)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	18.012.000	308.982.250	(94,17)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	222.600	-	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	
<b>Total PNBP (Bruto)</b>	<b>1.002.335.017</b>	<b>6.002.340.714</b>	<b>(83,30)</b>
Pengembalian	-	-	
<b>Jumlah (Netto)</b>	<b>1.002.335.017</b>	<b>6.002.340.714</b>	<b>(83,30)</b>

Realisasi Belanja  
Rp.24.819.040.260

## B.2. BELANJA

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.24.819.040.260 atau 92,53 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.26.822.590.000. Tabel B.4 menunjukkan realisasi tertinggi secara persentase terhadap anggaran adalah Belanja Barang dengan capaian 92,63 persen, belanja Modal 91,36 persen serta belanja pegawai dengan capaian 0,00 persen

Tabel B. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Naik (Turun) %
		TA 2023	% Real Angg.	
Belanja Pegawai	0	0		0
Belanja Barang	24.643.097.000	22.827.864.696	92,63	20.516.313.119
Belanja Modal	2.179.493.000	1.991.175.564	91,36	618.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>26.822.590.000</b>	<b>24.819.040.260</b>	<b>92,53</b>	<b>21.134.313.119</b>

Tabel B.4 menunjukkan realisasi belanja Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 17,43 persen. Kenaikan yang signifikan, ini disebabkan adanya belanja modal untuk Belanja Pegawai adanya sentralisasi pembayaran gaji induk pegawai DJBC di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang dimulai dari Bulan Agustus 2022 sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk pembayaran komponen uang makan dan uang lembur masih dilakukan secara sentralisasi di Kantor Pusat DJBC untuk seluruh satuan kerja DJBC

Realisasi Belanja  
Pegawai Rp.0,00

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada Tahun 2022 telah dilakukan sentralisasi secara menyeluruh atas pembayaran gaji induk seluruh pegawai DJBC di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang dimulai dari Bulan Agustus sesuai dengan sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk pembayaran komponen uang makan dan uang lembur masih dilakukan secara sentralisasi di Kantor Pusat DJBC untuk seluruh satuan kerja DJBC. Rincian atas Belanja Pegawai adalah sebagaimana disajikan pada tabel B.5

Tabel B. 5 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
<b>Total Belanja Pegawai (Bruto)</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja (Netto)</b>	-	-	-

Realisasi Belanja  
Barang  
Rp.22.827.864.696

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22.827.864.696 dan Rp. 20.516.313.119. Realisasi Belanja Barang *Unaudited* Tahun 2023 mengalami kenaikan 11,27 persen dari Tahun 2022. Nilai Belanja Barang terbesar bersumber dari Belanja Barang Persediaan dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Rincian atas Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana disajikan pada tabel B.6.

Tabel B. 6 Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

Akun	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5.878.970.123	5.227.223.831	12,47
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	108.114.000	96.720.800	11,78
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	202.651.884	156.251.333	29,70
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33.498.945	34.204.460	(2,06)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	690.590.000	687.396.000	0,46

521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	746.013.019	689.058.715	8,27
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	989.200	51.738.671	(98,09)
521211	Belanja Bahan	257.520.395	243.330.815	5,83
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	644.062.000	614.198.550	4,86
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	296.803.149	217.983.816	36,16
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	188.947.695	141.277.815	33,74
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.009.503	(100,00)
522111	Belanja Langganan Listrik	1.458.320.187	1.291.475.294	12,92
522112	Belanja Langganan Telepon	135.007.896	204.412.479	(33,95)
522113	Belanja Langganan Air	131.584.405	129.468.926	1,63
522141	Belanja Sewa	1.226.333.206	1.172.103.053	4,63
522151	Belanja Jasa Profesi	10.300.000	1.800.000	472,22
522191	Belanja Jasa Lainnya	60.315.300	127.541.095	(52,71)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	11.849.000	(100,00)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.477.961.461	1.369.885.156	7,89
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112.798.710	82.883.346	36,09
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.270.151.478	2.895.126.866	12,95
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	26.341.200	23.748.425	10,92
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	189.897.912	180.223.738	5,37
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	53.237.885	33.717.286	57,89
524111	Belanja Perjalanan Biasa	3.401.819.203	3.274.743.068	3,88
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.232.671.000	1.557.218.000	43,38
	<b>Total Belanja Barang (kotor)</b>	<b>22.834.900.253</b>	<b>20.516.590.041</b>	<b>11,30</b>
522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	(2.520.346)	0	-
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	(4.515.211)	(276.922)	-
	<b>Jumlah Belanja (Netto)</b>	<b>22.827.864.696</b>	<b>20.516.313.119</b>	<b>11,27</b>

Dari total Belanja Barang *Unaudited* Tahun 2023, masih terdapat sebagian realisasi Belanja Barang yang menggunakan Akun Belanja Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Rincian atas penggunaan Akun Belanja COVID adalah sebagaimana disajikan pada tabel B.7. Realisasi atas Belanja Akun COVID antara lain digunakan untuk biaya karantina/isolasi mandiri, biaya komunikasi, pembelian alat uji medis/ *Rapid Test*, penyemprotan disinfektan, pembelian masker, *hand sanitizer* dan APD, dan lain-lain.

Tabel B. 7 Rincian Realisasi Akun Belanja COVID-19

Akun	Uraian	Realisasi		Naik (Turun) %
		TA 2023	TA 2022	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	989.200	51.738.671	(98,09)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.009.503	(100)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	11.489.000	(100)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>989;200</b>	<b>64.597.174</b>	<b>(98.47)</b>

Realisasi Belanja Modal  
Rp.1.991.175.564

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.991.175.564 dan Rp.618.000.000 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp.904.645.200. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal pada Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel B.8.

Tabel B. 8 Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	942.300.000	618.000.000	52,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.232.185.464	0	100
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	721.335.300	0	100
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
<b>Total Belanja Modal (kotor)</b>	<b>2.895.820.764</b>	<b>618.000.000</b>	<b>368,58</b>
Pengembalian Belanja Modal	(904.645.200)	0	100
<b>Jumlah Belanja (Netto)</b>	<b>1.991.175.564</b>	<b>618.000.000</b>	<b>222,20</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp.0,00

#### B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00. Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Tanah Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel B.9.

Tabel B. 9 Perbandingan Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
<b>Total Belanja Modal (kotor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
<b>Jumlah Belanja (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.942.300.000

#### B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.942.300.000 dan Rp.618.000.000. Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel B.10.

Tabel B. 10 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	942.300.000	618.000.000	52,48
<b>Total Belanja Modal (kotor)</b>	<b>942.300.000</b>	<b>618.000.000</b>	<b>52,48</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
<b>Jumlah Belanja (Netto)</b>	<b>942.300.000</b>	<b>618.000.000</b>	<b>52,48</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.1.048.875.564

#### B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.048.875.564 dan Rp.0,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel B.11.

Tabel B. 11 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.232.185.464	0	100
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	721.335.300	0	100
<b>Total Belanja Modal (kotor)</b>	<b>1.953.520.764</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Pengembalian Belanja Modal	(904.645.200)	0	100
<b>Jumlah Belanja (Netto)</b>	<b>1.048.875.564</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0,00

#### B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel B.12.

Tabel B. 12 Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
<b>Total Belanja Modal (kotor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
<b>Jumlah Belanja (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp.0,00

#### B.2.3.4. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel B.13.

Tabel B. 13 Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
<b>Total Belanja Modal (kotor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
<b>Jumlah Belanja (Netto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing Satker sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 dimana atas sisa UP dan TUP Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah disetorkan ke Kas Negara sebelum 31 Desember 2023, sebagaimana tersaji pada tabel C.1

Tabel C. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Saldo UP	-	-	-
Kuitansi UP Belum SPI	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,00

Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp.1.970

### C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Bendahara Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tidak memiliki rekening di bank. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.1.970 dan Rp.17.962.000. Adapun perbandingan rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel C.2.

Tabel C. 2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Uang Tunai	-	-	-
Bank	1.970	17.962.000	(99,99)
<b>Jumlah</b>	<b>1.970</b>	<b>17.962.000</b>	<b>(99,99)</b>

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp.4.022.295.001

### C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bukan merupakan hak DJBC dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan DJBC, kas lainnya, dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.4.022.295.001 dan Rp.2.839.530.100 yang seluruhnya merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Adapun rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada tabel C.3.

Tabel C. 3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	-
Kas lainnya di Bendahara Penerimaan	4.022.295.001	2.839.530.200	41,65
<b>Jumlah</b>	<b>4.022.295.001</b>	<b>2.839.530.200</b>	<b>41,65</b>

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Tingkat UAPPA-W Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00. Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kantor Pusat DJBC, saldo yang terdapat pemegang kas Satuan Kerja DJBC, Premi pada Kantor Pusat DJBC serta LS Bendahara berupa Belanja Barang yang belum disetor kepada Pihak Ketiga. Adapun rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel C.4

Tabel C. 4 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

Uraian	30 Jun 2023
Premi	-
DOKPPN	-
LS Bendahara	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bukan merupakan hak Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan Satker di Lingkungan Wilayah Kerja Kanwil DJBC Kalbagtim dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.4.022.295.001 dan Rp.2.839.530.200. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Tingkat Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per tanggal 31 Desember 2023 merupakan Dana titipan Jaminan Tunai atas Impor Sementara sebesar Rp.4.022.285.200 dan Pendapatan Lain-lain (Jasa Giro) sebesar Rp.9.801.00. Adapun rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel C.5

Tabel C. 5 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada Satker

Satker	Jaminan Tunai	
	Impor Sementara	Lain-lain
KPPBC TMP B Balikpapan	4.022.285.200	1
KPPBC TMP C Sangata	0	9.800
<b>Jumlah</b>	<b>4.022.285.200</b>	<b>9.801</b>

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)  
Rp.21.105.400

#### C.4. Belanja Dibayar Di Muka ( Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.21.105.400 dan Rp.0,00 yang tersaji sebagaimana tabel C.6

Tabel C. 6 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2023 dan 2022

JENIS	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	21.105.400	0
Belanja Modal yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>21.105.400</b>	<b>0</b>

Saldo Belanja Barang yang Dibayar di Muka terdiri dari kegiatan belanja barang berupa sewa tanah, sewa gedung dan sewa kendaraan. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 terdapat pada 13 (tiga belas) satuan kerja DJBC. Adapun Rincian Belanja Barang Dibayar di Muka atas sewa pada masing-masing satker disajikan pada tabel C.7

Tabel C. 7 Nilai Kontrak Belanja barang yang Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022

Nama Satker	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	Aset / Objek Belanja
KPPBC Balikpapan	21.105.400	Sewa Kendaraan
<b>Total</b>	<b>21.105.400</b>	

#### C.4. Piutang Perpajakan

Outstanding Piutang Perpajakan  
Rp.71.831.317.519

##### C.4.1. Outstanding Piutang Perpajakan

Saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp71.831.317.519 dan Rp78.776.260.535, mengalami Penurunan sebesar (Rp.6.944.943.017) atau sebesar (8,82) persen. Perubahan saldo outstanding Piutang Perpajakan dalam tiga tahun terakhir disajikan pada tabel C.8

Tabel C. 8 Perubahan Saldo Outstanding Piutang Perpajakan Per 31 Desember 2023

TAHUN	JUMLAH	PERUBAHAN	%
2020 (Audited)	78.406.677.454	0	-
2021 (Audited)	70.634.916.643	(7.771.760.810)	(9,91)
2022 (Audited)	78.776.260.533	8.141.343.892	11,53
2023 (Unaudited)	71.831.317.519	(6.944.943.017)	(8,82)

Tren saldo outstanding Piutang Perpajakan dari tahun 2020 s.d 2022 selalu mengalami Kenaikan.Tahun 2023 mengalami Penurunan. Kenaikan Piutang Tahun 2020 s.d 2022 dipengaruhi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.04/2021. Pada pasal 31 dijelaskan ketentuan jatuh tempo penundaan untuk tahun 2017 s.d. 2021.

Tahun 2023 saldo piutang turun sebesar (Rp.6.944.943.017) atau sebesar (8,82) persen. Pada tahun 2022 terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2022 yang mengatur kelonggaran penundaan cukai s.d 90 hari.

**C.4.2. Mutasi Piutang Perpajakan (Dokumen)**

Tabel C. 9 Mutasi Piutang Perpajakan Per 31 Desember 2023

Transaksi	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Saldo Awal	78.776.260.535	70.634.916.643
Koreksi Saldo Awal	(23.128.060)	5.002.819.277
Piutang Terbit	<b>2.078.278.090.456</b>	<b>450.376.926.000,00</b>
PIB Berkala	0	0
PIBK PJT	0	0
Vooruitslag	0	0
Rush Handling	0	0
SPTNP	7.618.349.784	11.932.009.000
SPKTNP	47.780.383.262	32.736.583.000
SPP	6.861.172.000	4.231.321.000
SPSA	927.290.000	2.045.031.000
KEP Keberatan Impor	508.000	1.394.925.000
PEB	0	0
Putusan Banding Cukai	0	0
SPPBK	1.849.965.909.000	318.857.900.000
SPKPBK	659.958.000	5.453.000
KEP Keberatan Ekspor	0	0
CK-1	0	0
CK-1A	0	0
CK-1C	0	0
STCK-1	324.652.480	617.615.000
SPPBP	1.593.000	2.088.000
Putusan PK Cukai		0
SPPBMCP		78.554.001.000
Putusan Banding Ekspor		0
Putusan Banding Impor		0
Putusan PK Impor		0
Putusan PK Ekspor		0
KEP Keberatan Cukai		0
Mutasi	(2.085.199.905.412)	(447.238.401.385)
SKEP Keberatan	0	(1.568.096.000)
Putusan Badan Peradilan	0	0
SKEP Penundaan	0	0
Surat Teguran	519.000	12.000
Surat Peringatan	0	0
Surat Paksa	0	0
SP3DRI	0	0
STCK 1	0	0
STCK-2	4.800.000	0
CK-2 (Kompensasi)	0	0
CK-3 (Kompensasi)	0	0
Kompensasi PPN	0	0
SPKPC	0	0
Pembayaran/Pelunasan Piutang Terbit periode pelaporan	(231.832.708.795)	(440.494.584.000)
Pembayaran/Pelunasan Piutang Terbit periode sebelumnya	(9.960.778.228)	(4.712.676.385)
Pembatalan	(1.843.411.671.389)	(420.393.000)
Tanda Terima Pengembalian Barang untuk impor melalui penyelenggara pos yang ditunjuk	(66.000)	(42.664.000)
SKEP Pembebasan Bea Masuk	0	0
Putusan PK	0	0
<b>Saldo Akhir (Saldo awal+koreksi+terbit+mutasi)</b>	<b>71.831.317.519</b>	<b>78.776.260.535</b>

Mutasi piutang selama Tahun 2023 terdiri dari saldo awal TA 2023 (Audited) sebesar Rp78.776.260.535 koreksi saldo awal sebesar Rp.23.128.060, Piutang terbit selama tahun 2023 sebesar Rp2.078.278.090.456 dan mutasi kurang selama tahun 2023 sebesar (Rp.2.085.199.905.412), sehingga terbentuk saldo akhir sebesar Rp.71.831.317.519

Penghapusan  
Rp.1.843.411.671.389

#### C.4.3. Penghapusan

Berdasarkan tabel diatas terdapat mutasi piutang dengan status pembatalan sebesar Rp.1.843.411.671.389. Saldo tersebut terdiri dari pembatalan atas dokumen tahun berjalan sebesar Rp.1.843.403.176.000, penghapusan piutang sebesar Rp.8.495.389 dan penyelesaian piutang dengan mekanisme Crash Program sebesar Rp.0,00. Penghapusan Piutang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175/KMK.04/2023 sebesar Rp8.495.389, yang tersebar pada 1 satuan kerja. Keseluruhan saldo tersebut berstatus piutang macet (penyisihan 100%) dan telah dilimpahkan ke KPKNL.

Adapun rincian Piutang Perpajakan yang dihapus selama tahun 2023 menurut akun piutang dan satuan kerja disajikan pada tabel C.10

Tabel C.10. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
Per 31 Desember 2023

NAMA SATKER	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai MMEA	Pabean Lain	Cukai HT	Cukai Lain	Denda Pabeam	Denda Bea Keluar	Denda Cukai	Total
KANWIL DJBC KALBAGTIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC BALIKPAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TARAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC NUNUKAN	-	-	-	321.717	-	-	8.173.672	-	-	8.495.389
KPPBC BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC SANGATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	321.717	-	-	8.173.672	-	-	8.495.389

Crash Program  
Rp.0,00

#### C.4.4. Crash Program

Pada Tahun 2023 juga terdapat Penyelesaian Piutang dengan Mekanisme Crash Program sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program (PMK Crash Program) Tahun 2023. Penyelesaian piutang tersebut merupakan programnya DJKN untuk memberikan keringanan penanggung utang dalam menyelesaikan Piutang Negara khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan piutang berupa kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana, serta piutang instansi pemerintah.

Sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah satker yang terdapat pengajuan Crash Program ada 0 Satuan Kerja dengan total penghapusan atas crash program sebesar Rp.0,00 dengan rincian disajikan pada tabel C.11

Tabel C.11. Penyelesaian Piutang Pajak Melalui Mekanisme Crash Program  
Per. 31 Desember 2023

NAMA SATKER	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai MMEA	Pabean Lain	Cukai HT	Cukai Lain	Denda Pabeam	Denda Bea Keluar	Denda Cukai	Total
KANWIL DJBC KALBAGTIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC BALIKPAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TARAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC NUNUKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC BONTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC SANGATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Daftar Piutang  
Berdasarkan Akun  
Rp.24.167.248.191

**C.4.5. Daftar Piutang Berdasarkan Akun**

Piutang Pendapatan Pabean Lainnya menyumbang kontribusi terbesar yakni sebesar Rp24.167.248.191 atau 33,64 persen dari total piutang. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Piutang Pendapatan Pabean Lainnya mencatat Penurunan sebesar (Rp419.620). Adapun rincian saldo piutang berdasarkan akun dapat dilihat sebagaimana tabel C.12

Tabel C.12. PIUTANG PAJAK PER AKUN  
Per 31 Desember 2023

Uraian	2022 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan (2022-2023)
PPh Pasal 22	0	0	0
PPh Pasal 22 Impor	326.182.000	453.648.075	127.466.075
PPN Dalam Negeri	0	0	0
PPN Impor	848.437.000	261.659.586	(586.777.414)
PPnBM Impor	0	0	0
Cukai Hasil Tembakau	48.000.000	0	(48.000.000)
Cukai Etil Alkohol	0	0	0
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.610.445.000	2.610.445.000	0
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	192.000.000	0	(192.000.000)
Pendapatan Cukai Lainnya	0	0	0
Bunga Penagihan Pph	0	0	0
Bunga Penagihan PPN	0	0	0
Bea masuk	18.445.288.745	12.995.314.745	(5.449.974.000)
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	11.155.441.867	11.098.291.038	(57.150.829)
Pendapatan Pabean Lainnya	24.167.667.811	24.167.248.191	(419.620)
Pajak/Pungutan Ekspor	15.156.406.067	14.418.318.838	(738.087.228)
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	5.826.392.046	5.826.392.045	0
Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	0	0
Bea Masuk Antidumping	0	0	0
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>78.776.260.535</b>	<b>71.831.317.519</b>	<b>(6.944.943.017)</b>

Daftar Piutang  
Berdasarkan Kualitas  
Rp.71.831.317.519

**C.4.5. Daftar Piutang Berdasarkan Kualitas**

Kualitas piutang perpajakan sebesar Rp 71.831.317.519 terdiri dari lancar Rp3.042.724.661, kurang lancar Rp.0,00, diragukan Rp.0,00, dan macet Rp.68.788.592.858. Kualitas Piutang dengan kategori lancar paling besar atas akun Piutang Bea Masuk dengan nilai sebesar Rp.2.273.735.000.

Sedangkan Kualitas Piutang dengan kategori macet paling besar atas akun Piutang Pendapatan Pabean Lainnya dengan nilai sebesar Rp 24.167.248.191.

Adapun rincian daftar piutang menurut kategori kualitas piutang tersebut disajikan sebagaimana table. C.13

Tabel C.13. PIUTANG PAJAK PER KUALITAS  
Per 31 Desember 2023

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Piutang Bea Masuk	2.273.735.000	-	-	10.721.579.745	12.995.314.745
Piutang Bea Masuk Anti Dumping	-	-	-	-	-
Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	46.200.000	-	-	11.052.091.038	11.098.291.038
Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	-	-	-	24.167.248.191	24.167.248.191
Piutang Pungutan ekspor	7.482.000	-	-	14.410.836.838	14.418.318.838
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	-	-	-	5.826.392.045	5.826.392.045
Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	-	-	-	-	-

Piutang Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-
Piutang Cukai Ethyl Alkohol	-	-	-	-	-
Piutang Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	-	-	-	2.610.445.000	2.610.445.000
Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan Cukai lainnya	-	-	-	-	-
Piutang PPh Pasal 22 Impor	453.648.075	-	-	-	453.648.075
Piutang PPnBM Impor	-	-	-	-	-
Piutang PPN DN	-	-	-	-	-
Piutang PPN Impor	261.659.586	-	-	-	261.659.586
Piutang Bunga Penagihan Pph	-	-	-	-	-
Piutang Bunga Penagihan PPN	-	-	-	-	-
	<b>3.042.724.661</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.788.592.858</b>	<b>71.831.317.519</b>

Daftar Piutang  
Berdasarkan Umur  
Rp.71.831.317.519

#### C.5.7. Daftar Piutang Berdasarkan Umur

Umur piutang perpajakan sebesar Rp.71.831.317.519 terdiri dari kurang dari 1 tahun Rp.3.042.724.661, 1 tahun s.d 2 tahun Rp, 2 tahun s.d 3 tahun Rp, dan lebih dari 3 tahun Rp.68.788.592.858.

Adapun rincian daftar piutang menurut kategori umur piutang tersebut disajikan sebagaimana table C.14

**Tabel C.14. PIUTANG PAJAK BERDASARKAN UMUR**  
Per 31 Desember 2023

Kualitas	Piutang Kepabeanaan	Piutang Cukai	Piutang PDRI	Jumlah
<b>0 s.d. 1 Thn</b>	<b>2.327.417.000</b>	-	<b>715.307.661</b>	<b>3.042.724.661</b>
Dilimpahkan Ke KPKNL (BD.6)	-	-	-	-
WP tidak ditemukan (BD.7)	-	-	-	-
WP Pailit (BD.8)	-	-	-	-
Jaminan Tunai (KK B1.6)	-	-	-	-
Jaminan Bank (KK B1.6)	-	-	-	-
Lainnya	<b>2.327.417.000</b>	-	<b>715.307.661</b>	<b>3.042.724.661</b>
<b>1 s.d. 2 Thn</b>	-	-	-	-
Dilimpahkan Ke KPKNL (BD.6)	-	-	-	-
WP tidak ditemukan (BD.7)	-	-	-	-
WP Pailit (BD.8)	-	-	-	-
Jaminan Tunai (KK B1.6)	-	-	-	-
Jaminan Bank (KK B1.6)	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
<b>2 s.d. 3 Thn</b>	-	-	-	-
Dilimpahkan Ke KPKNL (BD.6)	-	-	-	-
WP tidak ditemukan (BD.7)	-	-	-	-
WP Pailit (BD.8)	-	-	-	-
Jaminan Tunai (KK B1.6)	-	-	-	-
Jaminan Bank (KK B1.6)	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
<b>&gt; 3 Tahun</b>	<b>66.178.147.858</b>	<b>2.610.445.000</b>	-	<b>68.788.592.858</b>
Dilimpahkan Ke KPKNL (BD.6)	<b>20.237.228.884</b>	-	-	<b>20.237.228.884</b>
WP tidak ditemukan (BD.7)	-	-	-	-

WP Pailit (BD.8)	7.705.000.283	-	-	7.705.000.283
Jaminan Tunai (KK B1.6)	-	-	-	-
Jaminan Bank (KK B1.6)	-	-	-	-
Lainnya	38.235.918.691	2.610.445.000	-	40.846.363.691
<b>Total</b>	<b>68.505.564.858</b>	<b>2.610.445.000</b>	<b>715.307.661</b>	<b>71.831.317.519</b>

Pelimpahan Piutang  
(SP3N)  
Rp.20.237.228.884

#### C.5.8. Pelimpahan Piutang (SP3N)

Terdapa saldo piutang perpajakan yang pengurusannya telah dilimpahkan ke KPKNL sebesar Rp20.237.228.884. Saldo tersebut terdiri dari 4 golongan piutang dengan status kurang dari 1 tahun, 1 tahun s.d 2 tahun, 2 tahun s.d 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Atas saldo tersebut kemudian dilakukan rekonsiliasi data dengan DJKN sesuai SE-1/KN/2018 tentang mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan piutang negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada DJKN/PUPN. Hasil dari rekonsiliasi dadapat bahwa masih terdapat selisih/perbedaan data dengan DJKN pada beberapa satuan kerja. Rincian piutang yang dilimpahkan tersebut sebagaimana table C.15

Tabel C.15. PELIMPAHAN PIUTANG PAJAK  
Per 31 Desember 2023

Satuan Kerja DJBC	Saldo DJBC
KPPBC Balikpapan	3.957.763.552
KPPBC Samarinda	16.279.465.332
<b>Total DJBC</b>	<b>20.237.228.884</b>

Jaminan Tunai Rp.0,00

#### C.5.9. Jaminan Tunai

Pada Tabel Piutang Berdasarkan Umur terdapat saldo piutang perpajakan yang memiliki jaminan tunai sebesar Rp.0,00 dan jaminan bank sebesar Rp.0,00  
Jaminan Tunai tersebut terdiri dari Piutang Kepabeanaan sebesar Rp.0,00, Piutang Cukai sebesar Rp.0,00 dan Piutang PDRI sebesar Rp.0,00, sebagaimana table C.16

Tabel. C.16 JAMINAN TUNAI PER SATKER

NAMA SATKER	Piutang Kepabeanaan	Piutang Cukai	Piutang PDRI	Total
KANWIL KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	-	-	-	-
KPPBC BALIKPAPAN	-	-	-	-
KPPBC SAMARINDA	-	-	-	-
KPPBC TARAKAN	-	-	-	-
KPPBC NUNUKAN	-	-	-	-
KPPBC BONTANG	-	-	-	-
KPPBC SANGATA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel. C.17. JAMINAN TUNAI PER DOKUMEN  
Per 31 Desember 2023

Dokumen	Jumlah Dokumen	Total
SPSA	-	-
SPTNP	-	-
STCK-1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Jaminan Bank Rp.0,00

#### C.5.10. Jaminan Bank

Jaminan Bank sebesar Rp.0,00 terdiri dari Piutang Kepabeanaan sebesar Rp. 0,00, Piutang Cukai sebesar Rp.0,00, Piutang PDRI sebesar Rp.0,00, sebagaimana pada table C.15 dan table C.18.

Tabel C.18. JAMINAN BANK PER SATKER  
Per 31 Desember 2023

NAMA SATKER	Piutang Kepabeanaan	Piutang Cukai	Piutang PDRI	Total
KANWIL KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	-	-	-	-
KPPBC BALIKPAPAN	-	-	-	-
KPPBC SAMARINDA	-	-	-	-
KPPBC TARAKAN	-	-	-	-
KPPBC NUNUKAN	-	-	-	-
KPPBC BONTANG	-	-	-	-
KPPBC SANGATA	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Tabel C.19. JAMINAN BANK PER DOKUMEN  
Per 31 Desember 2023

Dokumen	Jumlah Dokumen	Total
KEP Keberatan Cukai	-	-
KEP Keberatan Impor	-	-
SPKTNP	-	-
SPSA	-	-
SPPBK	-	-
SPTNP	-	-
SPP	-	-
Jumlah	-	-

**C.5.11. Penetapan DJBC Yang Sedang dalam Tahap Proses Upaya Hukum**

Tabel C.20. KEBERATAN Per 31 Desember 2023

Proses Hukum	Jumlah Dokumen	Nilai
Keberatan	-	-
Banding	-	-
Jumlah	-	-

Pada tabel C.17 tersebut total Penetapan DJBC Yang Sedang Dalam Tahap Proses Upaya Hukum adalah sebesar Rp.0,00 dengan jumlah dokumen sebanyak 0.

Dokumen penetapan terbanyak yang sedang dalam tahap upaya hukum berasal dari upaya Keberatan yaitu sebesar 0 dokumen. Adapun Upaya Hukum Keberatan dan Banding disajikan per satker sebagaimana tabel C.21 dan C.22

Tabel C.21. Rincian Keberatan disajikan per Satuan Kerja  
Per 31 Desember 2023

NAMA SATKER	Piutang Kepabeanaan	Piutang Cukai	Piutang PDRI	Total
KANWIL KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	-	-	-	-
KPPBC BALIKPAPAN	-	-	-	-
KPPBC SAMARINDA	-	-	-	-
KPPBC TARAKAN	-	-	-	-
KPPBC NUNUKAN	-	-	-	-
KPPBC BONTANG	-	-	-	-
KPPBC SANGATA	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Tabel C.22. Keberatan Per Dokumen  
Per 31 Desember 2023

Dokumen	Jumlah Dokumen	Total
KEP Keberatan Impor	0	-
KEP Keberatan Ekspor	0	-
KEP Keberatan Cukai	0	-
SPKPBM	0	-
SPKPBK	0	-
SPP	0	-

SPPBK	0	-
SPSA	0	-
SPKTNP	0	-
SPTNP	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Tabel C.23. Rincian Banding disajikan per Satuan Kerja

Per 31 Desember 2023

NAMA SATKER	Piutang Kepabeanaan	Piutang Cukai	Piutang PDRI	Total
KANWIL KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	-	-	-	-
KPPBC BALIKPAPAN	-	-	-	-
KPPBC SAMARINDA	-	-	-	-
KPPBC TARAKAN	-	-	-	-
KPPBC NUNUKAN	-	-	-	-
KPPBC BONTANG	-	-	-	-
KPPBC SANGATA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel C.24. Banding Per Dokumen

Per 31 Desember 2023

Dokumen	Jumlah Dokumen	Total
KEP Keberatan Impor	0	-
KEP Keberatan Ekspor	0	-
KEP Keberatan Cukai	0	-
SPKPBM	0	-
SPKPBK	0	-
SPP	0	-
SPPBK	0	-
SPSA	0	-
SPKTNP	0	-
SPTNP	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Piutang yang telah  
Daluwarsa  
Rp.47.490.092.974

#### C.5.12. Piutang yang telah Daluwarsa

Piutang DJBC sebesar Rp.47.490.092.974 merupakan piutang yang telah daluwarsa (lebih dari 10 tahun sejak timbulnya kewajiban membayar) sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Masa daluwarsa tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam hal :

- yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- yang terutang memperoleh penundaan: atau
- yang terutang melakukan pelanggaran Undang-Undang ini

Rincian atau Piutang Daluwarsa sebagaimana dimaksud per tanggal 31 Desember 2023 tersaji sebagaimana table C.25

Tabel C.25. Rincian Daluwarsa disajikan per Satuan Kerja

Per 31 Desember 2023

NAMA SATKER	Piutang Kepabeanaan	Piutang Cukai	Piutang PDRI	Total
KANWIL KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	-	-	-	-
KPPBC BALIKPAPAN	29.361.749.129	2.610.445.000	-	31.972.194.129
KPPBC SAMARINDA	7.740.783.562	-	-	7.740.783.562
KPPBC TARAKAN	72.115.000	-	-	72.115.000
KPPBC NUNUKAN	-	-	-	-
KPPBC BONTANG	7.705.000.283	-	-	7.705.000.283
KPPBC SANGATA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44.879.647.974</b>	<b>2.610.445.000</b>	<b>-</b>	<b>47.490.092.974</b>

Pada table C.22 tersebut total Piutang Daluwarsa terbanyak berasal dari Satuan Kerja KPPBC TMP B Balikpapan senilai Rp.31.972.194.129.

Piutang yang  
berpotensi Daluwarsa  
Rp.0,00

**C.5.13. Piutang yang berpotensi Daluwarsa**

Piutang DJBC sebesar Rp.0,00 merupakan piutang yang berpotensi daluwarsa per 30 April 2024. Hal tersebut sesuai dengan KMK-514/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Piutang Rincian Piutang yang berpotensi kadaluarsa tersebut disajikan sebagaimana table C.26

Tabel C.26. Rincian Potensi Daluwarsa disajikan per Satuan Kerja  
Per 31 Desember 2023

NAMA SATKER	Piutang Kepabeanaan	Piutang Cukai	Piutang PDRI	Total
KANWIL KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	-	-	-	-
KPPBC BALIKPAPAN	-	-	-	-
KPPBC SAMARINDA	-	-	-	-
KPPBC TARAKAN	-	-	-	-
KPPBC NUNUKAN	-	-	-	-
KPPBC BONTANG	-	-	-	-
KPPBC SANGATA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Penyisihan Piutang  
Rp.68.532.779.275

**C.5.14. Penyisihan Piutang**

Saldo Penyisihan Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.68.532.779.275. Penyisihan piutang terbanyak disumbang dari Piutang Pendapatan Pabean Lainnya sebesar Rp.24.150.817.594, sebagaimana disajikan pada table C.27

Tabel C.27. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Akun Piutang  
Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Piutang (Bruto)	Penyisihan	Nilai Piutang (Netto)
PPh Pasal 22	0	0	0
PPh Pasal 22 Impor	453.648.075	2.268.240	451.379.835
PPN Dalam Negeri	0	0	0
PPN Impor	261.659.586	1.308.298	260.351.288
PPnBM Impor	0	0	0
Cukai Hasil Tembakau	0	0	0
Cukai Etil Alkohol	0	0	0
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.610.445.000	2.610.445.000	0
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	0	0
Pendapatan Cukai Lainnya	0	0	0
Bunga Penagihan Pph	0	0	0
Bunga Penagihan PPN	0	0	0
Bea masuk	12.995.314.745	10.732.948.420	2.262.366.325
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	11.098.291.038	10.797.725.429	300.565.609
Pendapatan Pabean Lainnya	24.167.248.191	24.150.817.594	16.340.597
Pajak/Pungutan Ekspor	14.418.318.838	14.410.874.248	7.444.590
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	5.826.392.045	5.826.392.045	0
Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	0	0
Bea Masuk Antidumping	0	0	0
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>71.831.317.519</b>	<b>68.532.779.275</b>	<b>3.298.538.244</b>

Piutang Bukan Pajak  
Rp.13.503.699.772

### C.5. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13.503.699.772 dan Rp.13.804.087.754. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian mengenai Piutang Bukan Pajak adalah sebagaimana disajikan pada tabel C.28.

Tabel C. 28 Rincian Piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Piutang PNBP	13.503.699.772	13.804.087.754	(2,18)
Piutang Lainnya	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.503.699.772</b>	<b>13.804.087.754</b>	<b>(2,18)</b>

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp.13.503.699.772

### C.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13.503.699.772 dan Rp.13.804.087.754. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar terdapat penyisihan piutang tidak tertagih atas Piutang Perpajakan dan Piutang Bukan Pajak, sebagaimana disajikan pada tabel C.28. Adapun rincian atas perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan berdasarkan kualitas Piutang adalah sebagaimana pada tabel C.29

Tabel C. 29 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar  
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Unaudited)	TA 2022 (Audited)	Naik (Turun) %
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(13.503.699.772)	(7.693.871.748)	(75,51)
<b>Jumlah</b>	<b>(13.503.699.772)</b>	<b>(77.290.077.574)</b>	<b>(75,51)</b>

Tabel C. 30 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Perpajakan</b>			
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Piutang PNBP</b>			
Macet	-	100%	-
Diragukan	-	50%	-
Lancar	13.503.699.772	0,5	(13.503.699.772)
<b>Jumlah</b>	<b>13.503.699.772-</b>	<b>-</b>	<b>(13.503.699.772)</b>
<b>Piutang Lainnya</b>			
Lancar	-	0,5	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>13.503.699.772</b>	<b>-</b>	<b>(13.503.699.772)</b>

Persediaan  
Rp.1.491.349.940

### C.7. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

handal, serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Saldo Persediaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.491.349.940 dan Rp.1.001.611.876 mengalami kenaikan sebesar Rp.489.738.064 atau sebesar 48,89 persen. Adapun saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terinci sebagaimana tabel C.31

Tabel C.31 Kenaikan/Penurunan Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	742.571.625	821.979.372	(79.407.747)	(9,66)
Amunisi	200.535.567	125.467.362	75.068.205	59,83
Bahan Untuk Pemeliharaan	23.829.619	29.036.858	(5.207.239)	(17,93)
Suku Cadang	580.000	0	580.000	100
Pita Cukai, Materai dan Leges	3.696.344	0	3.696.344	100
Persediaan BTS, BDN, dan BMMN	502.161.000	0	502.161.000	100
Persediaan Lainnya	17.975.785	25.128.284	(7152.499)	(28,46)
<b>Jumlah</b>	<b>1.491.349.940</b>	<b>1.001.611.876</b>	<b>489.738.064</b>	<b>48,89</b>

Tabel C. 32 Laporan Mutasi Persediaan TA 2023

<b>Saldo Awal Persediaan 1 Januari 2023</b>	<b>1.001.611.876</b>
Pembelian	788.447.466
Reklasifikasi Masuk	1.349.680
Transfer Masuk Online	1.241.067.934
Koreksi Transfer Keluar Online	0
Koreksi Nilai Tambah	715.143.000
Rampasan	667.661.000
Saldo Awal	687.351.168
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>5.102.632.124</b>
Habis Pakai	(2.037.252.412)
Reklasifikasi Keluar	(1.349.680)
Hasil Opnem Fisik	(4.685.924)
Transfer Keluar Online	0
Hibah Keluar	(27.500.000)
Koreksi Kuantitas Kurang	(1.394.833.000)
Koreksi Nilai Kurang	(138.000.000)
Keluar Lainnya	(7.661.168)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(3.611.282.183)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1.491.349.940</b>

Mutasi persediaan selama periode *Unaudited* Tahun 2023 sebagaimana dirinci pada tabel C.29 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp.5.102.632.124 dan mutasi kurang sebesar (Rp.3.611.282.183). Adapun rincian mutasi persediaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang terjadi selama periode *Unaudited* Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembelian adalah transaksi penambahan persediaan yang berasal dari pembelian menggunakan dana DIPA tahun anggaran berjalan. Mutasi persediaan yang berasal dari Pembelian sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.788.447.466. Adapun realisasi belanja barang persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.788.447.466 dengan rincian sebagaimana tabel C.32.

Tabel C. 30 Rekonsiliasi Belanja dan Penambahan Persediaan TA 2023

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	296.803.149
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi	0
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112.798.710
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	188.947.695
523191	-Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	189.897.912
<b>Jumlah</b>		<b>788.447.466</b>

2. Reklasifikasi masuk merupakan transaksi tambah/masuk atas koreksi pencatatan karena kesalahan pencatatan kode barang antar akun persediaan. Reklas masuk berkaitan erat dengan transaksi Reklasifikasi Keluar, reklas masuk dicatat pada Modul Persediaan setelah reklas keluar dicatat terlebih dahulu pada Modul Persediaan. Oleh karena itu, nilai total transaksi reklas masuk harus sama dengan reklas keluar. Reklasifikasi masuk persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.349.680 dengan rincian sebagaimana tabel C.31.

Tabel C. 31 Reklasifikasi Masuk atas Persediaan

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai	Keterangan
117111	Barang Konsumsi	1.030.000	Transfer Masuk dari KP DJBC
117112	Amunisi	-	Transfer Masuk dari KP DJBC
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	319.680	Pembelian
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	
117199	Persediaan Lainnya	0	
<b>Jumlah</b>		<b>1.349.680</b>	

3. Koreksi Transfer Keluar Online merupakan koreksi yang digunakan untuk melakukan koreksi atas transfer keluar online. Koreksi transfer keluar online tidak terjadi, karena tidak terdapat kesalahan kode yang tidak sesuai dengan kode penerima. Koreksi Transfer Keluar Online per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagaimana tabel C.32

Tabel C. 32 Koreksi Transfer Keluar Online atas Persediaan

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai	Keterangan
-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

4. Saldo Awal merupakan transaksi yang digunakan untuk merekam persediaan yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada modul Persediaan pada Tahun Anggaran Yang Lalu dikarenakan alasan tertentu, baik diperoleh dengan pembelian, transfer masuk, rampasan, perolehan lainnya, atau reklasifikasi masuk. Transaksi Saldo Awal persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.001.611.876, dengan rincian sebagaimana tabel C.33.

Tabel C. 33 Transaksi Saldo Awal atas Persediaan

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai	Keterangan
117111	Barang Konsumsi	821.979.372	Barang ATK dan Bahan Komputer
117112	Amunisi	125.467.362	Amunisi
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	29.036.858	Bahan Pemeliharaan Gedung
117199	Persediaan Lainnya	25.128.284	Bahan Obat-Obatan
<b>Jumlah</b>		<b>1.001.611.876</b>	

5. Habis Pakai merupakan transaksi yang mencatat pengeluaran persediaan karena adanya pemakaian. Habis pakai persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.2.036.352.421), dengan rincian sebagaimana tabel C.33.

Tabel C. 33 Pemakaian atas Persediaan

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	(1.718.203.176)
117112	Amunisi	(83.824.845)
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	(94.448.299)
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	(30.015.816)
117199	Persediaan Lainnya	(109.860.285)
<b>Jumlah</b>		<b>(2.036.352.421)</b>

6. Reklasifikasi Keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk melakukan koreksi pencatatan kurang persediaan terkait dengan kesalahan pencatatan kode barang. Reklas keluar berkaitan erat dengan reklas masuk. Reklas keluar ini merupakan lawan dari transaksi reklas masuk, sehingga nilainya harus sama antara reklas keluar dan masuk. Reklasifikasi keluar persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.1.349.680), dengan rincian sebagaimana tabel C.34.

Tabel C. 34 Reklasifikasi Keluar atas Persediaan

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai	Keterangan
117111	Barang Konsumsi	(30.000)	-
117112	Amunisi	0	-
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	(319.680)	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	(1.000.000)	-
117199	Persediaan Lainnya	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>(1.349.680)</b>	

7. Transfer Keluar Online merupakan transaksi kurang persediaan dalam rangka transfer barang antar satker yang menggunakan aplikasi SAKTI. Transfer keluar persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagaimana tabel C.35

Tabel C. 35 Transfer Keluar atas Persediaan

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	-
117112	Amunisi	-
117114	Suku Cadang	-
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

8. Koreksi Kuantitas Kurang merupakan koreksi yang digunakan untuk melakukan koreksi atas kuantitas barang yang mengalami kesalahan pencatatan dimana kuantitas yang tercatat lebih banyak daripada yang seharusnya dan koreksi ini hanya berdampak pada perubahan kuantitas saja tanpa mengubah harga satuan. Koreksi kuantitas kurang per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.624.590.000), dengan rincian sebagaimana tabel C.36

Tabel C. 36 Koreksi Kuantitas Kurang atas Persediaan

Uraian Barang	Nilai	Keterangan
Persediaan Lainnya	(624.590.000)	-
<b>Jumlah</b>	<b>(624.590.000)</b>	<b>-</b>

Tanah  
Rp.254.604.310.000

#### C.8. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang tercatat di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dari Satker-Satker di Wilayah Kerja Kanwil DJBC Kalbagtim per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.254.604.310.000. dan Rp.256.961.141.000. Pada tabel C.37 menunjukkan tidak ada perubahan saldo Tanah selama Tahun 2023.

Tabel C. 37 Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	<b>256.961.141.000</b>
Perolehan Lainnya	-
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
Transfer Keluar	(1.216.831.000)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(1.216.831.000)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>255.744.310.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>254.604.310.000</b>

Tabel C.38 menunjukkan rincian Tanah yang dimiliki oleh Satker-Satker Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Tabel C. 38 Rincian Aset Tetap berupa Tanah Pada Satker Per 31 Desember 2023

No	Nama Satker	Nilai
1	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	63.584.654.000
2	KPPBC TMP B BALIKPAPAN	48.260.921.000
3	KPPBC TMP B SAMARINDA	71.745.112.000
4	KPPBC TMP B TARAKAN	59.635.004.000
5	KPPBC TMP C NUNUKAN	1.341.482.000
6	KPPBC TMP C BONTANG	10.273.278.000
7	KPPBC TMP C SANGATA	903.859.000
<b>Jumlah</b>		<b>255.744.310.000</b>

Peralatan dan Mesin  
Rp.62.929.385.584

#### C.9. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.62.929.385.584 dan Rp.59.743.458.654. Peralatan dan Mesin terdiri dari alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, dan lain-lain. Rincian mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel C.39.

Tabel C. 39 Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	<b>59.743.458.654</b>
Pembelian	942.300.000
Transfer Masuk	1.959.021.101
Reklasifikasi Masuk	94.966.300
Pengembangan Melalui KDP	734.653.141
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	429.585.592
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>63.903.984.791</b>
Transfer Keluar	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(879.632.907)
Reklasifikasi Keluar	(94.966.300)
Hibah Keluar	0
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(974.599.207)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>62.929.385.584</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(56.186.925.231)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>6.742.460.353</b>

Gedung dan Bangunan  
Rp.77.861.754.949

#### C.10. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.77.861.754.949 dan Rp.78.102.756.649. Rincian mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel C.40. Gedung dan Bangunan pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan bagian Timur terdiri atas Bangunan Gedung terdiri dari Kantor, Garasi/Pool, Bangunan Terbuka, Rumah Dinas, Mess dan Pagar.

Tabel C. 40 Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	<b>78.102.756.649</b>
Reklasifikasi Masuk	0
Pengembangan Melalui KDP	707.591.300
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>78.810.347.949</b>
Reklasifikasi Keluar	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(948.593.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(948.593.000)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>77.861.754.949</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(19.277.694.458)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>58.584.060.491</b>

Jalan, Jaringan dan  
Irigasi Rp.432.568.000

#### C.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp432.568.000 dan Rp.432.568.000, tidak mengalami perubahan. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan seluruhnya merupakan berupa Bangunan Air. Rincian mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kantor Pusat DJBC dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel C.41.

Tabel C. 41 Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	<b>432.568.000</b>
Perolehan Lainnya	-
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>-</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>432.568.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(144.089.213.)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>288.478.787</b>

Aset Tetap Lainnya  
Rp.0,00

#### C.12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian mutasi dan rincian barang atas aset tetap lainnya sebagaimana disajikan pada tabel C.42

Tabel C. 42 Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	<b>-</b>
Pembelian	-
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>-</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan  
Rp.327.540.264

### C.13. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan perolehan aset tetap dalam rangka penyelesaian pembangunan Gedung dan Bangunan serta pengadaan Peralatan dan Mesin, 2023 terdapat aset tetap dalam rangka penyelesaian Pembangunan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.327.540.264, disajikan pada table C.43

Tabel C.43 Rincian Mutasi Nilai KDP per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	<b>0</b>
Transfer Masuk KDP	1.164.238.736
Perolehan/Penambahan KDP	77.065.817
Pengembangan KDP	1.876.454.947
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>3.117.759.500</b>
Koreksi Nilai KDP	(904.645.200)
Koreksi Pencatatan KDP	(13.744.000)
Pengembangan Melalui KDP	(1.442.244.444)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(429.585.592)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(2.790.219.236)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>327.540.264</b>

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
(Rp72.735.213.768)

### C.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp.72.735.213.768) dan (Rp.70.481.118.595), mengalami kenaikan sebesar (Rp.2.254.095.173) atau 3,20 persen. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Adapun rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan sebagaimana pada tabel C.44

Tabel C. 44 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	62.929.385.584	(56.186.925.231)	6.742.460.353
2	Gedung dan Bangunan	77.861.754.949	(19.277.694.458)	58.584.060.491
3	Jaringan dan Irigasi	432.568.000	(144.089.213)	288.478.787
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>141.223.708.533</b>	<b>(75.608.708.902)</b>	<b>65.614.999.631</b>

Tagihan TP/TGR  
Rp.0,00

### C.15. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00, tidak mengalami perubahan. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Perbandingan saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel C.45.

Tabel C.45 Perbandingan Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang Rp.

#### C.16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00, tidak mengalami perubahan. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Status piutang atas TP/TGR pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merupakan piutang macet. Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagaimana disajikan pada tabel C.46.

Tabel C. 46 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Aset Tak Berwujud  
Rp.0,00

#### C.17. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00, tidak mengalami perubahan. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pusat DJBC berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel C.47.

Tabel C. 47 Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	-
Perolehan dari KDP	-
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

Aset Tak Berwujud yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merupakan *Software* yang digunakan dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepabeanaan dan cukai, antara lain Oracle, Aplikasi CRM, Aplikasi Perekam Suara, ARBUTUS, Portal NLE, dan lain-lain

Aset Tak Berwujud  
Dalam Pengerjaan  
Rp.0,00

### C.18. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Kantor Pusat DJBC merupakan perolehan aset lainnya dalam rangka penyelesaian pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud berupa Pengadaan Software. Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Kantor Pusat DJBC sebagaimana disajikan pada tabel C.48

Tabel C.48 Rincian Mutasi Nilai ATB Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	-
Perolehan/Penambahan KDP	-
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-

Aset Lain-Lain  
Rp.3.220.740.474

### C.19. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.220.740.474 dan Rp.889.351.238. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagaimana disajikan pada tabel C.49

Tabel C. 49 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.220.740.474	889.351.238	262,14
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.220.740.474</b>	<b>889.351.238</b>	<b>262,14</b>

Aset lain-lain terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan. Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagaimana disajikan pada tabel C.50

Tabel C. 50 Rincian Mutasi Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023</b>	<b>889.351.238</b>
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Penghentian Aset dari penggunaan	1.974.225.907
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>3.863.577.145</b>
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(612.460.039)
Penghapusan	(24.376.632)
Penggunaan Kembali BMN yang telah dihentikan penggunaan aktif	(6.000.000)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(642.836.671)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>3.220.740.474</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.797.369.869)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>1.423.370.605</b>

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya  
(Rp.1.797.369.869)

### C.20. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp.1.797.369.869) dan (Rp.889.351.238). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan

metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana disajikan pada tabel C.51

Tabel C. 51 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud:</b>			
Software	-	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-
<b>Jumlah Aset Tak Berwujud</b>			
<b>Aset Lain-lain:</b>			
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3.863.577.145	(1.797.369.869)	1.423.370.605
<b>Jumlah</b>	<b>3.863.577.145</b>	<b>(1.797.369.869)</b>	<b>1.423.370.605</b>

Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp.4.022.295.001

### C.21. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.022.295.001 dan Rp.2.954.444.317. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga dapat berupa Belanja yang Masih Harus Dibayar, Dana Pihak Ketiga, dan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada tabel C.52

Tabel C. 52 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0	0
Dana Pihak Ketiga	4.022.295.001	2.954.444.317	36,14
<b>Jumlah</b>	<b>4.022.295.001</b>	<b>2.954.444.317</b>	<b>36,14</b>

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Kantor Pusat DJBC per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar merupakan akrual tambah atas Belanja Pegawai yang belum diterbitkan SP2D-nya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel C.53

Tabel C. 53 Rincian Belanja Pegawai YMHD per 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	Nilai
511129	Belanja Uang Makan PNS	-
512211	Belanja Uang Lembur	-
<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

- b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar merupakan akrual tambah atas Belanja Barang yang belum diterbitkan SP2D-nya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.138.129.029, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel C.54.

Tabel C. 54 Rincian Belanja Barang YMHD per 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	Nilai
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0
521211	Belanja Bahan	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
522111	Belanja Langganan Listrik	113.902.234
522112	Belanja Langganan Telepon	13.371.526
522131	Belanja Jasa Konsultan	10.855.269
522141	Belanja Sewa	0
522151	Belanja Jasa Profesi	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	0
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0
	<b>Jumlah</b>	<b>138.129.029</b>

- c. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar merupakan akrual tambah atas Belanja Modal yang belum diterbitkan SP2D-nya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel C.55

Tabel C. 55 Rincian Belanja Modal YMHD per 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	Nilai
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

- d. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp.0,00, yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagaimana pada tabel C.56

Tabel C. 56 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

- e. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.0,00, yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagaimana pada tabel C.57.

Tabel C. 57 Rincian Dana Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Utang yang Belum  
Ditagihkan Rp.0,00

### C.22. Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan (UYBDT) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan belanja pengadaan barang dan/atau jasa yang telah memiliki kontrak dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) namun belum terbit SPP (Surat Perintah Pembayaran) sampai dengan periode pelaporan. Pembayaran atas utang tersebut dilakukan pada Unaudited TA 2023. Rincian Utang yang Belum Ditagihkan adalah sebagaimana disajikan pada tabel C58.

Tabel C.58 Rincian Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	31 Des 2022	Naik (Turun) %
Belanja Keperluan Perkantoran	-	-	-
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	-
Belanja Barang Operasional Lainnya	-	-	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Barang Persediaan Lainnya	-	-	-
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	-	-	-
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Langganan Telepon	-	-	-
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pendapatan Diterima  
di Muka Rp.0,00

### C.23. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Adapun rincian Pendapatan Sewa Diterima di Muka adalah sebagaimana disajikan pada tabel C.59.

Tabel C. 59 Rincian Pendapatan Sewa Diterima di Muka per 31 Desember 2023

Objek Sewa	Periode Sewa	Nilai yang Dibayar	Pendapatan Akrual	Saldo PDDM
-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Uang Muka dari KPPN  
Rp.0,00

### C.24. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan UP atau TUP yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas  
Rp326.643.085.054

### C.25. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.326.643.085.054 dan Rp.341.012.580.895. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Pendapatan  
Perpajakan  
Rp.1.761.590.769.432

**D.1. Pendapatan Perpajakan**

Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.761.590.769.432. Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Perpajakan yang berupa PDRI dicatat hanya atas pendapatan berbasis akrual yang berasal dari piutang. Saat adanya pelunasan atas piutang PDRI, penerimaan basis kasnya tidak dicatat di dalam Laporan Keuangan DJBC, namun menjadi realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 yang mengatur bahwa Pendapatan Perpajakan serta hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan seperti pengembalian dan pelunasan piutang di DJBC adalah bersifat recurring, sehingga pengurangan piutang yang terbit pada periode sebelumnya yang pelunasannya terjadi pada tahun berjalan menjadi pengurang pendapatan pada tahun berjalan. Hal-hal tersebut memungkinkan timbulnya pendapatan negatif dalam hal piutang terbit pada tahun berjalan lebih kecil dari pengurangan piutang yang terbit pada periode-periode sebelumnya. Rincian Pendapatan Perpajakan disajikan sebagaimana pada table D.1

Pedapatan Perpajakan -LO Kanwil DJBC Kalbagtim paling besar disumbangkan oleh Pendapatan Bea Masuk sebesar Rp.1.134.780.457.000 atau 64 persen dari total penerimaan Kanwil.

Tabel D. 1. Rincian Pendapatan Perpajakan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Pajak Penghasilan	128.030.075	(286.066.000)	(144,76)
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	(584.520.414)	19.337.000	(3.122,81)
Pendapatan Cukai	6.963.509.000	1.784.243.000	290,28
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	1.134.780.457.000	1.320.836.215.581	(14,09)
Pendapatan Bea Keluar	620.303.293.771	3.407.850.612.000	(81,80)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.761.590.769.432</b>	<b>4.730.194.341.581</b>	<b>(62,76)</b>

Pendapatan Pajak  
Penghasilan  
Rp.128.030.075

**D.1.1. Pendapatan Pajak Penghasilan**

Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.128.030.075 dan (Rp.286.066.000), atau mengalami kenaikan sebesar (144,76) persen. Rincian Pendapatan Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat sebagaimana rincian table D.2.

Pada tabel D.3 Pendapatan Pajak Penghasilan di DJBC bersumber dari Mutasi Kas di BPN sebesar Rp.0,00, Mutasi Piutang sebesar Rp.127.466.075, PYMHD sebesar Rp.0,00, Penghapusan Piutang sebesar Rp.0,00, Koreksi Lainnya sebesar Rp.0,00 dan Koreksi Piutang sebesar Rp.564.000. Rincian tersebut disajikan sebagaimana tabel D.3.

Untuk mutasi piutang detail dapat dilihat pada bagian Neraca terkait pengungkapan piutang.

Tabel D.2. Rincian Pendapatan Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	% NAIK/ (TURUN)
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	128.030.075	(286.066.000)	(144,76)
<b>JUMLAH</b>	<b>128.030.075</b>	<b>(286.066.000)</b>	<b>(144,76)</b>

Tabel D.3. Akruai Piutang Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Jenis Pendapatan	LRA Bruto	Mutasi Kas di BPN	Mutasi Piutang	PYMHD	Penghapusan Piutang	Koreksi Lainnya	Koreksi Piutang	Saldo
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	-	-	127.466.075	-	-	-	564.000	128.030.075
<b>Total</b>	-	-	<b>127.466.075</b>	-	-	-	<b>564.000</b>	<b>128.030.075</b>

#### D.1.2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Jumlah Pendapatan PPN dan PPnBM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp.584.520.411) dan Rp.19.337 atau mengalami penurunan sebesar (3.122,81) persen. Rincian Pendapatan PPN dan PPnBM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagaimana rincian table D. 4.

Berdasarkan tabel D.5 Pendapatan PPN dan PPnBM di DJBC bersumber dari Mutasi Kas di BPN sebesar Rp.0,00, Mutasi Piutang sebesar (Rp,586.777.414), PYMHD sebesar Rp.0,00, Penghapusan Piutang sebesar Rp.0,00, Koreksi Lainnya sebesar Rp dan Koreksi Piutang sebesar Rp.2.257.000 Rincian disajikan sebagaimana tabel D.5.

Untuk mutasi piutang detail dapat dilihat pada bagian Neraca terkait pengungkapan piutang.

Tabel D.4. Rincian Pendapatan PPN dan PPnBM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	% NAIK/ (TURUN)
Pendapatan PPN Impor	(584.520.414)	19.337.000	(3.122,81)
Pendapatan PPnBM Impor	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>(584.520.414)</b>	<b>19.337.000</b>	<b>(3.122,81)</b>

Tabel D.5. Akruai Piutang PPN Impor untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Jenis Pendapatan	LRA Bruto	Mutasi Kas di BPN	Mutasi Piutang	PYMHD	Penghapusan Piutang	Koreksi Lainnya	Koreksi Piutang	Saldo
Pendapatan PPN Impor	-	-	(586.777.414)	-	-	-	2.257.000	(584.520.414)
Pendapatan PPN DN	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan PPnBM Impor	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	<b>(586.777.414)</b>	-	-	-	<b>2.257.000</b>	<b>(584.520.414)</b>

Pendapatan Cukai  
Rp.6.963.509.000

#### D.1.3. Pendapatan Cukai

Jumlah Pendapatan Cukai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.6.963.509.000 dan Rp.1.784.243.000, atau mengalami kenaikan sebesar 290,28 persen. Kelompok Pendapatan Cukai terdiri dari akun Pendapatan Cukai Hasil Tembakau, Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol, Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol, Pendapatan Denda Administrasi Cukai, serta Pendapatan Cukai Lainnya. Rincian Pendapatan Cukai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat sebagaimana rincian tabel D.6.

Berdasarkan tabel D.7, realisasi basis kas atas Pendapatan Cukai (Neto) selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp.7.203.509.000. Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Cukai berasal dari penyesuaian terkait Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Cukai, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (Utang Kelebihan Bayar Cukai), adanya penghapusan piutang dan koreksi lainnya atas piutang.

Kas di Bendahara Penerimaan berkaitan dengan penerimaan pembayaran tunai yang hingga akhir periode pelaporan masih belum disetor ke Rekening Kas Negara, sementara itu tidak ada Mutasi Pendapatan Cukai yang berasal dari Kas Bendahara Penerimaan. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga atas pengembalian penerimaan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembaliannya, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih belum terealisasi secara kas (terbit SP2D). Nilai Utang Kelebihan Bayar Cukai per 31 Desember 2023 atas Cukai sebesar Rp.0,00

Selain itu ada juga penghapusan atas Piutang sebesar Rp.0,00 yang terdiri atas penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175/KMK.04/2023 sebesar Rp dan adanya Crash Program sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 sebesar Rp.0,00. Dan juga terdapat mutasi piutang sebesar (Rp.240.000.000) dan koreksi atas piutang sebesar Rp.0,00. Rincian mutasi kelompok Cukai sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana tabel D.7. Untuk mutasi piutang detail dapat dilihat pada bagian Neraca terkait pengungkapan piutang.

Tabel D.6. Rincian Pendapatan Cukai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Pendapatan	2023	2022	% NAIK/ (TURUN)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	4.227.114.000	1.282.140.000	229,69
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	-	-	-
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	-	-	-
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	2.730.002.000	500.015.000	445,98
Pendapatan Cukai Lainnya	6.393.000	2.088.000	206,18
<b>Jumlah</b>	<b>6.963.509.000</b>	<b>1.784.243.000</b>	<b>290,28</b>

Tabel D.7. Rincian Penyesuaian AkruaI Pendapatan Cukai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Jenis Pendapatan	LRA Netto	Mutasi Kas di BPN	Mutasi Piutang	UKPP	Mutasi PYMHD	Penghapusan Piutang	Koreksi Piutang	Koreksi Lainnya	Saldo
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	4.275.114.000	-	(48.000.000)	-	-	-	-	-	4.227.114.000
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	2.922.002.000	-	(192.000.000)	-	-	-	-	-	2.730.002.000
Pendapatan Cukai Lainnya	6.393.000	-	-	-	-	-	-	-	6.393.000
<b>Total</b>	<b>7.203.509.000</b>	<b>-</b>	<b>(240.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.963.509.000</b>

Pendapatan Bea  
Masuk  
Rp.1.134.780.457.000

#### D.1.4. Pendapatan Bea Masuk

Jumlah Pendapatan Bea Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.1.134.780.457.000 dan Rp.1.320.826.215.581, atau mengalami penurunan sebesar (14,09) persen.

Kelompok Pendapatan Bea Masuk pada Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan Bea Masuk (BM), Pendapatan BM Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Pendapatan BM Ditanggung Pemerintah (DTP), Pendapatan BM Anti Dumping, Pendapatan BM Imbalan, Pendapatan Denda Administrasi Pabean, Pendapatan Pabean Lainnya, dan Pendapatan BM Tindakan Pengamanan. Rincian Pendapatan Bea Masuk dapat dilihat sebagaimana rincian tabel D.8.

Berdasarkan tabel D.9, realisasi basis kas atas Pendapatan Bea Masuk (Netto) selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.139.869.273.000.

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Bea Masuk berasal dari penyesuaian terkait Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk), Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, dan adanya penghapusan piutang dengan uraian sebagai berikut:

- Mutasi pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp.0,00 berasal dari selisih saldo kas berupa yang ada di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 disandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022.
- Mutasi Utang Kelebihan Pengembalian Pendapatan merupakan selisih saldo per 31 Desember 2023 dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp, sehingga menjadi penyesuaian secara akrual.

- Mutasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp.389.926.000 merupakan selisih antara saldo Awal PYMHD sebesar Rp.0,00 yang disumbang dari adanya Pembayaran Inisiatif atas nilai pabean atas PIB Deklarasi Inisiatif Tahun 2021 dan 2022 dengan settlement date Tahun 2022 yang dibayarkan pada Tahun 2023 dengan saldo Akhir PYMHD sebesar Rp.389.926.000.

Selain itu ada juga penghapusan atas Piutang sebesar Rp.8.495.389 yang terdiri atas penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175/KMK.04/2023 sebesar Rp.8.495.389 dan adanya Crash Program sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 sebesar Rp.0,00. Terakhir terdapat mutasi piutang sebesar (Rp.5.507.544.449) dan Koreksi Piutang sebesar Rp.20.307.060 yang merupakan kurang catat/lebih catat atas piutang tahun sebelumnya.

Untuk mutasi piutang detail dapat dilihat pada bagian Neraca terkait pengungkapan piutang.

Tabel D.8. Rincian Pendapatan Bea Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Pendapatan	2023	2022	% NAIK/ (TURUN)
Pendapatan Bea Masuk	1.125.916.071.000	1.312.118.735.581	(14,22)
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	7.768.040.000	7.955.753.000	(2,36)
Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka KITE	-	-	-
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	-	-
Pendapatan BMDTP	-	-	-
Pendapatan Pabean Lainnya	1.447.000	4.166.000	(65,27)
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	515.853.000	46.000	1.121.319,57
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	579.046.000	747.515.000	(22,54)
<b>Jumlah</b>	<b>1.134.780.457.000</b>	<b>1.320.826.215.581</b>	<b>(14,09)</b>

Tabel D.9. Rincian Penyesuaian Akrual Pendapatan Bea Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	LRA Netto	Mutasi Kas di BPN	Mutasi Piutang	Mutasi UKPP	Mutasi PYMHD	Penghapusan Piutang	Koreksi Piutang	Koreksi Lainnya	Saldo
Pendapatan Bea Masuk	1.130.953.548.000	-	5.449.974.000	-	389.926.000	-	22.571.000	-	1.125.916.071.000
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	7.817.018.000	-	57.150.829	-	-	8.173.672	843	-	7.768.040.000
Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pabean Lainnya	3.808.000	-	419.620	-	-	321.717	2.263.097	-	1.447.000
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	515.853.000	-	-	-	-	-	-	-	515.853.000
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	579.046.000	-	-	-	-	-	-	-	579.046.000
<b>Total</b>	<b>1.139.869.273.000</b>	<b>-</b>	<b>5.507.544.449</b>	<b>-</b>	<b>389.926.000</b>	<b>8.495.389</b>	<b>20.307.060</b>	<b>-</b>	<b>1.134.780.457.000</b>

Pendapatan Pajak Bea  
Keluar  
Rp.620.303.293.771

#### D.1.5. Pendapatan Pajak Bea Keluar

Jumlah Pendapatan Bea Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.620.303.293.771 dan Rp3.407.850.612.000, atau mengalami Penurunan sebesar (81,80) persen.

Kenaikan tersebut utamanya dikarenakan adanya peningkatan realisasi penerimaan Bea Keluar (basis kas) selama Tahun 2023. Pendapatan Bea Keluar-LO terdiri dari tiga komponen, yaitu Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar. Rincian Pendapatan Bea Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat sebagaimana rincian tabel D.10.

Pada tabel D.11 Realisasi Basis kas atas Pendapatan Bea Keluar sebesar Rp.621.041.381 dipengaruhi oleh Mutasi Kas di BPN sebesar Rp.0,00, Mutasi Piutang sebesar (Rp.738.087.229), Mutasi UKPP sebesar Rp.0,00, Mutasi PYMHD sebesar Rp.0,00, Penghapusan Piutang sebesar Rp.0,00 dan Koreksi Piutang sebesar Rp.0,00

Penghapusan atas Piutang tersebut terdiri atas penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 175/KMK.04/2023 sebesar Rp dan adanya Crash Program sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 sebesar Rp.0,00

Untuk table47 piutang detail dapat dilihat pada bagian Neraca terkait pengungkapan piutang. Rinciannya sebagaimana table D.11

Tabel D.10. Rincian Pendapatan Bea Keluar untuk periode yang berakhir  
31 Desember 2023 dan 2022

	2023	2022	% NAIK/ (TURUN)
Pendapatan Bea Keluar	620.303.183.772	3.407.850.612.000	(81,80)
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	95.000	-	-
Pendapatan Bunga Bea Keluar	15.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>620.303.293.771</b>	<b>3.407.850.612.000</b>	<b>(81,80)</b>

Tabel D.11. Rincian Penyesuaian Pendapatan Akrual Bea Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	LRA Netto	Mutasi Kas di BPN	Mutasi Piutang	Mutasi UKPP	Mutasi PYMHD	Penghapusan Piutang	Koreksi Piutang	Koreksi Lainnya	Saldo
Pendapatan Bea Keluar	621.041.271.000	-	(738.087.228)	-	-	-	-	-	620.303.183.771
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	95.000	-	-	-	-	-	-	-	95.000
Pendapatan Bunga Bea Keluar	15.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000
<b>Total</b>	<b>621.041.381.000</b>	<b>-</b>	<b>(738.087.229)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>620.303.293.771</b>

Pendapatan Pajak  
Lainnya Rp.0,00

#### D.1.6. Pendapatan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp dan Rp atau mengalami sama sebesar 0,00 persen.

Sama seperti Pendapatan Pajak Penghasilan serta Pendapatan PPN dan PPnBM, Pendapatan Pajak Lainnya dicatat oleh DJBC sebatas penetapan piutang yang berkaitan dengan aktivitas kepabeanaan dan cukai tanpa mencatat penerimaan kas dari akun-akun tersebut. Adapun kelompok Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari Pendapatan Bunga Penagihan PPN, Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM, serta Pendapatan Bunga Penagihan PPh. Rincian Pendapatan Pajak Lainnya dapat dilihat sebagaimana rincian tabel D.12.

Saldo Pendapatan Pajak Lainnya secara akrual per 31 Desember 2023 berasal dari mutasi Piutang sebesar Rp dan adanya koreksi piutang sebesar Rp. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana rincian table D.13

Tabel D.12. Rincian Pendapatan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Pendapatan	2023	2022	% NAIK/ (TURUN)
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	-	-
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel D.13. Rincian Penyesuaian AkruaI Pendapatan Pajak Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Uraian	LRA Netto	Mutasi Piutang	Koreksi Piutang	Saldo
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	-	-	-
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp.1.344.665.104

#### D.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.1.344.665.104 dan Rp.17.933.826.333. Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut merupakan kelompok Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak disajikan sebagaimana pada tabel D.13

Tabel D. 13 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan	1.500.000	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	142.327.844	391.340.181	(63,63)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	152.807.782	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	1.047.806.878	17.221.541.857	(93,92)
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	222.600	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.344.665.104</b>	<b>17.939.826.333</b>	<b>(92,50)</b>

PNBP LO terbentuk dari setoran penerimaan bukan pajak ke Rekening Kas Negara ditambah/dikurangi dengan penyesuaian akrual yang dapat berupa pendapatan yang masih berada di Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, mutasi Piutang PNBP, serta Pendapatan Diterima Di Muka selain itu juga berasal dari Pendapatan Sitaan/Rampasan. Adapun rincian penyesuaian akrual atas pendapatan negara bukan pajak sebagaimana pada tabel D.14.

Tabel D. 14 Pengakuan PNBP AkruaI TA 2023

Uraian	LRA Netto	Mutasi Kas di Bend.Pen	Mutasi PDDM	Mutasi Piutang Bukan Pajak	PNBP AkruaI
-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Pegawai  
Rp.0,00

#### D.3. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2023 tidak terdapat perubahan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan sentralisasi pembayaran gaji induk pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Rincian atas Beban Pegawai disajikan sebagaimana pada tabel D.15.

Tabel D. 15 Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Beban Uang Lembur	-	-	-
Pengembalian Beban	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Persediaan  
Rp.1.915.420.221

#### D.4. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.915.420.221 dan Rp.1.058.648.412. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel D.16

Tabel D. 16 Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	1.721.531.091	948.594.331	81,48
Beban Persediaan amunisi	83.824.845	72.844.198	15,07
Beban Persediaan Lainnya	110.064.285	37.209.883	195,79
<b>Jumlah</b>	<b>1.915.420.221</b>	<b>1.058.648.412</b>	<b>80,93</b>

Beban Persediaan meningkat sebesar Rp.856.771.809 atau sebesar 80,93 persen dan peningkatan terbesar terdapat pada Beban Persediaan Konsumsi yang mengalami peningkatan sebesar Rp.771.936.760 atau sebesar 81,48 persen. Untuk menilai kewajaran atas saldo beban persediaan LO, telah dilakukan mapping beban persediaan dengan menambah saldo persediaan awal tahun ditambah pembelian tahun berjalan dikurangi saldo persediaan akhir tahun. Kemudian disesuaikan dengan saldo exclude mapping beban persediaan, sebagaimana disajikan secara wajar melalui perhitungan pada rincian tabel D.17

Tabel D. 17 Mapping Beban Persediaan

Pemakaian	Beban Persediaan LO	1.915.420.221
<b>PEMBELIAN</b>	Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) (termasuk 523xxx)	788.447.466
	Saldo Persediaan Awal Tahun	1.001.611.876
	Saldo Persediaan Akhir Tahun	(1.491.349.940)

exclude mapping beban persediaan		
	Transfer Masuk (M13)	1.241.067.934
591113	Koreksi Persediaan	509.822.168
491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan	165.500.000
593113	Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	(96.502.299)
593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	(30.015.816)
593128	Beban Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke	(165.500.000)
596111	Beban Pelepasan Aset	(7.661.168)
		<b>1.915.420.221</b>
<b>Selisih</b>		<b>-</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp.11.583.859.626

#### D.5. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.11.583.859.626 dan Rp.10.725.916.691. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel D.18.

Tabel D. 18 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	5.878.970.123	5.227.223.831	12,47
Beban Pengadaan Bahan Makanan	108.114.000	96.720.800	11,78
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	202.651.884	156.251.333	29,70
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33.498.945	32.808.460	2,10
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	690.590.000	687.396.000	0,46
Beban Barang Operasional Lainnya	746.013.019	689.058.715	8,27
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	989.200	51.738.671	(98,09)
Beban Bahan	257.520.395	243.330.815	5,83
Beban Barang Non Operasional Lainnya	644.062.000	614.198.550	4,86
Beban Langganan Listrik	1.474.061.430	1.278.040.455	15,34
Beban Langganan Telepon	137.848.543	205.877.975	(33,04)
Beban Langganan Air	133.696.981	126.977.938	5,29
Beban Sewa	1.205.227.806	1.175.103.053	2,56
Beban Jasa Profesi	10.300.000	1.800.000	472,22
Beban Jasa Lainnya	60.315.300	127.541.095	(52,71)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	11.849.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>11.583.859.626</b>	<b>10.725.916.691</b>	<b>8,00</b>

Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional terbentuk dari Belanja Barang dan Jasa LRA sebesar Rp.11.583.859.626 ditambah/dikurangi dengan penyesuaian akrual yaitu penyesuaian Utang Yang Belum Diterima Tagihannya, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Belanja Barang Dibayar Dimuka, dan penyesuaian akrual lainnya. Adapun rincian pengakuan Beban Barang dan Jasa Akrual Tahun 2023 adalah sebagaimana rincian tabel D.19.

Tabel D. 19 Pengakuan Beban Barang dan Jasa Akrua TA 2023

Uraian	LRA Netto	UYBDT	Saldo Awal YMHD	Saldo Akhir YMHD	Penyesuaian Akrua Lainnya	Beban Barang Jasa Akrua
Beban Keperluan Perkantoran	5.878.970.123		-		-	5.878.970.123
Beban Pengadaan Bahan Makanan	108.114.000		-	-	-	108.114.000
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	202.651.884		-	-	-	202.651.884
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33.498.945		-	-	-	33.498.945
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	690.590.000		-	-	-	690.590.000
Beban Barang Operasional Lainnya	746.013.019		-	-	-	746.013.019
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	989.200		-	-	-	989.200
Beban Bahan	257.520.395	-		-	-	257.520.395
Beban Barang Non Operasional Lainnya	644.062.000			-	-	644.062.000
Beban Langganan Listrik	1.458.320.187	-		-	15.741.243	1.474.061.430
Beban Langganan Telepon	135.007.896	-		-	2.840.647	137.848.543
Beban Langganan Air	129.064.059	-		-	4.632.922	133.696.981
Beban Sewa	1.226.333.206	-	-	-	(21.105.400)	1.205.227.806
Beban Jasa Profesi	10.300.000	-	-	-		10.300.000
Beban Jasa Lainnya	60.315.300					60.315.300
<b>Jumlah</b>	<b>11.581.750.214</b>				<b>2.109.412</b>	<b>11.583.859.626</b>

Penyesuaian akrua beban barang dan jasa yang berasal dari Utang Yang Belum Diterima Tagihannya adalah sebesar Rp.0,00. Penyesuaian akrua beban barang dan jasa yang berasal dari Belanja Yang Masih Harus Dibayar adalah sebesar Rp.0,00. Angka tersebut diperoleh dari penambahan saldo Belanjayang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dikurangi dengan saldo Belanja yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00

Penyesuaian Beban Akrua Lainnya sebesar Rp.2.109.412 terdiri atas penambahan Beban Langganan Listrik sebesar Rp.15.741.243, Beban Langganan Telepon sebesar Rp.2.840.647 dan Beban Langganan Air sebesar Rp.4.632.922, serta pengurangan Beban Sewa sebesar (Rp.21.105.400)

Beban Pemeliharaan  
Rp.4.937.938.323

#### D.6. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.937.938.323 dan Rp.4.390.475.718. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel D.20

Tabel D. 20. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.491.705.461	1.369.885.156	8,89
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.270.151.478	2.895.126.866	12,95
Beban Pemeliharaan Jaringan	26.341.200	23.748.425	10,92
Beban Pemeliharaan Lainnya	53.237.885	33.717.286	57,89
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	96.502.299	67.997.985	41,92
Beban Persediaan suku cadang	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.937.938.323</b>	<b>4.390.475.718</b>	<b>12,47</b>

Secara umum, terdapat kenaikan terhadap Beban Pemeliharaan. Jika dilihat berdasarkan akun, terdapat beban yang mengalami kenaikan paling besar secara nominal yaitu Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.375.024.612 atau 12,95 persen. Beban Pemeliharaan LO terbentuk dari belanja pemeliharaan LRA ditambah/dikurangi dengan penyesuaian akrual yaitu penyesuaian Utang Yang Belum Diterima Tagihannya, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, serta beban akrual (kode akun 59xxxx. Adapun pengakuan beban pemeliharaan akrual selama Tahun 2023 disajikan sebagaimana rincian tabel D.21

Tabel D. 21. Pengakuan Beban Pemeliharaan Akrual TA 2023

Uraian	LRA Netto	UYBDT	Saldo Akhir YMHD	Beban Akrual (59xxxx)	Beban Pemeliharaan Akrual
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.477.961.461	-	-	13.744.000	1.491.705.461
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.270.151.478	-	-	-	3.270.151.478
Beban Pemeliharaan Jaringan	26.341.200	-	-	-	26.341.200
Beban Pemeliharaan Lainnya	53.237.885	-	-	-	53.237.885
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	99.382.660	-	-	2.880.362	96.502.299
<b>Jumlah</b>	<b>4.927.074.684</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.863.639</b>	<b>4.937.938.323</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp.5.629.974.992

#### D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.629.974.992 dan Rp.4.831.684.146. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel D.22.

Tabel D.22. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	3.397.303.992	3.274.466.146	3,75
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.232.671.000	1.557.218.000	43,38
<b>Jumlah</b>	<b>5.629.974.992</b>	<b>4.831.684.146</b>	<b>16,52</b>

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
Rp.195.515.816

#### D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.195.515.816 dan Rp5.178.239. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 sebagaimana disajikan pada tabel D.23.

Tabel D. 23 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	30.015.816	5.178.239	479,65
Belanja Barang Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	165.500.000	0	
<b>Jumlah</b>	<b>195.515.816</b>	<b>5.178.239-</b>	<b>3.675,72</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp.6.340.103.095

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.340.103.095 dan Rp.6.699.794.189. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel D.24.

Tabel D. 24. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.138.045.744	3.534.086.167	(11,21)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.137.364.013	3.135.915.618	0,05
Beban Penyusutan Irigasi	19.948.400	19.948.400	-
Beban Penyusutan Jaringan	7.233.522	7.233.522	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	37.511.416	2.610.482	1.336,95
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>6.340.103.095</b>	<b>6.699.794.189</b>	<b>(5,37)</b>
Beban Amortisasi Software	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>6.340.103.095</b>	<b>6.699.794.189</b>	<b>(5,37)</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Rp.5.085.523.098

#### D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.085.523.098 dan Rp.6.867.588.213. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel D.25

Tabel D. 25 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 dan 2022

Uraian	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	6.140.168.053	7.684.448.928	(20,10)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	640.151	(1.376.750)	(146,50)
Beban Penyisihan Piutang PPN	(2.922.602)	311.100	(1.039,44)
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	(1.200.000)	1.200.000	(200,00)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(1.051.162.504)	(816.995.065)	28,66
<b>Jumlah</b>	<b>5.085.523.098,00</b>	<b>6.867.588.213</b>	<b>(25,95)</b>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional  
(Rp.81.869.624)

#### D.11. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Baik pada Tahun 2023 maupun tahun sebelumnya, kegiatan non operasional membukukan surplus/(Defisit). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp.82.092.224) dan Rp.240.510.338. sebagaimana disajikan pada tabel D.26

Tabel D. 26. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	31 Des 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	142.327.844	391.340.181	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.500.000	0	(63,25)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(225.920.068)	(150.829.843)	49,78
<b>Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>(82.827.844)</b>	<b>240.510.338</b>	<b>(134,13)</b>
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	-
<b>Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	222.600	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-
<b>Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>222.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>(81.869.624)</b>	<b>240.510.338</b>	<b>(65,96)</b>

Pos Luar Biasa Rp0

#### D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah nihil.

Ekuitas Awal

Rp.341.012.580.895

#### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

##### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 1 Januari 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.341.012.580.895 dan Rp.336.699.660.225.

Surplus LO

Rp.1.727.775.303.742

##### E.2. Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.1.726.775.303.742 dan Rp.4.713.795.392.644. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

Koreksi Yang

Menambah/

Mengurangi Ekuitas

Rp.156.640.273

##### E.3. Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.156.640.273 dan Rp.32.556.740. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas terdiri dari penyesuaian nilai aset, koreksi nilai persediaan, koreksi atas reklasifikasi, selisih revaluasi aset, koreksi nilai aset non revaluasi, dan koreksi lain-lain.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp.0,00

##### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp.509.822.168

##### E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.509.822.168 dan Rp.0,00.

Koreksi Atas

Reklasifikasi Rp.0,00

##### E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar nihil.

**E.3.4. Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset untuk periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar nihil.

Koreksi Aset Non Revaluasi Rp.0,00

**E.3.5. Koreksi Aset Non Revaluasi**

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.50.342.154. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain (Rp.353.181.895)

**E.3.6. Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah (Rp.353.181.895) dan (Rp.404.965). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas (Rp1.427.403.167.426)

**E.4. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp.1.427.403.167.426) dan (Rp.4.328.614.405.869). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Unaudited TA 2023 adalah sebagaimana disajikan pada tabel E.1

Tabel E. 1 Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2023

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	24.819.040.260
Diterima dari Entitas Lain	(1.769.116.498.017)
Transfer Keluar	(1.216.831.000)
Transfer Masuk	4.191.399.345
Pengesahan Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>(1.741.322.889.412)</b>

**E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Periode per tanggal 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp.24.819.040.260 dan DDEL sebesar Rp.1.769.116.498.017.

**E.4.2. Transfer Keluar/Transfer Masuk**

Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Nilai Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp.1.216.831.000). Saldo Transfer Keluar merupakan serah terima Aset Tetap dan Persediaan kepada satker-satker vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rincian nilai Transfer Keluar disajikan sebagaimana pada tabel E.2

Tabel E. 2 Rincian Nilai Transfer Keluar TA 2023

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
117111	Barang Konsumsi	-
117112	Amunisi	-
117114	Suku Cadang	-
132111	Peralatan dan Mesin	-
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.402.612.782. Saldo Transfer Masuk merupakan serah terima Aset Tetap dan Persediaan dari satker-satker vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rincian nilai Transfer Masuk disajikan sebagaimana pada tabel E.3.

Tabel E. 3 Rincian Nilai Transfer Masuk TA 2023

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
132111	Peralatan dan Mesin	235.000.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	171.913.820
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.302.038)
<b>Jumlah</b>		<b>402.612.782</b>

Ekuitas Akhir  
Rp.326.621.635.498

#### E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.326.621.635.498 dan Rp.341.370.909.371. Hal tersebut menandakan jika nilai ekuitas Tingkat UAPPA\_W Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengalami *penurunan* sebesar (Rp.14.749.273.873) atau sebesar 4,32 persen

#### F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

##### F.1. Rekening Pemerintah

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sampai dengan periode Unaudited TA 2023 memiliki dua rekening yang masih digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Virtual nomor 8100124117241000 pada Bank Mandiri digunakan untuk menampung Uang Persediaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- Rekening Giro nomor 1490012816940 pada Bank Mandiri digunakan untuk menampung sementara uang ganjaran/premi dan DOKPPN

Masing-masing saldo rekening pemerintah tersebut disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Lembaga, mulai tahun 2020 dilaksanakan restrukturisasi rekening pengeluaran Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga melalui tahapan dibukanya rekening induk dalam bentuk rekening giro untuk selanjutnya dilakukan perubahan rekening Satuan Kerja menjadi rekening virtual. Implementasi penuh restrukturisasi rekening bendahara pengeluaran DJBC telah selesai dilaksanakan pada Januari 2021 dengan dibukanya rekening induk pada 5 Bank Umum dan diubahnya rekening bendahara pengeluaran seluruh Satuan Kerja DJBC yang semula rekening giro menjadi rekening virtual, termasuk salah satunya rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

##### F.2. Pungutan Ekspor/Bea Keluar

Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.011/2008. dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005. yang urusan pemungutannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 oleh Direktorat Jenderal Anggaran

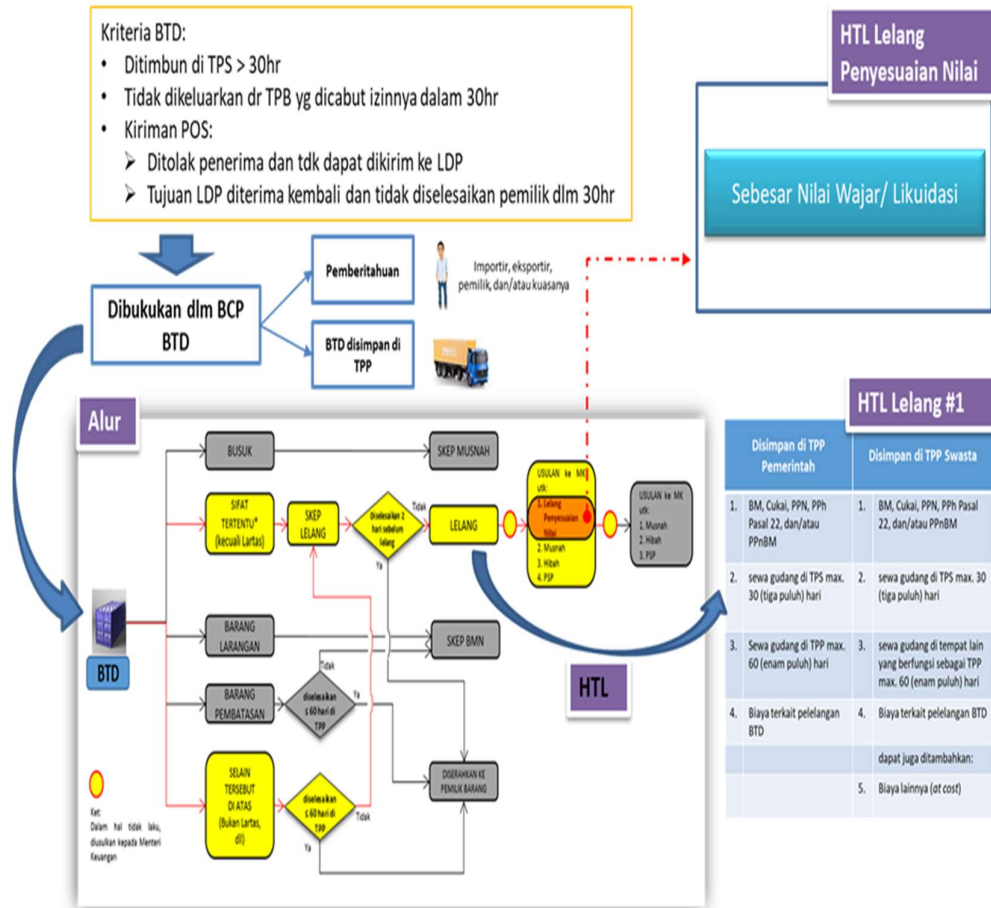
Direktorat Jenderal Anggaran pada awal Tahun 2009 melimpahkan pengelolaan PE kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga sampai saat ini pengelolaan PE dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengelolaan PE terdiri dari kewajiban berupa utang kepada pengguna jasa dan piutang pendapatan ekspor

**F.3. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK**

Daftar temuan BPK RI *Outstanding* dalam LHP sampai dengan tahun 2023 (Audited) serta tindak lanjut temuan tersebut sesuai Pembahasan Tindak Lanjut Tahun 2023 (Audited) dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

**F.4. Barang Milik Negara (BMN) Eks Kepabeanaan dan Cukai**

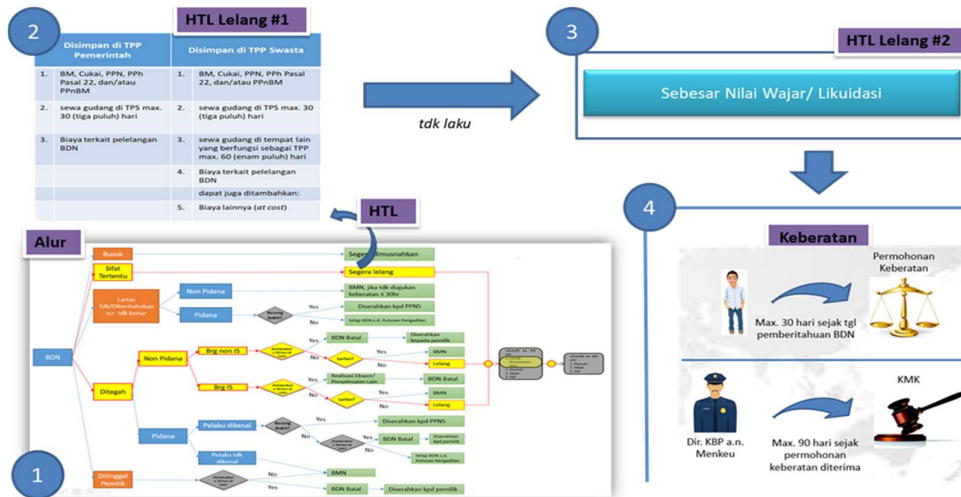
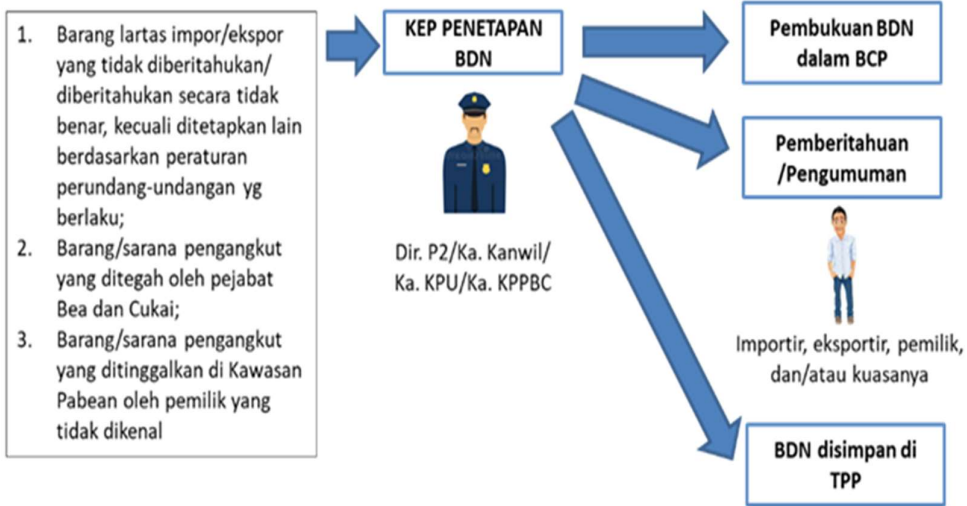
Kriteria, alur proses dan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BTD dapat digambarkan sebagai berikut:



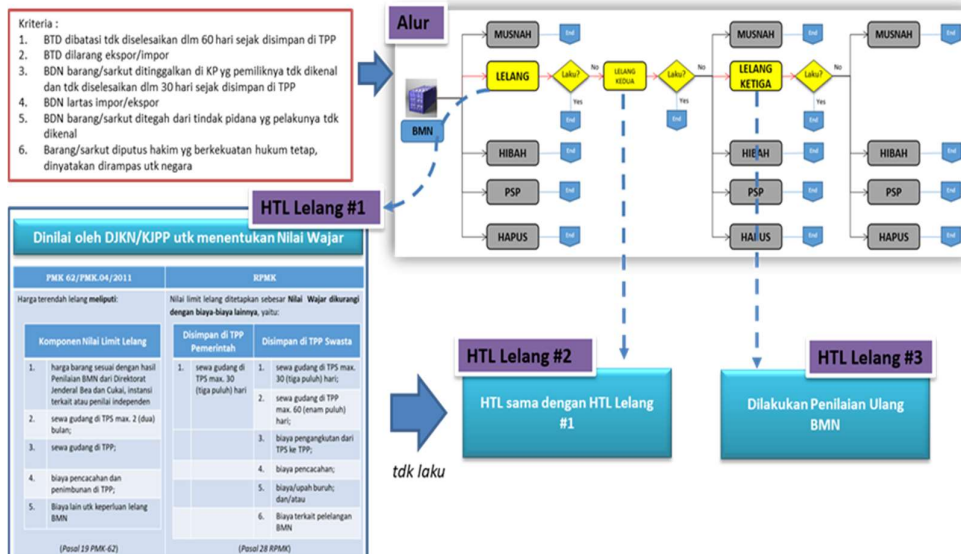
- 1) BTD dapat dilelang jika:
  - a) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, dan memiliki sifat tidak tahan lama, merusak, berbahaya dan pengurusannya memerlukan biaya tinggi; dan
  - b) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, namun tidak memiliki karakteristik sifat barang sebagaimana huruf a 1), dan tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).
- 2) BTD ditetapkan sebagai BMN apabila:
  - a) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang larangan,
  - b) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di TPP.

Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BDN adalah sebagai berikut:

**KRITERIA BDN:**



Sedangkan kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BMMN adalah sebagai berikut:



Berdasarkan prinsip kendali dan pemindahan kepemilikan, BTS dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset sedangkan BMMN memenuhi kriteria pengakuan aset. Berdasarkan alur proses BTS, BDN dan BMMN tersebut, BTS dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset karena belum adanya transfer kepemilikan kepada Pemerintah. BMMN secara kendali dan kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah sehingga memenuhi kriteria pengakuan aset

Selain PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dalam penatausahaan dan penyelesaian BMMN, DJBC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai. PMK 51/PMK.06/2021 merupakan ketentuan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Pada kedua PMK tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi aset negara dan perlu diungkapkan/disajikan dalam Laporan Keuangan DJBC adalah BMMN

Berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa **mulai Tahun 2023** aset yang berasal dari BTS, BDN, dan BMMN **disajikan pada Neraca untuk persetujuan Lelang, Hibah, serta Penetapan Status Penggunaan** sedangkan aset yang berasal dari BTS, BDN, dan BMMN **yang belum mendapatkan persetujuan atau yang mendapatkan persetujuan pemusnahan atau penghapusan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan** Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015. Penyajian BTS, BDN, BMMN dilakukan pada Laporan Keuangan Tahun 2023. Dalam rangka menyajikan saldo awal Persediaan BTS, BDN, dan BMMN pada Laporan Keuangan dilakukan DJBC harus melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN yang akan menjadi saldo awal Tahun 2023. Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN dilakukan dalam rangka memastikan eksistensi barang sebelum dicatat pada neraca Pemerintah Pusat. Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.06/2022 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai.

Penatausahaan dan pengelolaan BTS, BDN dan BMMN di lingkungan DJBC disusun oleh masing-masing satker dalam bentuk *excel atau google spreadsheet*. Hal ini berdampak pada tingkat akurasi dan keamanan data BTS, BDN dan BMMN yang dikelola oleh DJBC. Aplikasi CEISA Manifest yang digunakan untuk monitoring pos manifest yang terbuka dan pengelolaan BTS, BDN, BMMN saat ini masih dalam proses pengembangan. Aplikasi Pengelolaan BTS, BDN, BMMN, dan TPP masih dalam tahap penyempurnaan setelah dilakukan *User Acceptance Test (UAT)*.

Data BMMN yang diungkapkan pada CaLK DJBC Tahun 2023 merupakan data yang dikompilasi dari laporan masing-masing satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Teknis Kepabeanaan sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 PMK 178/PMK.04/2019. Format penyampaian Data BMMN Tahun 2023 ditentukan berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanaan nomor [ND-850/BC.02/2023 tanggal 3 Juli 2023](#). Proses validasi data BMMN Tahun 2023 dilakukan dengan cara melakukan pengecekan saldo awal BMMN dengan *outstanding* data BMMN per 31 Desember 2022 dan membandingkan data peruntukan BMMN dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh DJKN selaku Pengelola Barang.

Data BMMN yang diungkapkan pada Laporan Keuangan DJBC Tahun 2023 memiliki keterbatasan dalam hal nilai, validitas, dan kelengkapan. Adapun keterbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak semua barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara memiliki nilai perkiraan, hal ini disebabkan karena secara ketentuan yang diatur dalam pasal 32 PMK 178/PMK.04/2019 nilai perkiraan barang baru digunakan pada saat pengajuan usulan peruntukan dari DJBC ke Pengelola Barang;
2. Validitas dan kelengkapan data BMMN perlu diuji lebih lanjut dengan pengecekan fisik langsung.

Berdasarkan hasil kompilasi data BMMN dari satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta validasi saldo awal dan persetujuan peruntukan BMMN dari DJKN, data BMMN outstanding per 31 Desember 2023 yaitu 222 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp.4.937.484.804. Adapun ringkasan mutasi data BMMN pada Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagaimana table. F1

Tabel F. 1 Resume Mutasi BMMN Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Wajar
<b>Saldo Awal BMMN</b>		<b>160</b>	<b>4.151.761.199</b>
1	Koreksi Saldo Awal	0	-1.669.490.018
2	Mutasi Terbit BMMN Tahunan Tahun 2023	339	8.558.909.586
3	Penyelesaian BMMN Tahunan Tahun 2023	-277	-6.103.695.963
<b>Outstanding per 31 Desember 2023</b>		<b>222</b>	<b>4.937.484.804</b>

Untuk jumlah SKEP BMMN pada saldo awal TA 2023 berbeda dengan pengungkapan data *outstanding* pada Laporan Keuangan *Audited* TA 2022 dimana pada LK tahun sebelumnya dilaporkan sebanyak 160 SKEP BMMN *outstanding*. Adapun selisih 62 SKEP BMMN terjadi karena adanya kesalahan pencatatan nomor SKEP BMMN, misalnya nomor SKEP BMMN yang sama namun berbeda tanda baca seperti koma, titik, garis miring, atau spasi sehingga dikenali sebagai nomor SKEP yang berbeda. Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukan penyesuaian jumlah SKEP BMMN menjadi 160 SKEP BMMN dengan nilai yang sama dengan data *outstanding* pada TA 2022 yaitu sebesar Rp.4.151.761.199. Adapun Perubahan Jumlah SKEP BMMN pada Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagaimana table. F2

Tabel F.2 Perubahan Jumlah SKEP BMMN Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Wajar
<b>Saldo Awal BMMN Berdasarkan CaLK Audited 2022</b>		<b>160</b>	<b>4.151.761.199</b>
1	SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Status	0	0
2	SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Nomor	0	0
3	Kesalahan Pencatatan Nomor SKEP BMMN	0	0
<b>Saldo Awal BMMN Sebelumnya</b>		<b>160</b>	<b>4.151.761.199</b>

Adapun rincian mutase BMMN selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### 1. Koreksi Saldo Awal

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tidak terdapat BMMN yang *outstanding*. Adapun rincian koreksi saldo awal data BMMN dapat disajikan sebagaimana tabel F.3.

Tabel F. 3 Koreksi Saldo Awal BMMN Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
<b>Data outstanding BMMN Audited per 31 Desember 2022</b>		<b>160</b>	<b>4.151.761.199</b>
1	Koreksi Pencatatan	0	0
2	Koreksi Nilai	0	(1.758.111.859)
3	Data BMMN yang diselesaikan pada Tahun 2022 atau Tahun Sebelumnya	-1	(733.069)
4	Data BMMN yang tidak tercatat sebagai data <i>outstanding</i> BMMN Audited per 31 Desember 2022	1	89.354.910
5	Lebih dari satu status koreksi saldo awal	0	0
<b>Data saldo Awal BMMN Setelah Koreksi</b>		<b>160</b>	<b>2.482.271.181</b>

Koreksi Saldo Awal BMMN terdiri dari beberapa penyebab antara lain oleh hal-hal berikut.

- a. Adanya Koreksi pencatatan dimana terdapat data BMMN yang double catat atau terdapat kesalahan pencatatan lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F.4 Koreksi Pencatatan Awal BMMN Tahun 2023

No	Nama Satker	Jumlah SKEP BMMN	Nilai
1	Kanwil DJBC Kalbagtim	-	0
2	KPPBC TMP B Balikpapan	-	0
3	KPPBC TMP B Samarinda	-	0
4	KPPBC TMP B Tarakan	-	0
5	KPPBC TMP C Nunukan	-	0
6	KPPBC TMP C Bontang	-	0
7	KPPBC TMP C Sangatta	-	0
<b>Jumlah</b>		-	0

- b. Adanya kesalahan pencatatan atau terdapat *update* Nilai Perkiraan/Nilai Wajar atau pada saat Laporan BMMN *Audited* 2022 data BMMN tersebut belum memiliki nilai namun pada saat Laporan BMMN *Unaudited* 2023 nilai sudah tersedia. Adapun rincian koreksi nilai sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini. Untuk Jumlah SKEP dalam tabel adalah SKEP yang berubah nilainya namun tidak mempengaruhi koreksi jumlah SKEP.

Tabel F.5 Koreksi Nilai BMMN Tahun 2023

No	Nama Satker	Nilai
1	Kanwil DJBC Kalbagtim	0
2	KPPBC TMP B Balikpapan	97.178.123
3	KPPBC TMP B Samarinda	3.612.400
4	KPPBC TMP B Tarakan	0
5	KPPBC TMP C Nunukan	(31.066.554)
6	KPPBC TMP C Bontang	0
7	KPPBC TMP C Sangatta	0
<b>JUMLAH</b>		69.723.969

- a. Adanya data BMMN yang telah diselesaikan pada tahun 2022 atau tahun sebelumnya yang masih tercatat sebagai data *outstanding* per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F.6 Penyelesaian Data BMMN yang tercatat sebagai data *Outstanding* Tahun 2023

No	Nama Satker	Jumlah SKEP BMMN	Nilai
1	Kanwil DJBC Kalbagtim	-	0
2	KPPBC TMP B Balikpapan	1	733.069
3	KPPBC TMP B Samarinda	-	0
4	KPPBC TMP B Tarakan	-	0
5	KPPBC TMP C Nunukan	-	0
6	KPPBC TMP C Bontang	-	0
7	KPPBC TMP C Sangatta	-	0
<b>JUMLAH</b>		1	733.069

- b. Adanya data BMMN yang terbit sebelum tahun 2023 dan belum diselesaikan s.d 31 Desember 2022 namun tidak tercantum sebagai data *outstanding* BMMN per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F.7 Data BMMN yang tidak tercatat sebagai Data Outstanding Audited Tahun 2022

No	Nama Satker	Jumlah SKEP BMMN	Nilai
1	Kanwil DJBC Kalbagtim	-	0
2	KPPBC TMP B Balikpapan	-	0
3	KPPBC TMP B Samarinda	1	89.354.910
4	KPPBC TMP B Tarakan	-	0
5	KPPBC TMP C Nunukan	-	0
6	KPPBC TMP C Bontang	-	0
7	KPPBC TMP C Sangatta	-	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>89.354.910</b>

## 2. Mutasi BMMN Tahun 2023

Selama Unaudited TA 2023 telah terbit 1 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp.0,00 Adapun rincian mutasi terbit dan penyelesaian BMMN disajikan sebagai sebagaimana tabel F.5

Tabel F.8 Mutasi BMMN Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
<b>Mutasi Terbit BMMN Unaudited 2023</b>		<b>339</b>	<b>8.558.909.586</b>
<b>Penyelesaian BMMN Unaudited 2023</b>		<b>282</b>	<b>6.103.695.963</b>
1	Hibah	22	165.500.000
2	Pembatalan SKEP BMMN	-	-
3	Pemusnahan	260	5.938.195.963
4	Penetapan Status Penggunaan	-	-
5	Penghapusan	-	-
6	Penjualan Secara Lelang	-	-

Penyelesaian BMMN selama TA 2023 terdiri dari peruntukan berikut ini.

- a. Hibah merupakan transaksi pemberian BMMN kepada satuan kerja pemerintah daerah atau organisasi non profit yang bergerak dibidang kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, atau kemanusiaan. Adapun mutasi berupa hibah pada TA 2023 sebanyak 23 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp.165.500.000 dengan rincian satker sebagai berikut.

Tabel F.9 Penyelesaian BMMN dengan Hibah Tahun 2023

No	Nama Satker	Penerima Hibah	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan
1	Kanwil DJBC Kalbagtim	-	-	0
2	KPPBC TMP B Balikpapan	-	-	0
3	KPPBC TMP B Samarinda	-	-	0
4	KPPBC TMP B Tarakan	-	-	0
5	KPPBC TMP C Nunukan	Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan	22	165.500.000
6	KPPBC TMP C Bontang	-	-	0
7	KPPBC TMP C Sangatta	-	-	0
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>	<b>165.500.000</b>

- b. Pembatalan SKEP BMMN tidak terdapat pada Satker-satker di wilayah kerja Kanwil DJBC Kalbagtim, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F.10 Pembatalan SKEP BMMN Tahun 2023

No	Nama Satker	SKEP BMMN	Tanggal SKEP BMMN	Alasan Pembatalan
1	Kanwil DJBC Kalbagtim	-	-	-
2	KPPBC TMP B Balikpapan	-	-	-
3	KPPBC TMP B Samarinda	-	-	-
4	KPPBC TMP B Tarakan	-	-	-
5	KPPBC TMP C Nunukan	-	-	-
6	KPPBC TMP C Bontang	-	-	-
7	KPPBC TMP C Sangatta	-	-	-

- c. Pemusnahan diperuntukan bagi BMMN yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan, atau yang tidak mempunyai nilai ekonomis atau yang dilarang diekspor atau diimpor atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan. Pada TA 2023, DJBC telah melakukan pemusnahan atas 260 SKEP BMMN senilai Rp. 5.938.195.963.
- d. Penetapan Status Penggunaan (PSP) diperuntukan bagi BMMN yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Pada Tahun 2023 tidak terdapat Penetapan Status Penggunaan atas 0 SKEP BMMN senilai Rp.0,00.
- e. Penghapusan merupakan peruntukan untuk menghapuskan pencatatan BMMN karena mengalami penyusutan atau hilang. Pada Tahun 2023 belum terdapat Persetujuan Penghapusan atas BMMN.
- f. Penjualan Secara Lelang merupakan peruntukan yang secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada TA 2023, Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim belum melakukan penjualan secara lelang. Adapun rincian BMMN yang laku lelang sampai dengan 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut.

Tabel F.11 Penjualan BMMN Secara Lelang Tahun 2023

No	Nama Satker	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Wajar
1	Kanwil DJBC Kalbagtim	-	-
2	KPPBC TMP B Balikpapan	-	-
3	KPPBC TMP B Samarinda	-	-
4	KPPBC TMP B Tarakan	-	-
5	KPPBC TMP C Nunukan	-	-
6	KPPBC TMP C Bontang	-	-
7	KPPBC TMP C Sangatta	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

- g. Berdasarkan tabel F.3 dan F.9 terdapat perbedaan jumlah SKEP BMMN atas Penyelesaian BMMN Tahun 2023 yaitu sebanyak 23 SKEP BMMN (222 SKEP BMMN – 160 SKEP BMMN). Adapun selisih tersebut merupakan SKEP BMMN yang diselesaikan dengan 2 jenis peruntukan yang berbeda sehingga perhitungan SKEP BMMN hanya dilakukan sekali.

Tabel F. 12 Penyelesaian Selisih BMMN Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	SKEP BMMN yang harus diselesaikan sebagai	0	0
2	SKEP BMMN yang diselesaikan dengan 2 jenis peruntukan yang berbeda	5	0
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 3 terdapat perbedaan jumlah SKEP BMMN atas Penyelesaian BMMN Tahunan Tahun 2023 yaitu sebanyak 5 SKEP BMMN (282 SKEP BMMN – 277 SKEP BMMN). Adapun selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) 0 SKEP merupakan SKEP BMMN yang hanya selesai sebagian sehingga jumlah SKEP ini tidak dihitung dalam penyelesaian karena masing dianggap outstanding;
- 2) 5 SKEP merupakan SKEP BMMN yang diselesaikan dengan 2 jenis peruntukan yang berbeda sehingga perhitungan SKEP BMMN hanya dilakukan sekali.

**3. SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2023**

Adapun total SKEP BMMN yang belum diselesaikan s.d. 31 Desember 2023 adalah sebanyak 200 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp.2.864.510.364, dengan rincian sebagaimana tabel F.13.

Tabel F.13 SKEP BMMN Masih Belum Diselesaikan s.d. 31 Desember 2023

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	Hibah	0	0
2	Pemusnahan	22	1.270.813.440
3	Penjualan Secara Lelang	1	502.161.000
4	Belum Ada Peruntukan	200	2.864.510.364
<b>JUMLAH</b>		<b>224</b>	<b>4.637.484.804</b>

Data Outstanding BMMN per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

SKEP BMMN yang telah mendapatkan SKEP Peruntukan adalah sebanyak 24 SKEP dengan nilai Rp.1.772.974.440 yang terdiri dari:

Pemusnahan sebanyak 22 SKEP dengan nilai Rp.1.270.813.440, Penjualan Secara Lelang sebanyak 1 SKEP dengan nilai Rp.502.161.000. SKEP BMMN yang belum mendapatkan SKEP Peruntukan adalah sebanyak 200 SKEP dengan nilai Rp.2.864.510.364.

Berdasarkan tabel F.1 dan tabel F.3 terdapat perbedaan jumlah SKEP BMMN outstanding yaitu sebanyak 2 SKEP BMMN. Adapun selisih tersebut merupakan SKEP BMMN outstanding yang memiliki lebih dari 1 status peruntukan, dengan nilai (Rp.300.000.000)

No	Keterangan	Jumlah SKEP BMMN	Nilai Perkiraan/ Nilai Limit
1	SKEP BMMN outstanding memiliki lebih dari 1 status peruntukan	2	(300.000.000)
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>(300.000.000)</b>

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 6 terdapat perbedaan jumlah SKEP BMMN outstanding yaitu sebanyak 2 SKEP BMMN (224 SKEP BMMN – 222 SKEP BMMN). Adapun selisih tersebut merupakan SKEP BMMN outstanding memiliki lebih dari 1 status peruntukan atau dalam 1 SKEP terdapat sebagian data yang telah mendapatkan peruntukan dan sebagian lagi belum selesai.

**F.5. Capaian, Realisasi Belanja dan Output Program Prioritas Nasional pada DJBC - National Logistic Ecosystem (NLE)**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) berupa Program Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE), yaitu program yang mendukung PN I (Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan). Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output sebagaimana disajikan pada tabel F.14

Tabel F. 14 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Program NLE Tahun 2023

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
<b>Jumlah</b>							

**F.6. Rekonsiliasi Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pengembalian Pendapatan Perpajakan**

Proses rekonsiliasi Unaudited Tahun 2023 dilaksanakan sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-21/PB/PB.6/2023 tanggal 05 Juli 2023 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Unaudited Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data SAI yang ada pada aplikasi SAKTI dengan data SAU melalui monitoring rekonsiliasi yang terdapat pada aplikasi MONSAKTI. MONSAKTI sendiri merupakan aplikasi berbasis Website dengan alamat <https://monsakti.kemenkeu.go.id>. Setiap satuan kerja sebagai UAKPA berkewajiban melaksanakan rekonsiliasi bulanan terhadap data DIPA, realisasi belanja, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan dan realisasi PNPB dengan memantaunya melalui aplikasi MONSAKTI. Masing-masing UAKPA agar menyelesaikan rekonsiliasi dan mendapatkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Untuk periode rekonsiliasi Juni 2023 ini, seluruh UAKPA lingkup DJBC telah melaksanakan rekonsiliasi dan tidak terdapat selisih nilai ataupun TDK yang berarti, namun belum semuanya mendapatkan SHR, hal tersebut karena masih dikembangkannya aplikasi MONSAKTI. Selanjutnya untuk proses penyusunan Laporan Keuangan sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan diatas dilakukan melalui cetakan pada Aplikasi SAKTI, mengingat sudah seluruh Kementerian/Lembaga menggunakan Aplikasi SAKTI.

**F.7. Upaya Hukum Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali**

Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai akan menimbulkan ketidakadilan terhadap Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Terhadap sengketa pajak tersebut dapat dilakukan upaya hukum oleh wajib pajak berupa keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

Pengajuan keberatan dilakukan dalam hal wajib pajak merasa tidak puas atau tidak tepat dalam penetapan pemungutan atau pemotongan pajak oleh Pejabat Bea dan Cukai. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 dapat dilakukan mengenai:

- a) Kekurangan cukai; dan/atau
- b) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda

Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Unaudited 2023, penetapan DJBC yang diajukan keberatan masih dalam proses keberatan sebesar Rp0,00 sebagaimana table F.15

Tabel F.15 Rincian Proses Upaya Hukum Keberatan

Satuan Kerja (kantor monitoring)	Nilai	Dokumen
Kanwil DJBC Kalbagtim	-	-
KPPBC TMP B Balikpapan	-	-
KPPBC TMP B Samarinda	-	-
KPPBC TMP B Tarakan	-	-
KPPBC TMP C Nunukan	-	-
KPPBC TMP C Bontang	-	-
KPPBC TMP C Sangatta	-	-
<b>Total</b>	-	-

Adapun perubahan data pengajuan keberatan yang terdapat pada DJBC tersaji sebagaimana tabel F.16

Tabel F.16. Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Keberatan

Keterangan	Dokumen	Nilai
Data Outstanding per 31 Desember 2022	-	
Data Tahun Berjalan (periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023)	-	
Sudah Putusan sampai dengan 31 Desember 2023	-	
<b>Data Outstanding per 31 Desember 2023</b>	-	-

Selain upaya hukum keberatan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal masih merasa tidak puas atas keputusan keberatan terkait pemungutan atau pemotongan pajak merupakan banding. Pengajuan banding disampaikan ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode per tanggal 31 Desember 2023, penetapan DJBC yang diajukan banding masih dalam proses sebesar Rp.0,00 sebagaimana tabel F.17

Tabel F.17. Rincian Proses Upaya Hukum Banding

Kantor Penetapan	Nilai Tagihan	Dokumen
KANWIL KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-

Adapun perubahan data pengajuan banding yang terdapat pada DJBC tersaji sebagaimana tabel F.18

Tabel F.18. Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Banding

Keterangan	Jumlah Dokumen	Nilai (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	-	-
Koreksi Salah catat nilai (20 dokumen)	-	-
Saldo Awal per 1 Januari 2023	-	-
Penambahan Data Tahun Berjalan (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023)	-	-
Sudah Mendapat Putusan Banding	-	-
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023</b>	-	-

Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. pengajuan peninjauan

kembali sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 91 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan periode Unaudited 2023, penetapan DJBC yang diajukan peninjauan kembali masih dalam proses sebesar Rp446.540.540.264 sebagaimana table F.19

Tabel F.19. Rincian Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali

KANTOR PENERBIT	JUMLAH DOKUMEN	NILAI
-	-	-
<b>Grand Total</b>	-	-

Adapun perubahan data peninjauan kembali yang terdapat pada DJBC tersaji sebagaimana tabel F.20

Tabel F.20 Rincian Mutasi Data Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Keterangan	Jumlah Dokumen	Nilai (Rp)
Data Outstanding per 31 Desember 2022	-	0
Koreksi kesalahan format angka (6 dokumen)	-	0
Data Setelah Koreksi	-	0
Data Tahun Berjalan (1 Januari s.d. 31 Desember 2023)	-	0
Sudah Putusan PK	-	0
<b>Data Outstanding per 31 Desember 2023</b>	-	<b>0</b>



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
UAPPAAW : KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR 01505014KD

Tgl Data : 13/05/24 6:27 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 1:05 PM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_uappaw\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>26,822,590,000</b>	<b>24,819,040,260</b>	<b>(2,003,549,740)</b>	<b>93</b>	<b>22,358,451,000</b>	<b>21,134,313,119</b>	<b>(1,224,137,881)</b>	<b>95</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
ESELON I  
WILAYAH/PROVINSI**

**: 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
: 05 DITJEN BEA DAN CUKAI  
: 01505014KD KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 13/05/24 1:12 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw--rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	5,779,757,000	6,000,080,000	5,878,970,123	0	5,878,970,123	97.98	121,109,877
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	108,684,000	126,444,000	108,114,000	0	108,114,000	85.5	18,330,000
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	297,349,000	215,868,000	202,651,884	0	202,651,884	93.88	13,216,116
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	64,080,000	52,019,000	33,498,945	0	33,498,945	64.4	18,520,055
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	698,616,000	703,812,000	690,590,000	0	690,590,000	98.12	13,222,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	911,679,000	773,432,000	746,013,019	0	746,013,019	96.45	27,418,981
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16,600,000	6,600,000	989,200	0	989,200	14.99	5,610,800
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,876,765,000	7,878,255,000	7,660,827,171	0	7,660,827,171	97.24	217,427,829
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	273,335,000	283,005,000	257,520,395	0	257,520,395	90.99	25,484,605
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	851,583,000	740,499,000	644,062,000	0	644,062,000	86.98	96,437,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>							
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	351,000,000	324,104,000	296,803,149	0	296,803,149	91.58	27,300,851
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	216,976,000	205,606,000	188,947,695	0	188,947,695	91.9	16,658,305
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>							
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,381,689,000	1,500,229,000	1,458,320,187	0	1,458,320,187	97.21	41,908,813
522112	Belanja Langganan Telepon	281,400,000	152,797,000	135,007,896	0	135,007,896	88.36	17,789,104
522113	Belanja Langganan Air	134,071,000	149,235,000	131,584,405	2,520,346	129,064,059	86.48	20,170,941
522141	Belanja Sewa	1,380,961,000	1,260,769,000	1,226,333,206	0	1,226,333,206	97.27	34,435,794
522151	Belanja Jasa Profesi	12,200,000	17,740,000	10,300,000	0	10,300,000	58.06	7,440,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	96,500,000	95,236,000	60,315,300	0	60,315,300	63.33	34,920,700
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,700,000	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>							
5231	Belanja Pemeliharaan	3,306,521,000	3,176,006,000	3,021,860,994	2,520,346	3,019,340,648	95.15	156,665,352
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,545,161,000	1,573,783,000	1,477,961,461	0	1,477,961,461	93.91	95,821,539
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126,000,000	125,420,000	112,798,710	0	112,798,710	89.94	12,621,290
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,714,444,000	3,761,075,000	3,270,151,478	0	3,270,151,478	86.95	490,923,522

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
ESELON I  
WILAYAH/PROVINSI**

**: 015  
: 05  
: 01505014KD**

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 13/05/24 1:12 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_uappaw--rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	17,040,000	28,020,000	26,341,200	0	26,341,200	94.01	1,678,800
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	190,045,000	190,045,000	189,897,912	0	189,897,912	99.92	147,088
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	49,600,000	54,600,000	53,237,885	0	53,237,885	97.51	1,362,115
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>5,645,290,000</b>	<b>5,733,943,000</b>	<b>5,130,388,646</b>	<b>0</b>	<b>5,130,388,646</b>	<b>89.47</b>	<b>603,554,354</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,626,999,000	3,795,883,000	3,401,819,203	4,515,211	3,397,303,992	89.5	398,579,008
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,479,058,000	2,505,796,000	2,232,671,000	0	2,232,671,000	89.1	273,125,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>6,106,057,000</b>	<b>6,301,679,000</b>	<b>5,634,490,203</b>	<b>4,515,211</b>	<b>5,629,974,992</b>	<b>89.41</b>	<b>671,704,008</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>24,627,527,000</b>	<b>24,643,097,000</b>	<b>22,834,900,253</b>	<b>7,035,557</b>	<b>22,827,864,696</b>	<b>92.66</b>	<b>1815232304</b>
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,026,000,000	964,600,000	942,300,000	0	942,300,000	97.69	22,300,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>1,026,000,000</b>	<b>964,600,000</b>	<b>942,300,000</b>	<b>0</b>	<b>942,300,000</b>	<b>97.69</b>	<b>22,300,000</b>
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,076,900,000	393,096,000	1,232,185,464	904,645,200	327,540,264	83.32	65,555,736
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	821,797,000	721,335,300	0	721,335,300	87.78	100,461,700
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331</b>	<b>4,076,900,000</b>	<b>1,214,893,000</b>	<b>1,953,520,764</b>	<b>904,645,200</b>	<b>1,048,875,564</b>	<b>160.8</b>	<b>166,017,436</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>5,102,900,000</b>	<b>2,179,493,000</b>	<b>2,895,820,764</b>	<b>904,645,200</b>	<b>1,991,175,564</b>	<b>132.87</b>	<b>188317436</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>29,730,427,000</b>	<b>26,822,590,000</b>	<b>25,730,721,017</b>	<b>911,680,757</b>	<b>24,819,040,260</b>	<b>95.93</b>	<b>2,003,549,740</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**WILAYAH/PROVINSI** : 01505014KD

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Kode Lap : LRA.P.W.1

Tanggal : 13/05/24 1:12 PM

Halaman : 1

Prig ID : lap\_lra\_pend\_akun\_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
41	PENDAPATAN PERPAJAKAN					
4115	Pendapatan Cukai					
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembaku	3,509,902,000	4,275,114,000	0	4,275,114,000	121.8
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	2,922,002,000	0	2,922,002,000	0
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	0	6,393,000	0	6,393,000	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4115</b>	<b>3,509,902,000</b>	<b>7,203,509,000</b>	<b>0</b>	<b>7,203,509,000</b>	<b>205.23</b>
4121	Pendapatan Bea Masuk					
412111	Pendapatan Bea Masuk	1,120,824,164,000	1,131,392,879,000	439,331,000	1,130,953,548,000	100.9
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	7,817,018,000	0	7,817,018,000	0
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	0	3,808,000	0	3,808,000	0
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	515,853,000	0	515,853,000	0
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	579,046,000	0	579,046,000	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4121</b>	<b>1,120,824,164,000</b>	<b>1,140,308,604,000</b>	<b>439,331,000</b>	<b>1,139,869,273,000</b>	<b>101.7</b>
4122	Pendapatan Bea Keluar					
412211	Pendapatan Bea Keluar	1,083,436,844,000	621,041,271,000	0	621,041,271,000	57.32
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	0	95,000	0	95,000	0
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	15,000	0	15,000	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4122</b>	<b>1,083,436,844,000</b>	<b>621,041,381,000</b>	<b>0</b>	<b>621,041,381,000</b>	<b>57.32</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 41</b>	<b>2,207,770,910,000</b>	<b>1,768,553,494,000</b>	<b>439,331,000</b>	<b>1,768,114,163,000</b>	<b>80.09</b>
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,500,000	0	1,500,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	249,669,000	142,327,844	0	142,327,844	57.01
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	162,438,000	0	0	0	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251</b>	<b>412,107,000</b>	<b>143,827,844</b>	<b>0</b>	<b>143,827,844</b>	<b>34.9</b>
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	152,807,782	0	152,807,782	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	687,464,791	0	687,464,791	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258</b>	<b>0</b>	<b>840,272,573</b>	<b>0</b>	<b>840,272,573</b>	<b>0</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT WILAYAH  
MENURUT AKUN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA** : 015  
**WILAYAH/PROVINSI** : 01505014KD

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Kode Lap : LRA.P.W.1  
Tanggal : 13/05/24 1:12 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_pend\_akun\_uappaw--rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	222,600	0	222,600	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	18,012,000	0	18,012,000	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259</b>	0	18,234,600	0	18,234,600	
	<b>JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42</b>	412,107,000	1,002,335,017	0	1,002,335,017	243.22
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	2,208,183,017,000	1,769,555,829,017	439,331,000	1,769,116,498,017	80.12

**NERACA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI**

**UAPPAW : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:05 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_uappaw\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Penerimaan	1,970	17,962,000	(17,960,030)	(99.99)
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,022,295,001	2,839,530,100	1,182,764,901	41.65
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	21,105,400	0	21,105,400	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	389,926,000	0	389,926,000	0.00
Piutang Perpajakan	71,831,317,520	78,776,260,536	(6,944,943,016)	(8.82)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	(68,532,779,277)	(69,596,205,826)	1,063,426,549	(1.53)
<b>PIUTANG PERPAJAKAN (NETTO)</b>	<b>3,298,538,243</b>	<b>9,180,054,710</b>	<b>(5,881,516,467)</b>	<b>(64.07)</b>
Piutang Bukan Pajak	13,503,699,772	13,804,087,754	(300,387,982)	(2.18)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(13,503,699,772)	(7,693,871,748)	(5,809,828,024)	75.51
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>0</b>	<b>6,110,216,006</b>	<b>(6,110,216,006)</b>	<b>(100.00)</b>
Persediaan	1,491,349,940	1,001,611,876	489,738,064	48.89
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>9,223,216,554</b>	<b>19,149,374,692</b>	<b>(9,926,158,138)</b>	<b>(51.84)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	254,604,310,000	256,961,141,000	(2,356,831,000)	(0.92)
Peralatan dan Mesin	62,929,385,584	59,743,458,654	3,185,926,930	5.33
Gedung dan Bangunan	77,861,754,949	78,102,756,649	(241,001,700)	(0.31)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	432,568,000	432,568,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	327,540,264	0	327,540,264	0.00
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(75,608,708,902)</b>	<b>(70,481,118,595)</b>	<b>(5,127,590,307)</b>	<b>7.28</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>320,546,849,895</b>	<b>324,758,805,708</b>	<b>(4,211,955,813)</b>	<b>(1.30)</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	3,500,000	3,500,000	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(3,500,000)	(3,500,000)	0	0.00
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	3,220,740,474	889,351,238	2,331,389,236	262.14
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>	<b>(1,797,369,869)</b>	<b>(830,506,426)</b>	<b>(966,863,443)</b>	<b>116.42</b>
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1,423,370,605</b>	<b>58,844,812</b>	<b>1,364,525,793</b>	<b>2,318.85</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>331,193,437,054</b>	<b>343,967,025,212</b>	<b>(12,773,588,158)</b>	<b>(3.71)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,160,424,030	2,954,444,317	1,205,979,713	40.82
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>4,160,424,030</b>	<b>2,954,444,317</b>	<b>1,205,979,713</b>	<b>40.82</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>4,160,424,030</b>	<b>2,954,444,317</b>	<b>1,205,979,713</b>	<b>40.82</b>
<b>EKUITAS</b>				

**NERACA**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI**

**UAPPAW : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:05 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_uappaw\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	327,033,013,024	341,012,580,895	(13,979,567,871)	(4.10)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>327,033,013,024</b>	<b>341,012,580,895</b>	<b>(13,979,567,871)</b>	<b>(4.10)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>327,033,013,024</b>	<b>341,012,580,895</b>	<b>(13,979,567,871)</b>	<b>(4.10)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>331,193,437,054</b>	<b>343,967,025,212</b>	<b>(12,773,588,158)</b>	<b>(3.71)</b>

Keterangan :

FINAL

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI

WILAYAH/PROVINSI : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:08 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	24,819,040,260
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,769,116,498,017	0
3.0	411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	4,275,114,000
3.0	411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	2,922,002,000
3.0	411519	Pendapatan Cukai Lainnya	0	6,393,000
3.0	412111	Pendapatan Bea Masuk	0	1,131,392,879,000
3.0	412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	7,817,018,000
3.0	412119	Pendapatan Pabean Lainnya	0	3,808,000
3.0	412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	515,853,000
3.0	412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	579,046,000
3.0	412211	Pendapatan Bea Keluar	0	621,041,271,000
3.0	412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	0	95,000
3.0	412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	15,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,500,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	142,327,844
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	152,807,782
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	687,464,791
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	222,600
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	18,012,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,878,970,123	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	108,114,000	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	202,651,884	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33,498,945	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	690,590,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	746,013,019	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	989,200	0
3.0	521211	Belanja Bahan	257,520,395	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	644,062,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	296,803,149	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	188,947,695	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,458,320,187	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	135,007,896	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	131,584,405	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,226,333,206	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	10,300,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	60,315,300	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,477,961,461	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	112,798,710	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI

WILAYAH/PROVINSI : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:08 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,270,151,478	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	26,341,200	0
3.0	523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	189,897,912	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	53,237,885	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,401,819,203	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,232,671,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	942,300,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,232,185,464	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	721,335,300	0
3.1	412111	Pengembalian Pendapatan Bea Masuk	439,331,000	0
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	2,520,346
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	4,515,211
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	904,645,200
JUMLAH			<b>1,795,286,550,034</b>	<b>1,795,286,550,034</b>

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI

WILAYAH/PROVINSI : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:08 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	1,970	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	4,022,295,001	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	21,105,400	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	389,926,000	0
0.0	115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	453,648,075	0
0.0	115132	Piutang PPN Impor	261,659,586	0
0.0	115163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2,610,445,000	0
0.0	115181	Piutang Bea masuk	12,995,314,745	0
0.0	115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	11,098,291,038	0
0.0	115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	24,167,248,191	0
0.0	115185	Piutang Pajak/pungutan ekspor	14,418,318,839	0
0.0	115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	5,826,392,046	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	13,503,699,772	0
0.0	116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non	0	2,268,241
0.0	116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN	0	1,308,298
0.0	116116	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea	0	2,610,445,000
0.0	116118	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak	0	65,918,757,738
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	13,503,699,772
0.0	117111	Barang Konsumsi	742,571,625	0
0.0	117112	Amunisi	200,535,567	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	23,829,619	0
0.0	117114	Suku Cadang	580,000	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	3,696,344	0
0.0	117151	Persediaan BTM, BDN, dan BMMN	502,161,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	17,975,785	0
0.0	131111	Tanah	254,604,310,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	62,929,385,584	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	77,861,754,949	0
0.0	134112	Irigasi	199,484,000	0
0.0	134113	Jaringan	233,084,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	327,540,264	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	56,186,925,231
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	19,277,694,458
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	49,871,000
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	94,218,213
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	3,500,000	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	3,500,000
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	3,220,740,474	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI

WILAYAH/PROVINSI : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:08 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	1,797,369,869
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	138,129,029
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	4,022,295,001
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	24,819,040,260
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,769,116,498,017	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,216,831,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	4,191,399,345
0.0	391111	Ekuitas	0	341,012,580,895
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	509,822,168
0.0	391119	Koreksi Lainnya	353,181,895	0
3.0	411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	128,030,075
3.0	411212	Pendapatan PPN Impor	584,520,414	0
3.0	411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	4,227,114,000
3.0	411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	2,730,002,000
3.0	411519	Pendapatan Cukai Lainnya	0	6,393,000
3.0	412111	Pendapatan Bea Masuk	0	1,125,916,071,000
3.0	412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	7,768,040,000
3.0	412119	Pendapatan Pabean Lainnya	0	1,447,000
3.0	412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	515,853,000
3.0	412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	579,046,000
3.0	412211	Pendapatan Bea Keluar	0	620,303,183,772
3.0	412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	0	95,000
3.0	412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	15,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,500,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	142,327,844
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,970
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	152,807,782
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	1,047,806,878
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	222,600
3.0	491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan	0	165,500,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5,878,970,123	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	108,114,000	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	202,651,884	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33,498,945	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	690,590,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	746,013,019	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	989,200	0
3.0	521211	Beban Bahan	257,520,395	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI

WILAYAH/PROVINSI : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:08 PM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	644,062,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,474,061,430	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	137,848,543	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	133,696,981	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,205,227,806	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	10,300,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	60,315,300	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,491,705,461	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,270,151,478	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	26,341,200	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	53,237,885	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,397,303,992	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,232,671,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,138,045,744	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,137,364,013	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	19,948,400	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	7,233,522	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	37,511,416	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,721,531,091	0
3.0	593112	Beban Persediaan amunisi	83,824,845	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	96,502,299	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	30,015,816	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	165,500,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	110,064,285	0
3.0	594112	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Non	640,151	0
3.0	594113	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPN	0	2,922,602
3.0	594116	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai	0	1,200,000
3.0	594118	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak	0	1,051,162,504
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	6,140,168,053	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	225,920,068	0
JUMLAH			<b>2,298,880,066,545</b>	<b>2,298,880,066,545</b>

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:04 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_uappaw

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	128,030,075	(286,066,000)	414,096,075	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	(584,520,414)	19,337,000	(603,857,414)	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	6,963,509,000	1,784,243,000	5,179,266,000	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	1,134,780,457,000	1,320,826,215,581	(186,045,758,581)	-
Pendapatan Bea Keluar	620,303,293,772	3,407,850,612,000	(2,787,547,318,228)	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	1,761,590,769,433	4,730,194,341,581	(2,968,603,572,148)	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,366,116,630	17,548,536,152	(16,182,419,522)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,366,116,630	17,548,536,152	(16,182,419,522)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,762,956,886,063	4,747,742,877,733	(2,984,785,991,670)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	0	0	0	-
Beban Persediaan	1,915,420,221	1,058,648,412	856,771,809	-
Beban Barang dan Jasa	11,583,859,626	10,725,916,691	857,942,935	-
Beban Pemeliharaan	4,937,938,323	4,390,475,718	547,462,605	-
Beban Perjalanan Dinas	5,629,974,992	4,831,684,146	798,290,846	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	195,515,816	5,178,239	190,337,577	-
Beban Bunga	0	0	0	-

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT WILAYAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Tgl Data : 14/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 14/05/24 1:04 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_uappaw

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,340,103,095	6,699,794,189	(359,691,094)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5,085,523,098	6,867,588,213	(1,782,065,115)	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>35,688,335,171</b>	<b>34,579,285,608</b>	<b>1,109,049,563</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>1,727,268,550,892</b>	<b>4,713,163,592,125</b>	<b>(2,985,895,041,233)</b>	-
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(82,092,224)	240,510,338	(322,602,562)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	143,827,844	391,340,181	(247,512,337)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	225,920,068	150,829,843	75,090,225	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	222,600	0	222,600	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	222,600	0	222,600	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(81,869,624)</b>	<b>240,510,338</b>	<b>(322,379,962)</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>1,727,186,681,268</b>	<b>4,713,404,102,463</b>	<b>(2,986,217,421,195)</b>	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>1,727,186,681,268</b>	<b>4,713,404,102,463</b>	<b>(2,986,217,421,195)</b>	-

Keterangan :

FINAL

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN BEA DAN CUKAI

WILAYAH/PROVINSI : ( 01505014KD ) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 1:04 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_uappaw

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	341,012,580,895	336,699,660,225	4,312,920,670	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	1,727,186,681,268	4,713,404,102,463	(2,986,217,421,195)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	156,640,273	32,556,740	124,083,533	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	509,822,168	0	509,822,168	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	32,961,705	(32,961,705)	-
LAIN-LAIN	(353,181,895)	(404,965)	(352,776,930)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,741,322,889,412)	(4,709,123,738,533)	2,967,800,849,121	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(13,979,567,871)	4,312,920,670	(18,292,488,541)	-
EKUITAS AKHIR	327,033,013,024	341,012,580,895	(13,979,567,871)	-

Keterangan :

FINAL



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 411724  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,440,923,000	4,440,923,000	0
2	Belanja	4,200,600,023	4,200,600,023	0
3	Pengembalian Belanja	-4,935,557	-4,935,557	0
4	Estimasi Pendapatan	134,801,000	134,801,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 27-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 411259  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,825,864,000	5,825,864,000	0
2	Belanja	5,441,329,409	5,441,329,409	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	4,490,000	4,490,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	99,974,345	99,974,345	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	-439,331,000	-439,331,000	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 411265  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,400,033,000	3,400,033,000	0
2	Belanja	3,081,367,881	3,081,367,881	0
3	Pengembalian Belanja	-2,100,000	-2,100,000	0
4	Estimasi Pendapatan	155,773,000	155,773,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	639,476,420	639,476,420	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 27-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 411271  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,639,551,000	5,639,551,000	0
2	Belanja	6,000,286,280	6,000,286,280	0
3	Pengembalian Belanja	-904,645,200	-904,645,200	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	204,518,753	204,518,753	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 27-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 411280  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,217,609,000	3,217,609,000	0
2	Belanja	2,914,194,480	2,914,194,480	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	2,175,000	2,175,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	56,789,999	56,789,999	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 27-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 411585  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,017,155,000	2,017,155,000	0
2	Belanja	1,951,629,026	1,951,629,026	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,575,500	1,575,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 27-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 561288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,281,455,000	2,281,455,000	0
2	Belanja	2,141,313,918	2,141,313,918	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	114,868,000	114,868,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 27-JAN-24*





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 546, BALIKPAPAN 76114  
TELEPON (0542) 733927; FAKSIMILE (0542) 732598; LAMAN [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL [bckalbagtim@kemenkeu.go.id](mailto:bckalbagtim@kemenkeu.go.id)

**BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOMOR BA-1/WBC.161/2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15/01/2024), bertempat di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Diaz Anggita Sangga Putri

NIP : 19981015 201912 2 001

Jabatan : Pelaksana Pemeriksa / Opeerator AT-Persediaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, untuk selanjutnya disebut dengan Pihak Pertama;

2. Nama : Alvi Veditama

NIP : 19950324 201502 1 004

Jabatan : Pelaksana Pemeriksa / Operator GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, untuk selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua;

Menyatakan telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan cara membandingkan data BMN pada Neraca SAKTI Modul Persediaan dan Aset Tetap yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dengan Neraca Modul GLP yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) untuk Tahun Anggaran 2023 dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Balikpapan

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Ditandatangani secara elektronik  
Diaz Anggita Sangga Putri



Ditandatangani secara elektronik  
Alvi Veditama



Mengetahui  
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik  
Aldy Fardian

### Rekonsiliasi Neraca

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	107.269.105	107.269.105	0
2	Tanah	63.584.654.000	63.584.654.000	0
3	Peralatan dan Mesin	7.465.550.024	7.465.550.024	0
4	Gedung dan Bangunan	14.090.940.124	14.090.940.124	0
5	Jalan, Irigasi dan jaringan	233.084.000	233.084.000	0
6	Aset Tetap Lainnya	584.279.718	584.279.718	0
7	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
8	Aset Tak Berwujud	0	0	0
9	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	205.735.020	205.735.020	0
10	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>86.271.511.991</b>	<b>86.271.511.991</b>	<b>0</b>

**Tidak terdapat selisih antara data Aset Tetap-Persediaan dan GLP**

Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik  
Aldy Fardian



2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)  
TAHUNAN AUDITED TA 2023**

Kode dan Nama UAPPAW : (014) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Kode dan Nama Eselon 1 : (015) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√	-	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√	-	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√	-	Ada
	<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√	-	Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√	-	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√	-	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√	-	Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>				
	<b>Kesesuaian Saldo</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√	-	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>				
	<b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√	-	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√	-	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√	-	Sama
<b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>				
	<b>To Do List</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	-	√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√	-	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan	-	√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan	-	√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	-	√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan	-	√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan	-	√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan	-	√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	-	√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang	-	√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan	-	√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan	-	√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?	-	√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?	-	√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?	-	√	Tidak

	a. Pagu/DIPA	-	v	Tidak
	b. Estimasi PNPB	-	v	Tidak
	c. Belanja	-	v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja	-	v	Tidak
	e. Pendapatan	-	v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja	-	v	Tidak
	g. Kas BLU	-	v	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran	-	v	Tidak
	i. Kas Hibah	-	v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung	-	v	Tidak
	<b>Rekon Internal</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	-	v	Tidak
	<b>Daftar MONSAKTI</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)	-	v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')	-	v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?	-	v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)	-	v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?	-	v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)	-	v	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
	<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua	-	v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas	-	v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal	-	v	Tidak
	<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	v	-	Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	v	-	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v	-	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v	-	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	v	-	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v	-	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	v	-	Ya
	<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	-	v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)	-	v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)	-	v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	-	v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"	-	v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar	-	v	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)	-	v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)	-	v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN	-	v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)	-	v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)	-	v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)	-	v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)	-	v	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"	-	v	Tidak

2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)	-	v	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)	-	v	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)	-	v	Tidak
	<b>Terkait Satker BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah	-	v	Ada/Tidak
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	-	v	Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial	-	v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI	-	v	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	-	v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	-	v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	v	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	v	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	v	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	v	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	v	-	Ya
	<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		v	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		v	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	-	v	Tidak
	<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada <b>Neraca Percobaan Kas?</b>	-	v	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	v	-	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	v	-	Ya
	<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	-	v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	-	v	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk	v		
	<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	-	v	Ya/Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v	-	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v	-	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v	-	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	v	-	Ya

5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	v	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	-	v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v	-	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal	-	v	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)	-	v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN	-	v	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null	-	v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v	-	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	v	-	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v	-	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	-	v	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v	-	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	v	-	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek	-	v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	-	v	Tidak
	<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v	-	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST	v	-	
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v	-	Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat saldo negatif di LRAB	-	v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)	-	v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya	-	v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"	-	v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	-	v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti	-	v	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah	v	-	Ya
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	v	-	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	v	-	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	v	-	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	v	-	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :	v	-	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	v	-	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	v	-	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	v	-	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	v	-	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v	-	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v	-	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	v	-	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v	-	Ya
	<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	-	v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	v	-	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	-	v	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	v	-	Ya

Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	-	v	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	v	-	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	v	-	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual	-	v	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v	-	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	v	-	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	v	-	Ya/Tidak
<b>TELAAH LK BLU</b>				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	-	-	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	-	-	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	-	-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya
<b>LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN</b>				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
<p>Untuk Rekonsiliasi Tahunan <i>Unaudited</i> TA 2023 Tingkat UAKPA tidak terdapat akun dan penyebab terjadinya selisih yang "Tidak Seharusnya "</p>				
<p>Mengetahui :</p>  <p>un LKKL,</p> <p>Ditandatangani secara elektronik Djanariah</p>		<p>Balikpapan, 08 Mei 2024</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik Alvi Veditama</p>		



**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH  
GABUNGAN INTRAKOMPITABEL DAN EKSTRAKOMPITABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**

Tgl Data : 21/02/24 6:00 AM  
Tanggal : 21/02/24 11:17 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_kel\_uappaw

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-W : 01505014KD KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

KODE	URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED		
		KUAN- TITAS	NILAI	4	BERTAMBAH			BERKURANG		
					5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
131111	Tanah	67.392	256,961,141,000	825	6,000,000	2,122	2,362,831,000	66,095	254,604,310,000	
20101	TANAH PERSIL	67.392	256,961,141,000	825	6,000,000	2,122	2,362,831,000	66,095	254,604,310,000	
132111	Peralatan dan Mesin	4,716	59,902,056,092	143	4,160,526,137	162	983,076,607	4,697	63,079,505,622	
30103	ALAT BANTU	16	1,417,583,673	0	0	0	0	16	1,417,583,673	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	124	16,251,617,219	4	964,300,000	7	389,854,900	121	16,826,062,319	
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	357,500	0	0	0	0	1	357,500	
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	11	10,232,487,769	0	734,653,144	0	0	11	10,967,140,913	
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	10,701,900	0	0	0	0	4	10,701,900	
30303	ALAT UKUR	12	93,907,000	0	0	3	72,966,300	9	20,940,700	
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
30501	ALAT KANTOR	820	14,357,909,598	0	0	59	58,808,680	761	14,299,100,918	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2,630	6,329,330,271	0	0	57	121,303,331	2,573	6,208,026,940	
30601	ALAT STUDIO	56	869,036,654	2	3,103,298	2	110,498,196	56	761,641,756	
30602	ALAT KOMUNIKASI	151	491,598,797	0	0	11	31,020,200	140	460,578,597	
30603	PERALATAN PEMANCAR	5	197,320,374	0	0	0	0	5	197,320,374	
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	11	652,035,772	0	0	0	0	11	652,035,772	
30701	ALAT KEDOKTERAN	18	53,841,499	0	0	0	0	18	53,841,499	
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000	
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	13	20,935,000	0	0	0	0	13	20,935,000	
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0	
30803	UNIT ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	
30901	SENJATA API	117	658,707,092	0	0	0	0	117	658,707,092	
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	8	3,206,775	0	0	0	0	8	3,206,775	
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	1,173,917,400	0	0	0	0	1	1,173,917,400	
31001	KOMPUTER UNIT	475	5,582,549,148	122	1,523,099,336	18	193,425,000	579	6,912,223,484	
31002	PERALATAN KOMPUTER	235	1,429,194,343	9	321,717,959	0	0	244	1,750,912,302	
31101	ALAT EKSPLORESI TOPOGRAFI	4	800,000	0	0	4	800,000	0	0	
31102	ALAT EKSPLORESI GEOFISIKA	2	15,400,000	0	0	1	4,400,000	1	11,000,000	
31501	ALAT DETEKSI	1	56,618,308	0	0	0	0	1	56,618,308	
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	6	613,652,400	0	0	6	613,652,400	
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
133111	Gedung dan Bangunan	195	78,182,005,049	0	707,591,300	11	981,650,950	184	77,907,945,399	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28	41,841,038,983	0	0	1	323,062,000	27	41,517,976,983	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	157	32,534,686,072	0	707,591,300	10	658,588,950	147	32,583,688,422	
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	960,278,854	0	0	0	0	1	960,278,854	
40401	TUGU/TANDA BATAS	9	2,846,001,140	0	0	0	0	9	2,846,001,140	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED**

Tgl Data : 21/02/24 6:00 AM  
Tanggal : 21/02/24 11:17 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_kel\_uappaw

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UAPPB-W : 01505014KD KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

KODE	URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
		KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI
				5	6	7	8		
1	2	3	4						
134112	Irigasi	1	199,484,000	0	0	0	0	1	199,484,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	0	0	0	0	0	0	0	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	199,484,000	0	0	0	0	1	199,484,000
134113	Jaringan	3	233,084,000	0	0	0	0	3	233,084,000
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	22,521,000	0	0	0	0	1	22,521,000
50402	JARINGAN LISTRIK	1	197,363,000	0	0	0	0	1	197,363,000
50403	JARINGAN TELEPON	1	13,200,000	0	0	0	0	1	13,200,000
135121	Aset Tetap Lainnya	4	567,882,112	1	248,210,262	1	231,812,656	4	584,279,718
60301	HEWAN PIARAAN	4	567,882,112	1	248,210,262	1	231,812,656	4	584,279,718
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	2,498	890,676,238	1,793	2,982,703,307	969	652,414,071	3,322	3,220,965,474
20101	TANAH PERSIL	825	6,000,000	1,625	1,146,000,000	825	6,000,000	1,625	1,146,000,000
20102	TANAH NON PERSIL	1,646	24,000,000	0	0	0	0	1,646	24,000,000
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	629,285,554	6	367,854,900	1	143,911,500	9	853,228,954
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1	78,400,000	0	0	0	0	1	78,400,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	2	12,045,000	59	58,808,680	61	70,853,680	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7	28,348,074	57	121,303,331	53	71,030,070	11	78,621,335
30601	ALAT STUDIO	1	4,510,000	2	110,498,196	2	9,570,000	1	105,438,196
30602	ALAT KOMUNIKASI	4	1,100,000	11	31,020,200	15	32,120,200	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	5	62,610,978	18	193,425,000	4	54,113,989	19	201,921,989
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	0	0	4	800,000	4	800,000	0	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	1	4,400,000	1	4,400,000	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	1	323,062,000	0	0	1	323,062,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	44,376,632	9	625,531,000	3	259,614,632	9	410,293,000
40401	TUGUTANDA BATAS	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>396,936,328,491</b>		<b>8,105,031,006</b>		<b>5,211,785,284</b>		<b>399,829,574,213</b>

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UAPPB W : 01505014KD KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Tgl.Data : 21/02/24 12:00 PM  
Tanggal : 21/02/24 4:17 PM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_uappaw

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	742,571,625
117112	Amunisi	200,535,567
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	23,829,619
117114	Suku Cadang	580,000
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	3,696,344
117151	Persediaan BTS, BDN, dan BMMN	502,161,000
117199	Persediaan Lainnya	17,975,785
131111	Tanah	254,604,310,000
132111	Peralatan dan Mesin	62,929,385,584
133111	Gedung dan Bangunan	77,861,754,949
134112	Irigasi	199,484,000
134113	Jaringan	233,084,000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	327,540,264
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(56,186,925,231)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19,277,694,458)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(49,871,000)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(94,218,213)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,220,740,474
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,797,369,869)
<b>J U M L A H</b>		<b>323,461,570,440</b>

Balikpapan, Februari 2024  
Kepala Kantor Wilayah

Ditandatangani secara elektronik  
Kusuma Santi Wahyuningsih

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UAPPB-W : 01505014KD KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Tanggal : 21/02/24 11:17 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_persediaan\_uappaw

Kode	Uraian	Jumlah
<b>117111</b>	<b>Barang Konsumsi</b>	
1010301001	Alat Tulis	14,266,903
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	603,240
1010301003	Penjepit Kertas	3,983,079
1010301004	Penghapus/Korektor	638,211
1010301005	Buku Tulis	1,246,200
1010301006	Ordner Dan Map	16,838,441
1010301007	Penggaris	588,375
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	2,061,143
1010301010	Alat Perekat	5,572,988
1010301011	Stadler HD	105,450
1010301012	Staples	601,400
1010301013	Isi Staples	1,746,075
1010301015	Seminar Kit	38,500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	29,176,132
1010302001	Kertas HVS	16,980,979
1010302002	Berbagai Kertas	3,067,193
1010302003	Kertas Cover	950,317
1010302004	Amplop	8,937,593
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	64,376,185
1010303001	Transparant Sheet	131,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	9,990,000
1010304002	Computer File/Tempat Disket	6,075,000
1010304003	Pita Printer	7,585,930
1010304004	Tinta/Toner Printer	28,688,861
1010304006	USB/Flash Disk	2,192,850
1010304007	kartu Memori	180,000
1010304009	Harddisk Internal	1,300,000
1010304010	Mouse	2,631,175
1010304011	CD/DVD	30,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	35,466,125
1010306001	Kabel Listrik	1,154,900
1010306003	Stop Kontak	296,688
1010306005	Stacker	95,875
1010306010	Batu Baterai	7,765,995
1010306999	Alat Listrik Lainnya	302,500
1010307001	Bahan Baku Pakaian	55,379,504
1010307002	Penutup Kepala	9,327,440
1010307003	Penutup Badan	111,271,207
1010307004	Penutup Tangan	185,000
1010307005	Penutup Kaki	81,060,459
1010307006	Atribut	59,355,984
1010307007	Perlengkapan Lapangan	3,802,300
1010307999	Perlengkapan Dinas Lainnya	10,086,900
1010308001	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa Anjing	1,262,625
1010309001	Meterai	10,290,000

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UAPPB-W : 01505014KD KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

Tanggal : 21/02/24 11:17 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_persediaan\_uappaw

Kode	Uraian	Jumlah
1010309003	Stempel	1,044,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,083,500
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	2,870,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	278,875
1010311001	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran	74,000
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	7,033,625
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	731,992
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	9,757,963
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	7,000
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	1,167,692
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	6,013,450
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	94,822,806
<b>Jumlah Barang Konsumsi</b>		<b>742,571,625</b>
<b>117112</b>	<b>Amunisi</b>	
1010103006	Amunisi	200,535,567
<b>Jumlah Amunisi</b>		<b>200,535,567</b>
<b>117113</b>	<b>Bahan untuk Pemeliharaan</b>	
1010305001	Sapu Dan Sikat	1,591,850
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	3,145,710
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	456,725
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	2,244,560
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	245,550
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	5,626,481
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	11,000
1010305012	Pengharum Ruangan	4,937,625
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	5,570,118
<b>Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan</b>		<b>23,829,619</b>
<b>117114</b>	<b>Suku Cadang</b>	
1010209999	Suku Cadang Senjata Lainnya	580,000
<b>Jumlah Suku Cadang</b>		<b>580,000</b>
<b>117121</b>	<b>Pita Cukai, Materai dan Leges</b>	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	3,696,344
<b>Jumlah Pita Cukai, Materai dan Leges</b>		<b>3,696,344</b>
<b>117151</b>	<b>Persediaan BTS, BDN, dan BMMN</b>	
1010501009	Persediaan BTS, BDN dan BMMN	502,161,000
<b>Jumlah Persediaan BTS, BDN, dan BMMN</b>		<b>502,161,000</b>
<b>117199</b>	<b>Persediaan Lainnya</b>	
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	831,059
1010401002	Obat Padat (Persediaan Lainnya)	4,222,018
1010401003	Obat Gas (Persediaan Lainnya)	52,626
1010401004	Obat Serbuk/Tepung (Persediaan Lainnya)	25,219
1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	1,015,866
1010401007	Non Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana (Persediaan Lainnya)	3,282,462
1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	8,476,535
1020105001	Blade	70,000

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**UAPB** : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UAPPB-W** : 01505014KD KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

Tanggal : 21/02/24 11:17 AM  
Halaman : 3  
Kode Lap : lap\_persediaan\_uappaw

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Persediaan Lainnya	17,975,785
	<b>TOTAL</b>	<b>1,491,349,940</b>

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 32,500 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

Balikpapan, Februari 2024  
Kepala Kantor Wilayah

Ditandatangani secara elektronik  
Kusuma Santi Wahyuningsih

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**

**Bulan: Desember 2023**

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-015.05.2.411724/2023

Unit Organisasi : (05) DITJEN BEA DAN CUKAI

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.52) KALIMANTAN TIMUR / KOTA BALIKPAPAN

KPPN : (047) Balikpapan

Satuan Kerja : (411724) KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00041/DRPP/411724/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>BP Kas, BPP dan UM</b>	130.200,00	60.776.594,00	60.906.794,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	130.200,00	60.776.594,00	60.906.794,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>BP Selain Kas</b>	130.200,00	45.900.300,00	46.030.500,00	0,00
	1. BP UP*)	130.200,00	44.069.800,00	44.200.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	342.500,00	342.500,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
<b>3. Jumlah Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
<b>3. Selisih Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



ADY MARWANTO

NIP 197609241999031001

KOTA BALIKPAPAN, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran

SALSABILA KHAIRUNNISA

200005092018122001 200005092018122001

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG - WILAYAH  
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR  
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)

I. **PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

## **B. Entitas Pelaporan**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur merupakan Unit Satuan Kerja yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam Struktur Organisasi Akuntansi Barang Milik Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur berkedudukan sebagai Unit Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah. Sebagai UAPPB-W Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur mempunyai enam kantor vertikal yang terdiri dari KPPBC TMP B Balikpapan, KPPBC TMP B Samarinda, KPPBC TMP C Bontang, KPPBC TMP B Sangatta, KPPBC TMP B Tarakan, dan KPPBC TMP C Nunukan. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CAL-BMN) ini merupakan CAL-BMN untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah.

## **C. Periode Laporan**

Periode pelaporan yang akan diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CAL-BMN) ini adalah periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 yaitu 01 Januari s.d. 31 Desember 2023.

## **II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) Kanwil DJBC Kalbagtim dalam melakukan Penatausahaan BMN berpedoman pada ketentuan-ketentuan Penatausahaan BMN. Dalam menentukan kodefikasi BMN berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, dalam hal tidak ditemukan nama barang yang sesuai maka BMN akan dicatat dengan nama BMN yang mendekati atau dimasukkan dengan nama lainnya dalam satu kelompok/sub kelompok barang. Proses Kapitalisasi BMN sesuai dengan ketentuan dimana biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan BMN sampai dengan BMN siap digunakan dikapitalisasi dalam BMN tersebut.

Rekonsiliasi data modul aset tetap pada aplikasi SAKTI dilaksanakan minimal setiap semester, begitu juga dengan rekonsiliasi data ke KPKNL sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Perhitungan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pada tahun 2017 telah dilakukan penilaian kembali Barang Milik Negara berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, dan Bangunan Air.

### **III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Laporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) Kanwil DJBC Kalbagtim periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN ditatausahakan dan dikelola oleh pada satuan kerja di Lingkup Kanwil DJBC Kalbagtim.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan per 31 Desember 2023 ini adalah sebesar Rp 399.829.574.213,00 (*tiga ratus Sembilan puluh Sembilan miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 396.936.328.491,00 (*tiga ratus Sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama setahun dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 8.105.031.006,00 (*delapan miliar serratus lima juta tiga puluh satu ribu enam rupiah*) dan mutasi kurang yang terjadi selama setahun dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.211.785.284,00 (*lima miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*). Nilai mutasi BMN berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN, Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Laporan Kondisi Barang
13. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

#### **IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**

##### **1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2023**

Nilai BMN per 1 Januari 2023 pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah sebesar Rp 396.936.328.491,00 (*tiga ratus Sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 396.129.275.541,00 (*tiga ratus Sembilan puluh enam miliar serratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 807.052.950,00 (*delapan ratus tujuh juta lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

##### **2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2023**

Mutasi BMN pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

###### **a. Barang Persediaan**

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.668.878.940,00 (*satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp 1.001.611.876,00 (*satu miliar satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan adalah sebesar Rp 667.267.064,00 (*enam ratus enam puluh tujuh juta dua*

ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111 Barang Konsumsi	821.979.372,00	(79.407.747,00)	742.571.625,00
117112 Amunisi	125.467.362,00	75.068.205,00	200.535.567,00
117113 Bahan untuk Pemeliharaan	29.036.858,00	(5.207.239,00)	23.829.619,00
117114 Suku Cadang	0	580.000,00	580.000,00
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	0	3.696.344,00	3.696.344,00
117151 Persediaan BTB, BDN, dan BMMN	0	679.690.000,00	679.690.000,00
117199 Persediaan Lainnya	25.128.284,00	(7.152.499,00)	17.975.785,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.001.611.876,00</b>	<b>667.267.064,00</b>	<b>1.668.878.940</b>

#### b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang UAPPB-W Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 31 Desember 2023 sebesar Rp254,604,310,000,00 (*dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah (per 01 Januari 2023) seluas 67.392 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp256.961.141.000,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*), mutasi tambah seluas 825 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan mutasi kurang seluas 2.122 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp 2.362.831.000 (*dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Uraian	Luas	Nilai
Saldo Awal per 01 Januari 2023	67.392 m <sup>2</sup>	Rp 256.961.141.000,00
Mutasi Tambah periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023	825 m <sup>2</sup>	Rp 6.000.000,00
Mutasi Kurang periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023	2.122 m <sup>2</sup>	Rp 2.362.831.000,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023</b>	<b>66.095 m<sup>2</sup></b>	<b>Rp 254.604.310.000,00</b>

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
------------------------	---------------------

Pada KPPBC TMP B Tarakan mutasi tambah tanah terhadap tanah sengketa yang mengalami koreksi pencatatan dari pencatatan SIMAN yang sebelumnya rusak berat menjadi kondisi baik	6.000.000
---	-----------

Mutasi Kurang Tanah meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Pada KPPBC TMP B Balikpapan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II KS Tubun	1.140.000.000
Pada KPPBC TMP B Tarakan tanah yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan yang di alih guna ke KPP Pratama Tanjung Redeb	1.222.831.000

Adapun tanah yang tercatat adalah sebagai berikut:

No	NAMA TANAH	NUP	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	KET
<b>KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR</b>					
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Jl. Wiluyo Puspyudo, Klandasan Ulu	1	916 m <sup>2</sup>	Rp 3.679.520.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 97 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Jl. Marsma R Iswahyudi	1	5.142 m <sup>2</sup>	Rp11.927.908.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 4 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Jl. Inpres IV	2	1.655 m <sup>2</sup>	Rp1.024.345.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 27 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama Jl. Wiyata No. 374	1	450 m <sup>2</sup>	Rp927.881.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 42 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No	NAMA TANAH	NUP	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	KET
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Jend. Sudirman No.546	1	3.500 m <sup>2</sup>	Rp 46.025.000.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 69 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
<b>KPPBC TMP B BALIKPAPAN</b>					
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Arif Fadillah	4	752 m <sup>2</sup>	Rp1.904.257.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 105 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Arif Fadillah	5	500 m <sup>2</sup>	Rp5.942.238.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 106 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Arif Fadillah	6	523 m <sup>2</sup>	Rp1.287.834.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 100 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Yos sudarso	10	469 m <sup>2</sup>	Rp1.458.011.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 89 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Melati	15	460 m <sup>2</sup>	Rp1.454.058.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 104 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Yos Sudarso	23	546 m <sup>2</sup>	Rp1.697.385.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 90 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No	NAMA TANAH	NUP	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	KET
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Yos Sudarso	24	1909 m <sup>2</sup>	Rp5.934.631.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 91 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Martadinata	25	722 m <sup>2</sup>	Rp1.985.500.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 92 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Melati	26	639 m <sup>2</sup>	Rp2.064.517.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 98 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Melati	27	1.748 m <sup>2</sup>	Rp5.464.363.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 99 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Melati	28	661 m <sup>2</sup>	Rp2.112.507.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 101 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Melati	29	1.655 m <sup>2</sup>	Rp5.115.830.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 102 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Melati	30	632 m <sup>2</sup>	Rp2.152.279.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 103 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	1.070 m <sup>2</sup>	Rp8.547.511.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 88 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No	NAMA TANAH	NUP	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	KET
KPPBC TMP B SAMARINDA					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	946	123.032.000	Sertifikat Hak Pakai No P.02/ Kec. Marangkayu II
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	5.625	41.686.875.000	BP343664/ Ir. H. Juanda
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	1	1.350	161.757.000	Sertifikat Hak Pakai No P.01/ Kec. Marangkayu II
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	1.065	7.345.838.000	BP343666/ Jl Danau Poso
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	1.210	12.611.225.000	BP343667/ Jalan Basuki Rahmat
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	866	6.081.485.000	BP343665/ Jalan Anggrek
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	5	442	3.734.900.000	343668/ Jalan Basuki Rahmat
KPPBC TMP C BONTANG					
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Jl. Pelabuhan III	1	5.950 m <sup>2</sup>	Rp 5.749.783.000 ,00	Sertifikat Hak Pakai No. 04 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Pelabuhan	1	3.000 m <sup>2</sup>	Rp 4.523.495.000 ,00	Sertifikat Hak Pakai No. P.51 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
KPPBC TMP C SANGATTA					

No	NAMA TANAH	NUP	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	KET
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	796	185.269.000	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga Sertifikat Hak Pakai 796
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	600	109.215.000	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga Sertifikat Hak Pakai 600
3.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	1875	609.375.000	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga Sertifikat Hak Pakai 1875
<b>KPPBC TMP B TARAKAN</b>					
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	825m <sup>2</sup>	Rp6.000.000,00	Tanah tersebut pada tahun 2004 terdapat sengketa atau perkara perdata nomor 09/Pdt.G/2004/PN.Trk dan telah inkrah dinyatakan menjadi milik pihak lain berdasarkan Relas Pemberitahuan Salinan Peninjauan Kembali Kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 09/Pdt.G/2004/PN.Trk yang diterima tanggal 05 Januari 2011. Tanah tersebut kini sedang berupaya hukum pada Pengelola Barang. Saat ini sedang mencari bukti baru (novum) untuk upaya hukum yang akan dilakukan selanjutnya. KPPBC TMP B Tarakan mengajukan permohonan pemeriksaan berkas perkara (inzage) ke Pengadilan Negeri Tarakan melalui surat Kepala KPPBC TMP B

No	NAMA TANAH	NUP	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	KET
					<p>Tarakan nomor S-228/KBC.1605/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan mendapat jawaban surat Ketua Pengadilan Negeri Tarakan nomor W.34-U2/1293/HK.02/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage). Dalam surat balsan tersebut, pada intinya menginformasikan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 9/Pdt.G/2004/PN.Trk juncto nomor 88/PDT/2005/PT.KT.S MDA juncto nomor 978K/PDT/2008 juncto nomor 109/PK/Pdt/2010 telah selesai dilaksanakan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde). Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk mendapatkan arahan dan bantuan hukum dalam upaya pencarian bukti baru agar dilakukan langkah-langkah atau upaya hukum yang akan dilakukan selanjutnya dalam rangka mempertahankan aset negara</p>
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Jl. Imam Bonjol Pamusian	2	329 m <sup>2</sup>	Rp 3.307.742.000,0 0	Sertipikat Hak Pakai No. 234 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Karang Anyar	3	927 m <sup>2</sup>	Rp 7.956.925.000,0 0	Sertipikat Hak Pakai No. 239 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No	NAMA TANAH	NUP	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	KET
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Kampung Baru	4	611 m <sup>2</sup>	Rp 5.836.826,00	Sertipikat Hak Pakai No. 235 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Sebengkok	5	8.476 m <sup>2</sup>	Rp 20.098.132.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 125;126;127;128 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Bunyu	6	169 m <sup>2</sup>	Rp 65.826.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 206 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Bunyu	7	109 m <sup>2</sup>	Rp 42.655.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 209 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Bunyu	8	660 m <sup>2</sup>	Rp 252.890.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 210 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Tg. Selor Hilir	9	497 m <sup>2</sup>	Rp 1.216.831.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 14 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Tg. Redeb	10	2.340 m <sup>2</sup>	Rp 1.676.855.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 00132 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Lingkas Ujung	1	2.217 m <sup>2</sup>	Rp 18.514.721.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 00115 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah P. Bunyu	2	662 m <sup>2</sup>	Rp 285.322.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 6 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No	NAMA TANAH	NUP	LUAS (m <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	KET
13	Tanah Bangunan Rumah Negara/Golong an II Karang Rejo	1	-	-	Bersertifikat atas nama Pihak Ketiga. Jenis sertipikat Ijin Mendirikan Bangunan nomor dokumen Legger AA.868
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	521 m <sup>2</sup>	Rp 1.597.110.000,00	Sertipikat Hak Pakai No. 132 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
<b>KPPBC TMP C NUNUKAN</b>					
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II, Jl. Moch Hatta, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara	2	1000	1.093.000.000	Sertipikat Hak Pakai a.n Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan Nomor 16.08.40.01.4.00007
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II, Pelabuhan Jalan TVRI, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara	1	200	152.100.000	Sertipikat Hak Pakai a.n Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan Nomor 16.08.40.01.4.00006
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Bedurahim RT/RW 002/002, Sungai Nyamuk, Sebatik Timur, KAB. NUNUKAN	1	200	96.382.000	Sertipikat Hak Pakai a.n Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan Nomor 99 Tahun 1984

Tanah yang bermasalah:

#### **KPPBC TMP B Balikpapan**

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh KPPBC TMP B Balikpapan, yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m2)	Nilai (Rp)
Sengketa	5795	18.363.554.000

KPPBC TMP B Balikpapan memiliki Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II di Jl. Melati / Jalan KH. Agus Salim II yang di gugat dengan perihal perbuatan melawan hukum dengan relaas nomor 288/Pdt.G/2023/PN Bpp. Atas gugatan tersebut KPPBC TMP B Balikpapan telah mengirimkan surat terkait permohonan Bantuan Hukum ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur dengan Nota Dinas nomor ND-1170/KBC.1601/2023 tanggal 16 november 2023. Atas permohonan tersebut Diterbitkan Surat Kuasa Khusus Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor SKU-602/MK.1/2023 tanggal 22 November 2023.

### **KPPBC TMP B TARAKAN**

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 1 yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, Karang Balik, Tarakan Barat, Tarakan dengan luas 825 m<sup>2</sup>/Rp 6.000.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara nomor KET-27/KBC.1605/2023 tanggal 28 Desember 2023. Tanah yang belum bersertipikat yaitu tanah bangunan kantor pemerintah NUP 3 seluas 521 m<sup>2</sup> dikarenakan terindikasi double catat dengan Kantor UPP Kelas II Tanjung Redeb. Terdapat 2 (dua) tanah milik KPPBC TMP B Tarakan yang sudah bersertipikat hak pakai namun belum diinput atau belum tercatat pada aplikasi SAKTI yaitu Tanah Rumah Negara Golongan II yang beralamatkan di Jalan Sugiyono RT XII/V, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara. Sertipikat Hak Pakai nomor 00038 yang diterbitkan tahun 2015 dengan luas tanah 407 m<sup>2</sup> dan Tanah Rumah Negara Golongan II yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo, Bugis, Tj. Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersertifikat atas nama Menteri Keuangan nomor SHP 00134 dengan luas tanah 757 m<sup>2</sup>.

### **KPPBC TMP C NUNUKAN**

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan, yaitu:

<b>Permasalahan Tanah</b>	<b>Kuantitas (bidang/m2)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
Sengketa	200	96.382.000

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nunukan memiliki Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Bedurahim RT/RW 002/002, Sungai Nyamuk, Sebatik Timur, KAB. NUNUKAN, Kalimantan Utara yang sedang sengketa. Pada Tahun 2021 telah menjalani proses di pengadilan Negeri Nunukan, dan menunggu putusan dari pengadilan dengan hasil akhir hibah tanah dari pemilik tanah ( Bapak Bakri) untuk KPPBC TMP C Nunukan. Namun, pada akhir tahun 2022, Pejabat pada Pengadilan Negeri Nunukan mengalami pergantian, dan memutuskan untuk melakukan proses ulang terkait sertifikasi tanah yang dimaksud, sampai saat ini sudah ada kesepakatan bersama antara pemilik Tanah (Bapak Bakri) dan KPPBC TMP C Nunukan yaitu kesepakatan Hibah Tanah, tetapi belum ada tindaklanjut proses hukum (Pengadilan Negeri Nunukan).

### **c. Peralatan dan Mesin (132111)**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 31 Desember 2023 sebesar 4.697 (*empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh*) unit dengan nilai Rp 63.079.505.622,00 (*enam puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 4.716 unit (*empat ribu tujuh ratus enam belas*) unit dengan nilai Rp59.902.056.092,00 (*lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua juta lima puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah*), terdapat mutasi tambah sejumlah 143 (*seratus empat puluh tiga*) unit dengan nilai Rp 4.160.526.137,00 (*empat miliar serratus enam puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu serratus tiga puluh tujuh rupiah*) terdapat mutasi kurang sebesar 162 (*seratus enam puluh dua*) unit dengan

nilai Rp 983.076.607,00 (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah*).

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	4.697	63.079.505.622,00
Intrakomptabel	4.185	62.929.385.584,00
Ekstrakomptabel	512	150.120.038,00

Transaksi penambahan dan pengurangan yang terjadi pada peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	4.160	59.743.458.654,00	556	158.597.438,00
Mutasi Tambah	143	4.160.526.137,00	0	0
Mutasi Kurang	118	974.599.207,00	44	8.477.400,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	4.185	62.929.385.584,00	512	150.120.038,00

Akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	54.510.684.398,00
Intrakomptabel	54.364.755.185,00
Ekstrakomptabel	145.929.213,00

### **Alat Besar (3.01)**

Saldo Alat Besar pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah-Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 16 (enam belas) Unit dengan nilai sebesar Rp 1.417.583.673,00 (*satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*) dan mutasi tambah maupun mutasi kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				

Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	16	1.417.583.673,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Dari jumlah/nilai Alat Besar di atas, jumlah Alat Besar yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0.

Akumulasi penyusutan untuk Alat Besar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	1.296.507.700,00
Intrakomptabel	1.296.507.700,00
Ekstrakomptabel	0

### **Alat Angkutan (3.02)**

Saldo Alat Angkutan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) unit dengan nilai sebesar Rp 27.793.560.732,00 (*dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*). Dengan mutase tambah dan urang sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	136	26.484.462.488,00	0	0
Mutasi Tambah	4	1.698.953.144,00	0	0
Mutasi Kurang	7	389.854.900,00	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	133	27.793.560.732,00	0	0

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	119	24.277.484.341
Rusak Ringan	20	5.050.470.481
Rusak Berat	1	78.400.000

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 4 (empat) unit dengan keterangan:

**KANWIL DJBC KALBAGTIM**

Kelompok barang alat angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit Sepeda Motor dengan nilai sebesar Rp13.403.500 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

**KPPBC TMP B BALIKPAPAN**

Kelompok barang alat angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit Mobil Jeep dengan nilai sebesar Rp 294.605.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).

KPPBC TMP B Balikpapan telah mengajukan permohonan penghapusan atas 1 unit mobil Jeep NUP 44 dalam kondisi rusak ringan dan telah habis masa manfaat dengan nilai sebesar Rp 294.605.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) dan sudah sampai tahap penjualan secara lelang pada tahun 2023 namun gagal lelang karena tidak ada yang membeli. Oleh karena itu, KPPBC TMP B Balikpapan akan melakukan tindak lanjut dengan mengajukan nilai limit yang baru ke Kantor Pusat DJBC untuk permohonan penjualan secara lelang kembali kepada KPKNL Balikpapan.

**KPPBC TMP B TARAKAN**

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 (satu) unit/Rp78.400.000 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Alat angkut tersebut yaitu kapal patroli pantai NUP 1 nomor lambung BC 015 kondisi rusak berat. Dapat kami sampaikan bahwa Kapal Patroli tersebut telah diusulkan penghapusan pada tahun 2022 berdasarkan nota dinas Kepala KPPBC TMP B Tarakan nomor ND-695/KBC.1605/2022 tanggal 09 Agustus 2022 hal Usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada KPPBC TMP B Tarakan dengan Tindak Lanjut Penjualan, atas usulan penghapusan tersebut ditolak oleh Pengelola Barang melalui surat Kepala KPKNL Tarakan nomor S-17/MK.6/KNL.1303/2022 tanggal 20 September 2022 hal Persetujuan dan Penolakan Penjualan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPPBC TMP B Tarakan, serta berdasarkan nota dinas Kepala KPKNL Tarakan nomor ND-409/KNL.1303/2022 tanggal 22 September 2022 hal Pemberitahuan Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Penjualan BMN berupa

Selain Tanah dan/atau Bangunan (Kapal Patroli Pantai) pada KPPBC TMP B Tarakan. Alasan penolakan penghapusan kapal patroli tersebut dikarenakan wujud fisik sudah tidak ada karena tenggelam dan tersisa antenna kapal yang sudah tidak berfungsi, sehingga penghapusan atas BMN dimaksud agar diajukan dengan mekanisme penghapusan karena sebab- sebab lain berdasarkan ketentuan PMK-83/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Salah satu dokumen yang dilampirkan adalah Laporan Hasil Reviu APIP atas BMN yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Sampai dengan saat ini belum diusulkan Kembali penghapusan karena sebab-sebab lain dikarenakan terkendala belum adanya laporan hasil reviu APIP atas BMN yang diusulkan sebagai syarat lampiran usulan penghapusan.

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 4 unit dengan nilai Rp 694.282.054,00 (*enam ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah*)

**KPPBC TMP C NUNUKAN**

Kelompok barang alat angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dengan nilai sebesar Rp 143.911.500 (*seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Angkutan di atas, jumlah Alat Angkutan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Besar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	24.142.305.536,00
Intrakomptabel	24.142.305.536,00
Ekstrakomptabel	0

**Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)**

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan nilai sebesar Rp 31.642.600,00 (*tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*). Dengan mutasi tambah dan mutasi kurang sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	16	104.608.900,00	0	0
Mutasi Tambah	0	0	0	0
Mutasi Kurang	3	72.966.300,00	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	13	31.642.600,00	0	0

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	13	31.642.600,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, jumlah Alat Angkutan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	27.345.340,00
Intrakomptabel	27.345.340,00
Ekstrakomptabel	0

#### **Alat Pertanian (3.04)**

Saldo Alat Pertanian pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (nol) Unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### **Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)**

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023

untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 3.334 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) unit dengan nilai sebesar Rp 20.507.127.858,00 (*dua puluh miliar lima ratus tujuh juta serratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*). Dengan mutasi tambah dan mutase kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	2.959	20,560,824,931,00	491	126.414.938,00
Mutasi Tambah	0	0	0	0
Mutasi Kurang	76	172.434.611,00	40	7,677,400
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	2.883	20,388,390,320	451	118,737,538,00

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	3.208	16.017.321.174,00
Rusak Ringan	102	3.827.258.618,00
Rusak Berat	138	869.574.914,00

Kelompok barang alat kantor dan rumah tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 50 unit / Rp 168,795,218,00 (*serratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	5,880,498,320,00
Intrakomptabel	5,763,949,882,00
Ekstrakomptabel	116,548,438,00

### **Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)**

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit dengan nilai sebesar Rp 2,071,576,499,00 (*dua miliar tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*). Dengan mutasi tambah dan mutasi kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	168	2,180,019,097,00	55	29,972,500,00
Mutasi Tambah	2	3,103,298,00	0	0
Mutasi Kurang	13	141,518,396,00	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	157	2,041,603,999,00	55	29,972,500,00

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	208	2.059.119.737,00
Rusak Ringan	2	550.000,00
Rusak Berat	14	41.356.864,00

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 9 unit dengan nilai sebesar Rp 14,746,800,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Dari jumlah/nilai Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	1,684,050,884,00
Intrakomptabel	1,654,123,384,00

Ekstrakomptabel	29,927,500,00
-----------------	---------------

### **Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)**

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan nilai sebesar Rp 56,841,499,00 (*lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*). Dengan mutasi tambah dan mutasi kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	10	47,595,499,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	54,560,499,00
Intrakomptabel	54,560,499,00

Ekstrakomptabel	0
-----------------	---

### **Alat Laboratorium (3.08)**

Saldo Alat Laboratorium pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang- Wilayah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan nilai sebesar Rp 20.935.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

NIHIL

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	13	20.935.000,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Alat Laboratorium di atas, jumlah Alat Laboratorium yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	16,531,564,00
Intrakomptabel	16,531,564,00

Ekstrakomptabel	0
-----------------	---

### **Alat Persenjataan (3.09)**

Saldo Alat Persenjataan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) unit dengan nilai sebesar Rp 1,835,831,267,00 (*satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

NIHIL

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	126	1,835,831,267,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Alat Persenjataan di atas, jumlah Alat Laboratorium yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	1,830,026,663,00
Intrakomptabel	1,828,616,663,00

Ekstrakomptabel	1.410.000,00
-----------------	--------------

### **Peralatan Komputer (3.10)**

Saldo Peralatan Komputer pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 823 (*delapan ratus dua puluh tiga*) unit dengan nilai sebesar Rp 8,663,135,786,00 (*delapan miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	710	7,011,743,491,00	0	0
Mutasi Tambah	131	1,844,817,295,00	0	0
Mutasi Kurang	18	193,425,000,00	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	823	8,663,135,786,00	0	0

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	791	7.872.292.090,00
Rusak Ringan	45	541.211.941,00
Rusak Berat	28	307.020.578,00

Kelompok barang Alat Persenjataan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 23 (*dua puluh tiga*) unit dengan nilai sebesar Rp 256,035,978,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Persenjataan di atas, jumlah Alat Laboratorium yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Persenjataan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
-------------	----------------------

Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	7,104,545,517,00
Intrakomptabel	7,104,545,517,00
Ekstrakomptabel	0

### **Peralatan Eksplorasi (3.11)**

Saldo Peralatan Eksplorasi pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 1 (*satu*) unit dengan nilai sebesar Rp 11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	2	15,400,000,00	4	800,000,00
Mutasi Tambah	0	0	0	0
Mutasi Kurang	1	4,400,000,00	4	800,000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	1	11.000.000,00	0	0

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	11.000.000,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Eksplorasi di atas, jumlah Alat Eksplorasi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Eksplorasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi
-------------	-----------

	Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	11,000,000,00
Intrakomptabel	11,000,000,00
Ekstrakomptabel	

### **Peralatan Pengeboran (3.12)**

Saldo Peralatan Pengeboran pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol* rupiah).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Alat Pengeboran di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Pengeboran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol* rupiah).

Dari jumlah/nilai Alat Pengeboran di atas, jumlah Alat Pengeboran yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol* rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Pengeboran per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

### **Peralatan Produksi, Pengolahan, Pemurnian (3.13)**

Saldo Peralatan Produksi, Pengolahan, Pemurnian pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol* rupiah).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Alat Produksi, Pengolahan, Pemurnian di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Produksi, Pengolahan, Pemurnian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol* rupiah).

Dari jumlah/nilai Alat Produksi, Pengolahan, Pemurnian di atas, jumlah Alat Produksi, Pengolahan, Pemurnian yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol* rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Produksi, Pengolahan, Pemurnian per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

### **Peralatan Bantu Eksplorasi (3.14)**

Saldo Peralatan Bantu Eksplorasi pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Bantu Eksplorasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Bantu Eksplorasi di atas, jumlah Alat Bantu Eksplorasi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Bantu Eksplorasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

### **Peralatan Keselamatan Kerja (3.15)**

Saldo Peralatan Keselamatan Kerja pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 7 (*tujuh*) unit dengan nilai sebesar Rp 670,270,708,00 (*enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	1	56,618,308,00	0	0
Mutasi Tambah	6	613,652,400,00	0	0
Mutasi Kurang	0	0	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	7	670,270,708,00	0	0

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	7	670,270,708,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Keselamatan Kerja di atas, jumlah Alat Keselamatan Kerja yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	117,983,548,00
Intrakomptabel	117,983,548,00
Ekstrakomptabel	0

### **Peralatan Peraga (3.16)**

Saldo Peralatan Peraga pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Alat Peraga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Peraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Peraga di atas, jumlah Alat Peraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Peraga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

### **Peralatan Proses/Produksi (3.17)**

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

NIHIL

Dari jumlah Alat Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Proses/Produksi di atas, jumlah Alat Proses/Produksi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Proses/Produksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

### **Peralatan Rambu-Rambu (3.18)**

Saldo Peralatan Rambu-Rambu pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Alat Rambu-Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Rambu-Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Rambu-Rambu di atas, jumlah Alat Rambu-Rambu yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Rambu-Rambu per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

### **Peralatan Olahraga (3.19)**

Saldo Peralatan Olahraga pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah				
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

**NIHIL**

Dari jumlah Alat Olahraga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Alat Olahraga di atas, jumlah Alat Olahraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Alat Olahraga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

**d. Gedung dan Bangunan (33111)**

Saldo Gedung dan Bangunan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 sebesar 184 (*dua ratus dua puluh*) unit dengan nilai Rp 77,907,945,399,00 (*tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah*). Dengan saldo awal 195 (*seratus sembilan puluh lima*) unit dengan nilai sebesar Rp 78,182,005,049,00 (*tuju puluh delapan miliar serratus delapan puluh dua juta lima ribu empat puluh sembilan rupiah*). Dengan Mutasi tambah sebesar Rp 707,591,300,00 (*tujuh ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah*) dan mutasi kurang 11 (*sebelas*) unit dengan nilai sebesar Rp 981,650,950,00 (*sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	184	77,907,945,399,00
Intrakomptabel	182	77,861,754,949,00
Ekstrakomptabel	2	46,190,450,00

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	192	78,102,756,649,00	3	79,248,400,00
Mutasi Tambah	0	707,591,300,00	0	0
Mutasi Kurang	10	948,593,000,00	1	33,057,950,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	182	77,861,754,949,00	2	46,190,450,00

Akumulasi Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
-------------	----------------------

Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	19,290,976,498,00
Intrakomptabel	19,277,694,458,00
Ekstrakomptabel	13,282,040,00

#### **Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal (4.01)**

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) unit dengan nilai sebesar Rp 74,101,665,405,00 (*tujuh puluh empat miliar serratus satu juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	182	74,296,476,655,00	3	79,248,400,00
Mutasi Tambah	0	707,591,300,00	0	0
Mutasi Kurang	10	948,593,000,00	1	33,057,950,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	172	74,055,474,955,00	2	46,190,450,00

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	146	66.768.903.011,00
Rusak Ringan	27	6.305.117.300,00
Rusak Berat	12	1.067.887.000,00

Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 5 unit dengan nilai sebesar Rp 275.775.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pada KPPBC TMP P B Balikpapan memiliki 1 unit kantor semi permanen yang berlokasi di bandara Sams Sepinggan yang terkena fasilitas umum dengan NUP 1 dengan nilai sebesar Rp 323.062.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah), serta 7 unit rumah Negara dalam kondisi rusak berat, yaitu Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen NUP 4,5,6,8,10,11, dan 16 Jalan

Melati atau Jalan KH. Agus Salim II dengan nilai sebesar Rp 792.112.000(tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah).

Dari jumlah/nilai Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal di atas, jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	19.290,976,498,00
Intrakomptabel	19,277,694,458,00
Ekstrakomptabel	13,282,040,00

#### **Monumen (4.02)**

Saldo Monumen pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 960,278,854,00 (*sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Monumen di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	960,278,854,00

Kelompok barang Monumen yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Monumen di atas, jumlah Monumen yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Menara per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	355,303,178,00
Intrakomptabel	355,303,178,00
Ekstrakomptabel	0

#### **Bangunan Menara (4.03)**

Saldo Bangunan Menara pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Bangunan Menara di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Bangunan Menara yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Bangunan Menara di atas, jumlah Bangunan Menara yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Bangunan Menara per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

**Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)**

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nilai sebesar Rp 2,846,001,140,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta seribu serratus empat puluh rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah	<b>NIHIL</b>			
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	7	2.253.430.116,00
Rusak Ringan	2	592.571.024,00
Rusak Berat	0	

Kelompok barang Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	339,139,176,00
Intrakomptabel	339,139,176,00
Ekstrakomptabel	0

**e. Jalan, Irigasi dan Jaringan (33411)**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 sebesar 4 (*empat*) unit dengan nilai Rp 432.568.000,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*). Dengan saldo awal 4 (*empat*) unit dengan nilai sebesar Rp 432.568.000,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*). Dengan tidak ada Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang.

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	4	432.568.000,00
Intrakomptabel	4	432.568.000,00
Ekstrakomptabel	0	0

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Akumulasi Penyusutan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	144.089.213,00
Intrakomptabel	144.089.213,00
Ekstrakomptabel	0

### **Jalan dan Jembatan (5.01)**

Saldo Jalan dan Jembatan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0(nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah	<b>NIHIL</b>			
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Jalan dan Jembatan di atas, jumlah Jalan dan Jembatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

### **Bangunan Air (5.02)**

Saldo Bangunan Air pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 199,484,000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	199,484,000,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Jalan dan Jembatan di atas, jumlah Jalan dan Jembatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	49,871,000,00
Intrakomptabel	49,871,000,00
Ekstrakomptabel	0

### **Instalasi (5.03)**

Saldo Instalasi pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah	<b>NIHIL</b>			
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Instalasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Instalasi di atas, jumlah Instalasi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Instalasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
-------------	----------------------

Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

**Jaringan (5.04)**

Saldo Jaringan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai sebesar Rp 233,084,000,00 (*dua ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah*). Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	3	233,084,000,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Jaringan di atas, jumlah Jaringan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	94,218,213,00

Intrakomptabel	94,218,213,00
Ekstrakomptabel	0

**f. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar 4 (*empat*) unit dengan nilai Rp 584,279,718,00 (*lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*). Dengan saldo awal 4 (*empat*) unit dengan nilai sebesar Rp 567,882,112,00 (*lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu serratus dua belas rupiah*).

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	4	584,279,718,00
Intrakomptabel	0	0
Ekstrakomptabel	4	584,279,718,00

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	0	0	4	567,882,112,00
Mutasi Tambah	0	0	1	248,210,262,00
Mutasi Kurang	0	0	1	231,812,656,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	0	0	4	584,279,718,00

Akumulasi Penyusutan untuk, Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

**Bahan Perpustakaan (6.01)**

Saldo Bahan Perpustakaan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk

gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai Bahan Perpustakaan di atas, jumlah Bahan Perpustakaan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan untuk Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

#### **Bahan Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga (6.02)**

Saldo Bahan Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Bahan Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Bahan Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Bahan Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga di atas, jumlah Bahan Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Bahan Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

### **Hewan (6.03)**

Saldo Hewan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp 584,279,718,00 (*lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	0	0	4	567,882,112,00
Mutasi Tambah	0	0	1	248,210,262,00
Mutasi Kurang	0	0	1	231,812,656,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	0	0	4	584,279,718,00

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	4	584,279,718,00
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Bahan Perpustakaan di atas, jumlah Bahan Perpustakaan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

#### **Ikan (6.04)**

Saldo Ikan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah	<b>NIHIL</b>			
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Ikan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Ikan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Ikan di atas, jumlah Ikan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

### **Tanaman (6.05)**

Saldo Tanaman pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				

Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Dari jumlah Tanaman di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Tanaman yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Tanaman di atas, jumlah Tanaman yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Tanaman per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

#### **Barang Koleksi Non Budaya (6.06)**

Saldo Barang Koleksi Non Budaya pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				

Saldo Akhir per 31 Desember 2023				
----------------------------------	--	--	--	--

Dari jumlah Barang Koleksi Non Budaya di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Barang Koleksi Non Budaya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Barang Koleksi Non Budaya di atas, jumlah Barang Koleksi Non Budaya yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Barang Koleksi Non Budaya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

#### **Aset Tetap dalam Renovasi (6.07)**

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari – 31 Desember 2023 untuk gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				

Saldo Akhir per 31 Desember 2023				
----------------------------------	--	--	--	--

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Aset Tetap Dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah/nilai Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan untuk Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

#### g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar 0 (nol) unit dengan nilai Rp 0,00 (nol rupiah).

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0	0
Intrakomptabel	0	0
Ekstrakomptabel	0	0

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)

Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Akumulasi Penyusutan untuk, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

#### Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar 0 ( *nol* ) unit dengan nilai Rp 0,00 ( *nol rupiah* ).

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0	0
Intrakomptabel	0	0
Ekstrakomptabel	0	0

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023				
Mutasi Tambah		<b>NIHIL</b>		
Mutasi Kurang				
Saldo Akhir per 31 Desember 2023				

Akumulasi Penyusutan untuk, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	0
Intrakomptabel	0
Ekstrakomptabel	0

#### h. BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 01 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar 3.322 (*tiga ribu tiga ratus dua puluh dua*) unit dengan nilai Rp 3,220,965,474,00 (*tiga miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*). Dengan saldo awal 2.498 (*dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan*) unit dengan nilai sebesar Rp 890,676,238,00 (*delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*).

Klasifikasi	Jumlah	Nilai (Rp)
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	3.322	3,220,965,474,00
Intrakomptabel	3.321	3,220,740,474,00
Ekstrakomptabel	1	225,000,00

Dengan mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023	2.493	889,351,238,00	5	1,325,000,00
Mutasi Tambah	1.749	2,974,225,907,00	44	8,477,400,00
Mutasi Kurang	921	642,836,671,00	48	9,577,400,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	3.321	3,220,740,474,00	1	225,000,00

Akumulasi Penyusutan untuk, Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Akumulasi Penyusutan
Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	1,797,594,869,00

Intrakomptabel	1,797,369,869,00
Ekstrakomptabel	225,000,00

### 3. Barang Milik Negara pada Kanwil DJBC Kalbagtim per 31 Desember 2023

#### a. BMN per akun neraca

Nilai BMN dan Persediaan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 327,084,529,110,00 (*tiga ratus dua puluh tujuh miliar delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu serratus sepuluh rupiah*). Dengan nilai penyusutan adalah Rp 77,567,516,749 (*tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*). Nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>I</b>	<b>Aset Lancar</b>						
1	Persediaan	Rp 1,668,878,940	0,42%	0	0	Rp 1,668,878,940	0,42%
	<b>Sub Jumlah (I)</b>	<b>Rp 1,668,878,940</b>	<b>0,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Rp 1,668,878,940</b>	<b>0,42%</b>
<b>II</b>	<b>Aset Tetap</b>						
1	Tanah	Rp 254,604,310,000	63,54%	0	0	Rp 254,604,310,000	63,41%
2	Peralatan dan Mesin	Rp 62,929,385,584	15,70%	Rp 150,120,038	19,23%	Rp 63.079.505.622	15,71%
3	Gedung dan Bangunan	Rp 77,861,754,949	19,43%	Rp 46,190,450	5,92%	Rp 77,907,945,399	19,40%
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp 432,568,000	0,11%	0	0	Rp 432,568,000	0,11%
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	Rp 584,279,718	74,83%	Rp 584,279,718	0,15%
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	<b>Sub Jumlah (II)</b>	<b>Rp 395,828,018,533</b>	<b>98,78%</b>	<b>Rp 780,590,206</b>	<b>99,97%</b>	<b>Rp 396,608,608,739</b>	<b>98,78%</b>
<b>III</b>	<b>Aset Lainnya</b>						
1	Kemitraan dg Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang dihentikan dari operasional pemerintah	Rp 3,220,740,474	0,80%	Rp 225,000	0,03%	Rp 3,220,965,474	0,80%
	<b>Sub Jumlah (III)</b>	<b>Rp 3,220,740,474</b>	<b>0,80%</b>	<b>Rp 225,000</b>	<b>0,03%</b>	<b>Rp 3,220,965,474</b>	<b>0,80%</b>
	<b>Total</b>	<b>Rp 400,717,637,947</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 780,815,206</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 401,498,453,153</b>	<b>100,00%</b>

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Kanwil DJBC Kalbagtim per 31 Desember 2023 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
----	---------------	----------------	-----------------

		Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>I</b>	<b>Aset Tetap</b>						
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp 56,186,925,231)	72.6%	(Rp 147,930,938)	91.6%	(Rp 56,334,856,169)	72.6%
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	( Rp 19,277,694,458)	24.9%	(Rp 13,282,040)	8.2%	(Rp 19,290,976,498)	24.9%
3	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(Rp 144,089,213)	0.2%	0		(Rp 144,089,213)	0.2%
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(Rp 1,797,369,869)	2.3%	(Rp 225,000)	0.1%	( Rp 1,797,594,869 )	2.3%
	<b>Total</b>	<b>(Rp 77,406,078,771)</b>	<b>100%</b>	<b>(Rp 161,437,978)</b>	<b>100%</b>	<b>(Rp 77,567,516,749)</b>	<b>100%</b>

### Penjelasan:

Nilai Aset yang tersaji dalam Neraca pada Laporan Keuangan Kanwil DJBC Kalbagtim Tahun Anggaran 2023 merupakan nilai aset intrakompatabel. sedangkan untuk aset ekstrakompatabel hanya disajikan dalam Laporan SAKTI Modul Aset Tetap karena setiap aset yang diperoleh harus dicatat namun yang disajikan dalam neraca hanya aset yang memenuhi standar kapitalisasi. Selain itu kapitalisasi tidak berlaku atas BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi. Kanwil DJBC Kalbagtim memiliki aset tetap lainnya berupa anjing yang digunakan untuk tugas dan fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan narkotika sehingga atas Anjing Pelacak Narkotik (APN) dicatat sebagai aset ekstrakompatabel.

## V. INFORMASI BMN LAINNYA

### 1. Informasi Pengelolaan BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan UAPPBW Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	232,823,323,000	21.780.987.000
2	Peralatan dan Mesin	39.131.820.898	631.273.711
3	Gedung dan Bangunan	59.672.377.492	2.647.763.982
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	233.084.000	159.587.200
5	Aset Tetap Lainnya	777.704.718	0

#### b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah tangan	Penghapusan	Jumlah
-----	--------	------------	-------------	-----------------	-------------	--------

1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	5	1	6
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	1	0	1	3	5
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna BarangWilayah	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari Pengguna Barang	1	0	0	2	3
7	Tindak Lanjut oleh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna BarangWilayah	0	0	1	1	2
8	Selesai Serah Terima	3	0	0	10	13
9	Gagal/batal proses	0	0	0	0	0

Penjelasan:

**Pada KPPBC TMP C Bontang**

Barang milik negara (BMN) sebanyak 9 unit berupa peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat, telah dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023. Total hasil lelang BMN tersebut sebesar Rp Rp 1.556.010,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu sepuluh rupiah) telah dibayarkan ke kas negara oleh Budi Setyawan sebagai pemenang lelang dan menjadi penerimaan negara dengan NTPN 6A1F28N3EANQEG0N dan 37FA97QLUG5E1DUE tanggal 20 September

2023. BMN tersebut kemudian dilakukan serah terima dengan dengan BAST nomor BA30/KBC.1603/2023 tanggal 21 September 2023. Atas hal tersebut, diajukan permohonan penghapusan BMN kepada Sekretaris DJBC dengan Nota Dinas Nomor ND- ND630/KBC.1603/2023 tanggal 22 September 2023. Permohonan tersebut disetujui dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 181/KM.4/BC.01/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada KPPBC TMP C Bontang. dan telah dilakukan penghapusan BMN dari daftar Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Aplikasi SAKTI tanggal 10 Oktober 2023 Rincian BMN tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merek/Tipe/ Identitas	Kondisi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)
1	Lemari Besi / Metal	3050104001	2	Hitachi, Asahi, Elite	Rusak Berat	2001	79.786,-	2.000,-
2	Rak Kayu	3050104004	7	Lokal	Rusak Berat	1992	85.333,-	1.000,-
3	Rak Kayu	3050104004	9	Lokal	Rusak Berat	1992	85.333,-	1.000,-
4	A.C Split	3050204004	10	Panasonic	Rusak Berat	2010	7.260.000,-	291.000,-
5	A.C Split	3050204004	15	-	Rusak Berat	2012	4.142.807,-	170.000,-
6	Handy Talky (HT)	3060201006	3	ICOM	Rusak Berat	2016	2.284.200,-	25.000,-
7	Handy Talky (HT)	3060201006	4	ICOM	Rusak Berat	2016	2.284.200,-	25.000,-
8	Handy Talky (HT)	3060201006	5	ICOM	Rusak Berat	2016	2.284.200,-	25.000,-
9	Handy Talky (HT)	3060201006	6	ICOM	Rusak Berat	2016	2.284.200,-	25.000,-
<b>JUMLAH</b>							<b>20.790.059,-</b>	<b>565.000</b>

#### **Pada KPPBC TMP B Tarakan**

##### **1. Penggunaan**

Pada KPPBC TMP B Tarakan per 31 Desember 2023 terdapat transaksi penggunaan antara lain 2 (dua) BMN alih penggunaan, dan lelang bongkaran yang dapat dirinci sebagai berikut:

##### **a. Alih Penggunaan BMN**

Terdapat 1 (satu) unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen NUP 27 yang beralamatkan di Rumah Dinas BC 32 Jalan Tanjung Harapan RT 38/14, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang dialihguna ke KPP Pratama Tanjung Redeb c.q. KP2KP Tanjung Selor berdasarkan nota dinas usulan nomor ND-797/KBC.1605/2023 tanggal 20 September 2023 dan telah disetujui berdasarkan nota dinas nomor ND-476/MK.1/SJ.7/2023 tanggal 05 Oktober 2023. Telah terbit BAST antar Eselon I nomor BA- 79/BC.01/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan telah dilakukan transaksi transfer keluar di SAKTI ke KPP Tanjung Redeb tanggal Pembukuan SAKTI 30 Mei 2023 dengan nomor SPPA C02232;

Terdapat 1 (satu) unit Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 9 yang beralamatkan di Jalan Tanjung Harapan RT 38/14, Kelurahan Tanjung

Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang dialihguna ke KPP Pratama Tanjung Redeb c.q. KP2KP Tanjung Selor berdasarkan nota dinas usulan nomor ND- 108/KBC.1605/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan telah disetujui berdasarkan nota dinas nomor ND-78/MK.1/SJ.7/2023 tanggal 07 Februari 2023. Telah terbit BAST antar unit Eselon I dan telah dilakukan transfer keluar.

2. Pemindahtanganan

Pada KPPBC TMP B Tarakan per 31 Desember 2023 terdapat transaksi pemindahtanganan terhadap 88 BMN barang peralatan dan mesin.

3. Pemanfaatan

NIHIL

4. Penghapusan

Pada KPPBC TMP B Tarakan terdapat 1 (satu) unit BMN yang dilakukan transaksi penghapusan per 31 Desember 2023 meliputi:

No	Nama Barang	NUP	Keterangan
1	Mess/Wisma/Bungalo w/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	1	Penghapusan sebab-sebab lain karena anggaran pengganti telah tersedia (rekonstruksi mess) berdasarkan surat keputusan penghapusan nomor KEP-38/KM.4/BC.01/2023 tanggal 13 Maret 2023 dan telah dilakukan transaksi penghapusan pada aplikasi SAKTI pada 30 Mei 2023 nomor SPPA C01231
2	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
5	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
6	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
8	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	5	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
9	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	6	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
10	A.C. Split	18	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
11	A.C. Split	19	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023

12	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	9	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
13	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	10	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
14	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	11	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
15	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	12	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023

16	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	13	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	14	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
18	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	15	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
19	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	16	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
20	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	17	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
21	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	18	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
22	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	19	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
23	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	20	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
24	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	21	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
25	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	22	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
26	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	23	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
27	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	24	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
28	Mesin Ketik Listrik	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023

29	Mesin Hitung Manual	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
30	Mesin Hitung Listrik	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
31	Mesin Hitung Listrik	2	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023

32	Mesin Hitung Listrik	3	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
33	Mesin Hitung Listrik	4	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
34	Mesin Hitung Listrik	5	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
35	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
36	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
37	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	3	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
38	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
39	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	5	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
40	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	6	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
41	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	7	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
42	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	8	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
43	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	9	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
44	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	10	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
45	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	11	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023

46	Alat Penghancur Kertas	2	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
47	Audio Mixing Portable	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
48	Handy Talky (HT)	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
49	Handy Talky (HT)	2	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
50	Handy Talky (HT)	3	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
51	Handy Talky (HT)	4	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
52	Handy Talky (HT)	5	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
53	Handy Talky (HT)	6	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
54	Handy Talky (HT)	7	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
55	Teropong (Optik)	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
56	Teropong (Optik)	2	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
57	Teropong (Optik)	3	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
58	Teropong (Optik)	4	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
59	Portable CDP Cable	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
60	Filing Cabinet Besi	14	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
61	Filing Cabinet Besi	21	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
62	Filing Cabinet Besi	22	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
63	Meja Kerja Kayu	83	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023

64	Meja Kerja Kayu	104	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
65	Meja Kerja Kayu	108	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
66	Kursi Besi/Metal	1	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
67	Kursi Besi/Metal	2	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
68	Kursi Besi/Metal	70	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
69	Kursi Besi/Metal	76	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
70	Kursi Besi/Metal	77	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
71	Kursi Besi/Metal	114	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
72	Kursi Besi/Metal	115	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
73	Kursi Besi/Metal	116	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
74	Kursi Besi/Metal	119	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
75	Kursi Besi/Metal	120	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
76	Kursi Besi/Metal	121	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
77	Kursi Besi/Metal	123	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
78	Kursi Besi/Metal	129	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
79	Kursi Besi/Metal	130	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
80	Kursi Besi/Metal	224	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
81	Kursi Besi/Metal	225	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023

82	Kursi Besi/Metal	226	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
83	Kursi Besi/Metal	227	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
84	Kursi Besi/Metal	228	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
85	Kursi Besi/Metal	229	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
86	Kursi Besi/Metal	230	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
87	Kursi Besi/Metal	231	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
88	Kursi Besi/Metal	232	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023
89	Kursi Besi/Metal	233	Penghapusan karena pemindahtanganan dengan penjualan sesuai KEP nomor 200/KM.4/BC.01/2023

### c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

### 2. BMN Dari Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan

Tidak terdapat BMN dari Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan

### 3. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

DJBC bukan merupakan BLU

### 4. BMN Dari Dana Belanja Lain Lain (BA999)

Pada Kanwil DJBC Kalbagtim per 31 Desember 2023 tidak terdapat terdapat BMN Dari Dana Belanja Lain Lain (BA-999)

## **5. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang**

### **a. Daftar Barang Rusak Berat**

Terhadap barang rusak berat telah dilakukan perencanaan pada RP4 (Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan)

### **b. Daftar Barang Hilang**

Tidak terdapat BMN hilang pada penatausahaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah

## **6. BMN Berupa BPYBDS**

Tidak terdapat BPYBDS

## **7. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN, antara lain:

- a. Data BMN antara aplikasi SAKTI dan SIMAN terdapat perbedaan dikarenakan *bug* dan/atau proses interkoneksi yang belum berjalan;
- b. Perlunya dilaksanakan bimbingan teknis bagi operator sebelum dilaksanakan kegiatan pelaporan BMN guna menunjang pelaksanaan pelaporan yang tepat dan akurat;
- c. Perlu dilakukan koordinasi ulang terhadap unit vertikal dikarenakan seringnya operator BMN dilakukan rolling tugas/bidang/ bagian pada saat-saat kritis (pertengahan tahun dan awal tahun) hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dan kegiatan lain di bidang penatausahaan BMN dikarenakan minimnya transfer ilmu dan perlunya operator yang baru untuk melakukan adaptasi.

## **8. Langkah-langkah Strategis**

Langkah-langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Kanwil DJBC Kalbagtim, antara lain:;

- a. Berkoordinasi dengan tim/pic pusat dalam kegiatan pengelolaan BMN;
- b. Monitoring task *To-Do List* melalui MONSAKTI, aplikasi PASTI;
- c. Berkoordinasi dengan pejabat berwenang pada unit vertikal.

## **9. Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait Pengelolaan BMN**

Pada periode pelaporan per 31 Desember 2023, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kanwil DJBC Kalbagtim terkait Pengelolaan BMN adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagaimana berikut:

## **10. Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN)**

Dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, menyatakan bahwa :

1. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMMN berasal dari :
2. BTD yang merupakan barang yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor;
3. BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor dan tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP;
4. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
5. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
6. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
7. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Penyelesaian BMN tersebut diawali dengan melakukan penilaian barang, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajukan usulan peruntukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan total nilai pengajuan (KPKNL, Kanwil DJKN, atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Selanjutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan memberikan keputusan persetujuan berupa lelang, hibah, musnah, hapus dan/atau penetapan status peruntukan (PSP). BMN tersebut merupakan kekayaan negara dan dilampirkan sebagai catatan atas laporan keuangan Direktorat Jendera Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaa Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, laporan pencatatan Barang Menjadi Milik Negara digunakan sebagai lampiran penyerta neraca pemerintah pusat, tetapi tidak menjadi komponen neraca.

## **11. Pengungkapan Lainnya**

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)  
Nihil
- b. BMN selain Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)  
Nihil
- c. Hibah  
Nihil
- d. Reklasifikasi BMN  
Nihil

Penanggungjawab Unit Akuntansi Pembantu  
Pengguna Barang-Wilayah  
Kanwil DJBC Kalbagtim,



Ditandatangani secara elektronik  
Kusuma Santi Wahyuningsih

